



UNIVERSITAS INDONESIA

**SIKAP PNI BARU DAN PARTINDO TAHUN 1931-1934
TERHADAP KASUS *TWEEDE KAMER* DAN *WILDEN*
*SCHOLEN ORDONANTIE***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

YAHYA FARID NASUTION

0705040541

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI SEJARAH

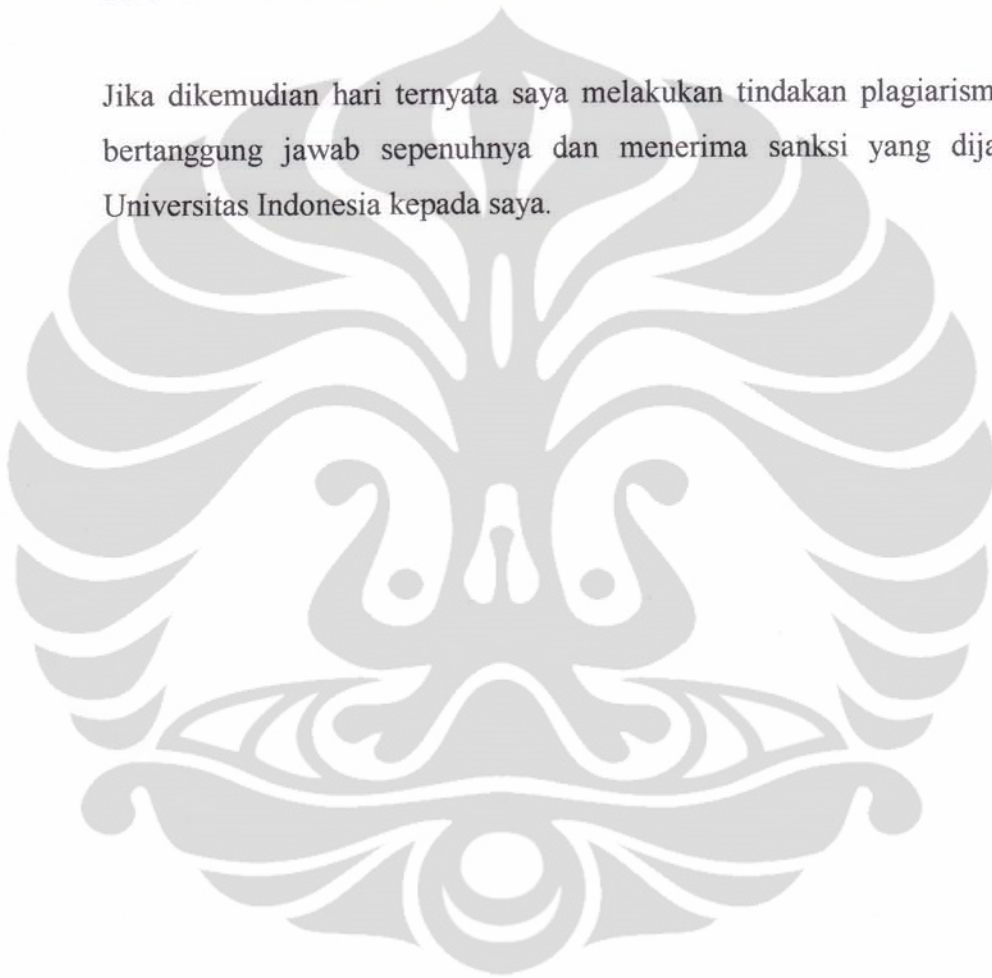
DEPOK

JUNI 2011

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.



Depok, 12 Juli 2011

Yahya Farid Nasution

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yahya Farid Nasution

NPM : 0705040541

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

nama : Yahya Farid Nasution
NPM : 0705040541
Program Studi : Sejarah
Judul : Sikap PNI-baru dan Partindo tahun 1931-1934 terhadap kasus *Tweede Kamer* dan *Wilden Scholen Ordonantie*.

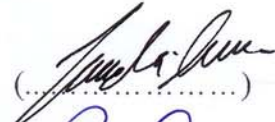
ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dwi Mulyatari, M.A.


(.....)

Penguji 1 : Iman Hilman, M.Hum.


(.....)

Penguji 2 : Dr. Bondan Kanumoyoso


(.....)

Panitera : Abdurakhman, M.Hum.


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Juli 2011

oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta
NIP 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat, rizki dan kasih sayang-Nya, saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Suka duka yang disertai semangat dan doa hanyalah usaha dari saya. Semua kembali lagi kepada-Nya dan saya sangat bersyukur atas karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada saya. Skripsi ini diselesaikan untuk meraih gelar Sarjana Humaniora di Program Studi Sejarah. Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan doa, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang selalu mendukung dan memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Terima kasih atas doa ayah, Alm. Partomuan Nasution, dan opung saya. Doaku selalu menyertai ayah dan opung. Doa dan semangat dari ibu dan adik, Farida Hanum Siregar dan Fatimah Hizria, yang selalu menyertai setiap langkahku. Terima kasih kepada Uak Rusdi dan Uak Nunu yang selalu menyemangati dan mendukung saya dalam segala hal terutama pendidikan saya. Terima kasih untuk Mba Iyin dan Bang Dole, Mas Iyo dan Mbak Putri, saya sangat menantikan si calon keponakan. Tingti dan Pare, awet dan langgeng terus yaa. Terima kasih atas doa dan bantuannya kepada nenek, Om Herman dan Tante Siska, Tante Ati, tante Ros dan Om Edi, dan segenap keluarga di Pekanbaru. Terima kasih untuk doa, semangat, cinta, dukungan dan bantuannya.

Terima kasih kepada seluruh pengajar dan pegawai Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi saya, Dwimulyatari, M.A. yang telah membimbing skripsi saya semester terakhir ini. Terima kasih atas kesabarannya, dukungannya, dan segala masukan yang telah diberikan kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada ketua Program Studi Sejarah, Abdurakhman, M.Hum. dan Tri Wahyuning Mudaryanti S.S., M.Si. Saya sangat berterima kasih semangat yang telah diberikan dari kuliah bimbingan bacaan. Memang saya harus di ancam dulu supaya semangat. Terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Program Studi Sejarah. Walaupun saya sering sekali tidur di kelas, kalian tetap bersabar dan semangat mengajar.

Terima kasih saya ucapkan kepada Syefri Luwis, atas pinjaman bukunya yang sangat bermanfaat. Arya Maulana, atas pendapat dan masukannya terhadap tulisan saya, Sulaiman Harahap dengan komentarnya yang sangat inspiratif dalam status *Facebook* saya yang selalu terngiang dalam proses pengerjaan skripsi. Riana dengan translate bahan yang sangat membantu saya. Bang Rudy *Stalin* dengan buku-buku langkanya. Terima kasih untuk seluruh pegawai perpustakaan FIB UI dan Perpustakaan Nasional. Sukses untuk kalian semua.

Terima kasih kepada “La-Kons”, yaitu Catra a.k.a Mat Bewhok dengan printer, sepatu sidang, pinjaman laptop, dll. Samsu dengan kegalauannya dan pinjaman uang selama di kons. Adi a.k.a Pangeran yang ditukar a.k.a idung dengan kesabarannya menunggu saya yang meminta barengan dari rumah atau depok dan yang telah menjadi sahabat atau musuh sejati saya dari SMA. Ridwan a.k.a Sikrit Pangeran dengan kesukarelaannya meminjamkan leptop dan memberikan saya sampo, coklat susu di saat pagi hari, yakult, dan makanan yang ada di dalam kulkas dan kotak hijau keramatnya. “Ikhlash yaa, Wan?” Leith Fernando a.k.a Omba dengan wejangan dan nasihat yang sangat bijaksana, support rokoknya yang selalu habis setiap pagi. “maaf yaa, Om”. Panji dengan ke-sekip-an luar biasanya dan curhatannya yang tak pernah habis. “gue sebutin gak yaa?” hehehe. Dimas a.k.a Dimar atas celaan dan semangatnya kepada saya dalam proses mengerjakan skripsi. Diman dengan perjalanan 9 jam yang sangat mengesankan. Jika saya jadi presiden, sungguh saya larang semua orang untuk menggunakan kendaraan mobil. Terima kasih untuk Tiko dan Damar sebagai rekan berkelahi saya. “untung parfumnya sudah dibuang, Ko”. Nanto dengan ke-*gablaks*-annya yang selalu menghibur saya. Fahrizal a.k.a Nyibok dengan ke-*onjoe*-annya dalam memikat hati wanita. Cemen, Dipta yang selalu membantu saya dalam mengalahkan musuh dalam game HoN. Temut, Nindira, dan Gadis, yang selalu ceria dan memberikan konsumsi berupa rokok dan makanan. Terima kasih untuk kalian atas suka dukanya, keceriaannya, kebersamaannya, dukungannya, dan semangatnya. Sungguh saya menyayangi kalian semua. Oh iya, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Rob dan Suami, Alm. Pak Haji dan keluarga. Maaf jika kami selalu menyusahkan kalian dengan kebisingan dan suara saya yang menggelegar. Doa kami bersama kalian.

Terima kasih kepada teman-teman dengan semangat dan perasaan senasib dan perjuangan, Adi 06, Hendri, Hendra, Hendaru, Boik, Ronal, Radit, Rendi, Yosi, Aji, Oki, Yogi, dan Tomo “lu harus selesai, Mo. Gak mau tau gue”. Untuk Dipo “ayolah ke Garut lagi”, Mprie, “oleh-oleh dari Jepangnya mau dong?”, Mizar dan Popon, terima kasih atas wejangan dan penyuluhan dari kalian. Sunguh membuat saya kembali bersemangat dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih kepada teman-teman Sejarah 05 dan lainnya untuk do’a dan semangat yang telah diberikan.

Terima kasih kepada generasi pendiri Meja Biru, Kansas. Bang Wiyo, Ino, Abeng, Njop, Ayu, Ochan, Dias, Luqi, Hari-hari bersama kalian tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih untuk teman-teman Pagupon yang memberikan saya pengalaman dalam berteater. Terima kasih untuk Koprul, Mas No, Kumis, Mus dan Jaliteng, Mas Iwan dan seluruh pihak Kansas. Makanan dan minuman dari kalian adalah anugerah yang tidak bisa saya lupakan. Terima kasih untuk Yuka dan teman-teman Lensa Massa. Mas Sofyan Purnama pengajar PDPT yang memberikan nasihat di awal perkuliahan, Mas Okeu pengajar MPKT Kaligrafi yang sudah sangat baik membantu saya dalam menyelesaikan mata kuliah tersebut. Terima kasih untuk Icha el hambra, Ji iy, Nabila, Lulu, dan teman-teman PDPT lainnya. Terima kasih untuk seluruh teman-teman di kampus tercinta, FIB UI, dengan segala kenangan dan pengalaman yang telah mengisi hidup saya.

Terima kasih kepada “Hujan Galau”, Riana A. Ibrahim, Ratih Fauzina, Tika Primandari, Wishnu Uyug, Anggita Panji Nayantaka dan si *Marsulipami* dengan kenangan bersama kalian di Nyempil, Jogjakarta, dan Monas. “Kapan-kapan kita jalan lagi yaa?”.

Terima kasih untuk Catra Ditya dan Bapak Imo yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut serta dalam sayembara “*You Raise Me Up*” bersama Adi Utomo dan Briantiko Aji. Terima kasih kepada Adan, Retti, untuk semangat yang telah kalian berikan kepada saya.

Terima kasih untuk Sania dan Kak Imam yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengajar di Salemba Group. Adidjaya Chandra a.k.a Cadut sebagai partner mengajar dalam menjual tiket. Latief dan teman-teman teknik metalurgi dengan permainan DOTA-nya yang sangat mengesankan. Niken, Devri,

Wildan, Sheilla yang selalu memberikan saya semangat dan bersedia sebagai bahan celaan saya, dan teman-teman SG lainnya.

Terima kasih kepada teman-teman *Crazy Trip* Tingti, Tomi, Topan, Away, yang telah memberikan keceriaan dan petualangan yang mengesankan. “lain kali pake persiapan ya?”. Terima kasih untuk semangat dan do’a yang diberikan dari teman-teman, Mpu, Galih, Faki, Wory, Norman, Rendi, Mujan dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada Icefrog dan Blizzards, teman-teman nyuntuk DOTA dan HoN, Bang Wiyow, Erwan, Tape, Ubi, Cemen, Catra, Abi, Acong, Dipta, Moyo, Ochan, Dion, Panji, Tiko, Salman, Rikos, Abeng dan Carlos. “Bisa jadi tiga tim nih klo kumpul semua”.

Terakhir, sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada Dilla Natasia. Terima kasih atas suka duka, dukungan, semangat, bantuan, dan kasih sayang yang telah diberikan.

Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih.

Depok, 12 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yahya Farid Nasution
NPM : 0705040541
Program Studi : Sejarah
Departemen : Sejarah Indonesia
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Sikap PNI-baru dan Partindo tahun 1931-1934 terhadap kasus *Tweede Kamer* dan *Wilden Scholen Ordonantie*.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 12 Juli 2011

Yang menyatakan,


(Yahya Farid Nasution)

ABSTRAK

Nama : Yahya Farid
Program Studi : Sejarah
Judul : Sikap PNI-baru dan Partindo tahun 1931-1934 terhadap kasus *Tweede Kamer* dan *Wilden Scholen Ordonantie*.

Skripsi ini berjudul pergerakan PNI-baru dan Partindo di Indonesia tahun 1931-1934. Pembahasan dimulai dari diberlakukannya politik etis yang berakibat munculnya kaum intelektual di Indonesia. Kaum intelektual membentuk organisasi-organisasi politik pada tahun 1920-an. Pada masa itu, PNI adalah organisasi yang paling radikal. Setelah Sukarno di tahan pemerintah, PNI dibubarkan dan pecah menjadi PNI-baru dan Partindo. Kedua organisasi tersebut saling bertentangan. Walaupun PNI-baru dan Partindo berbeda mengenai pola pergerakan, kedua organisasi satu pandangan dalam menghadapi persoalan nasional seperti Ordonansi Sekolah Liar. Pemerintah menanggapi pergerakan dari PNI-baru dan Partindo dengan reaksi keras dan menangkap pimpinan dari kedua organisasi tersebut. Maka berakhirlah pergerakan dari PNI-baru dan Partindo.

Kata kunci

PNI baru, Partindo, Indonesia tahun 1931-1934

ABSTRACT

Name : Yahya Farid Nasution
Study Program : History
Title : PNI-baru and Partindo's attitude in 1931-1934 on the *Tweede Kamer* and *Wilden Scholen Ordonantie* case.

This thesis is titled PNI-Baru and Partindo movement in Indonesia in 1931 – 1934. The discussion starts from the implementation of ethical politics which cause the presence of intellectuals in Indonesia. Intellectuals made the politic organizations in 1920. At that time, PNI was the most radical organization. After Sukarno was busted by the goverment, PNI was dissolved and then that organization divided into PNI-baru and partindo. Both of them is conflicting. Even the PNI-baru and Partindo have different opinion, both have same vision about national problem such as Ordonans Sekolah Liar. The Goverment responded PNI-baru and Partindo movement worstly and arrested the leaders of both organization. finally, the movement of both organization was over.

Key word

PNI baru, Partindo, Indonesian in 1931-1934

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xv
LAMPIRAN.....	xvi

I. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Lingkup Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sumber Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Penulisan.....	10

II. KONDISI SOSIAL DAN POLITIK MASA PERGERAKAN

NASIONAL.....	11
2.1 Politik Etis: Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia.....	11
2.1.1 Aktivitas Mahasiswa Indonesia di Belanda.....	14
2.2 Pergerakan Nasional Indonesia Masa Radikal Tahun 1920-an.....	17
2.2.1 Perhimpunan Indonesia.....	17

2.2.2	Partai Komunis Indonesia.....	19
2.2.3	Partai Nasional Indonesia.....	21
 III. PECAHNYA PNI: TERBENTUKNYA PARTINDO DAN PNI BARU.....24		
3.1	Pengadilan Pimpinan-pimpinan PNI.....	24
3.2	Partai Indonesia.....	31
3.3	Pendidikan Nasional Indonesia.....	36
 IV. PERGERAKAN PNI BARU DAN PARTINDO DALAM TWEEDE KAMER, ORDONANSI SEKOLAH LIAR DAN ZEVEN PROVINCIE.....42		
4.1	Persetujuan Partindo dengan PNI-baru.....	42
4.2	Peran Partindo dan PNI-baru mengenai Ordonansi Sekolah Liar.....	48
4.3	Pertentangan Antara Partindo dan PNI-baru Mengenai Hatta dan Tweede Kamer.....	59
5. KESIMPULAN.....		65
6. DAFTAR PUSTAKA.....		68
7. Lampiran.....		70

DAFTAR SINGKATAN



ELS	: <i>Europeesche Lagere School</i>
HBS	: <i>Hogere Burger School</i>
ISDV	: <i>Indische Sociaal-Democratische Vereniging</i>
M.R.	: <i>Meester In De Rechten</i>
MULO	: <i>Meer Uitgebreeld Lagere Onderwijs</i>
OSVIA	: <i>Opleidingscholen Voor Inlandsche Ambtenaren</i>
SI	: <i>Sarikat Islam</i>
Partindo	: <i>Partai Indonesia</i>
PBI	: <i>Persatuan Bangsa Indonesia</i>
PI	: <i>Perhimpunan Indonesia</i>
PKI	: <i>Partai Komunis Indonesia</i>
PNI	: <i>Partai Nasional Indonesia</i>
PNI-baru	: <i>Pendidikan Nasional Indonesia</i>
PPPKI	: <i>Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia</i>
STOVIA	: <i>School tot Opleiding van Inlandsche Artsen</i>
SDAP	: <i>Sociaal Democratische Arbeiderspartij</i>
SDI	: <i>Sarikat Dagang Islam</i>
VSTP	: <i>Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel</i>
VC	: <i>Vaderlandsche Club</i>

DAFTAR ISTILAH

<i>Boven Digul</i>	:Kamp pengasingan massal yang didirikan pemerintah Hindia Belanda
<i>Cursuscommissie</i>	:Komisi Bagian Kursus
Edukasi	:Pendidikan
<i>Een Eereschuld</i>	:Utang Budi
<i>Etische Politiek</i>	:Politik Etis
<i>Exorbitante Rechten</i>	:Hak gubernur jenderal untuk mengambil tindakan terhadap pimpinan politik yang dinilai berbahaya
<i>Hoofdenscholen</i>	:Sekolah Pegawai Pemerintah
Komintern	:Komunis Internasional
<i>Overmacht</i>	:Keadaan memaksa
Priyayi	:Elit Penguasa Pribumi
<i>Raad van Justitie</i>	:Pengadilan Tinggi
<i>Studieclub</i>	:Perkumpulan Pelajar
<i>Volksraad</i>	:Dewan Rakyat
<i>Wilden Scholen</i>	
<i>Ordonantie</i>	:Ordonansi Sekolah Liar
<i>Zeven Provinciën</i>	:Tujuh Provinsi (nama kapal)

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Makloemat Pembubaran P.N.I.**
- Lampiran 2 : Riwayat Pendirian „Partai Indonesia”**
- Lampiran 3 : Daftar Oesaha Partai Indonesia**
- Lampiran 4 : Rentjana Program „Partai Daulat Ra’jat Indonesia”.**
- Lampiran 5 : Satoe soerat dari Sdr. Mohammad Hatta kepada Mr. Sartono**



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada masa pergerakan nasional, aksi rakyat bumiputera di Hindia Belanda dalam memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda dilandasi oleh semangat nasionalisme yang kuat. Organisasi-organisasi politik pribumi modern terbentuk dan menjadi wadah untuk berjuang melawan Pemerintah kolonial Belanda. Gerakan politik dari organisasi-organisasi seperti Sarikat Islam (selanjutnya disebut SI), Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disebut PKI), dan Partai Nasional Indonesia (selanjutnya disebut PNI) menjadi awal pergerakan politik modern dan simbol perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Gagasan perlawanan terhadap pemerintah melalui organisasi-organisasi politik ini ternyata berawal dari kebijakan Politik Etis¹ yang diberikan Belanda sebagai balas budi terhadap Hindia Belanda. Salah satu dari isi politik etis adalah “edukasi” yaitu pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan rakyat pribumi Hindia Belanda. Namun pendidikan yang diberikan ternyata menjadi bumerang bagi pemerintah kolonial Belanda yang akhirnya memunculkan tokoh-tokoh intelektual pribumi. Oleh karena itu kebijakan politik etis inilah yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional.²

Pada bulan Januari 1901 Ratu Wilhelmina mengumumkan di depan parlemen program pemerintah Belanda, bahwa Belanda telah memperoleh keuntungan yang berlimpah-limpah dari Hindia Belanda. Oleh karena itu, usaha pemerintah kolonial di masa mendatang adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menambahkan, ”kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda”³, karena bangsa Belanda berhutang budi kepada rakyat

¹ Pembahasan tentang politik etis dapat dilihat di: Elsbeth Locher-Scholten. (1996). *Etika yang berkeping-keping: Lima telaah kajian aliran etis dalam politik kolonial 1877 - 1942*. Jakarta: Djambatan. bagian 5 berjudul ”Politik etis, gambaran yang sudah berkeping-keping”.

² A. K. Pringgodigdo SH. (1991). *Sejarah pergerakan rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. hlm. vi.

³ Robert Van Niel. (1984). *Munculnya elite modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya. hlm. 51.

Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda kemudian perlahan-lahan memperluas kesempatan bagi anak-anak pribumi untuk mengikuti sekolah-sekolah berbahasa Belanda tingkat dasar dan menengah.⁴

Menjelang akhir Perang Dunia I (selanjutnya disebut PD I), kebijakan yang baru mengenai pendidikan menghasilkan beberapa lulusan yang jumlahnya semakin meningkat. Walaupun di Hindia Belanda sudah ada sekolah tinggi untuk pribumi seperti *Opleidingscholen voor inlandsche ambtenaren* (OSVIA) sebagai sekolah pelatihan untuk para pejabat pribumi dan *School tot opleiding van inlandsche artsen* (STOVIA) sebagai sekolah pelatihan dokter-dokter pribumi⁵, namun sekolah tinggi di wilayah Hindia Belanda baru sedikit sekali dan tidak satu pun yang menyediakan status profesional secara penuh.⁶ Sehingga lulusan-lulusan terbaik pribumi di sekolah-sekolah Hindia Belanda harus melanjutkan pendidikan mereka di Negeri Belanda.⁷

Dalam beberapa tahun, semakin banyak pelajar pribumi yang lulus dari STOVIA atau *Hogere Burger School* (HBS) sekolah SMA di Batavia, ibukota kolonial di Jawa,⁸ yang kemudian melanjutkan studinya di Negeri Belanda. Dalam proses belajar di Belanda, mereka mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Pada akhirnya semakin membentuk kesadaran berpolitik bagi para pelajar pribumi tentang keadaan negerinya sendiri.⁹

Ketika masih berada di Hindia Belanda mereka memegang peranan penting dalam organisasi-organisasi pribumi dan dengan penuh semangat ikut dalam pergerakan kebangsaan.¹⁰ Untuk menyalurkan semangat pergerakan di negeri Belanda, mereka membentuk *Indische Vereeniging* tahun 1908. *Indische Vereeniging*

⁴ Scholten. *op. cit.*, hlm. 237.

⁵ M.C. Ricklefs. (2005). *Sejarah Indonesia modern*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. hlm. 330.

⁶ Sebagai contoh, lulusan STOVIA untuk mendapat gelar dokter Eropa harus melanjutkan sekolah dokter di negeri Belanda. Penjelasan selanjutnya dapat dilihat di: Van Niel. *op. cit.*, hlm. 77.

⁷ John Ingleson. (1983). *Jalan ke pengasingan*. Jakarta: LP3ES. hlm. 1.

⁸ Mavin Rose. (1991). *Indonesia merdeka: Biografi politik Mohammad Hatta*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 13.

⁹ Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. (1975). *Sejarah nasional Indonesia jilid 5*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 79.

¹⁰ Banyak organisasi yang muncul setelah politik etis diberlakukan di Hindia Belanda. Organisasi-organisasi tersebut dijelaskan di dalam: AK. Pringgodigdo. *op. cit.*, bab 1 berjudul Masa 1908-1920.

pada awalnya berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan serta sebagai wadah untuk bertukar berita dari tanah air.¹¹ Pernyataan tersebut didukung di dalam buku *Munculnya Elite Modern Indonesia* yang ditulis Van Niel, "Untuk kontak sosial mereka membentuk *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Hindia) tahun 1908 -- sebuah perkumpulan kebudayaan, akan tetapi juga merupakan suatu pentas tempat menyebarkan ide-ide baru."¹²

Dalam perkembangannya, semakin banyak pelajar pribumi yang berdatangan ke negeri Belanda dan kemudian bergabung dengan *Indische Vereeniging*. Mereka merasa organisasi ini harus berubah dari organisasi pelajar biasa menjadi lebih radikal dan memiliki tujuan politis. Mulai saat itu Mereka disebut sebagai kaum intelektual yang mempunyai visi yaitu Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah organisasi politik sebagai wadah perjuangan.¹³

Perubahan kondisi sosial dan politik di Dunia setelah PD I sangat berakibat bagi pandangan kaum intelektual pribumi. Peristiwa yang terjadi di dunia seperti gerakan *Sinn Fein* di Irlandia dan *Kongres Nasional India* Mahatma Gandhi tahun 1922 yang memberikan pemahaman baru bahwa tujuan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan tidak akan tercapai jika bekerja sama dengan pemerintah kolonial.¹⁴ Untuk mewujudkannya, usaha awal dari kaum intelektual Indonesia adalah mendirikan organisasi-organisasi pelajar (selanjutnya disebut *Studieclub*) sebagai wadah perjuangan. Ada tiga *Studieclub* yang menjadi awal dari pergerakan nasional modern Indonesia. Pertama adalah *Indische Vereeniging* yang didirikan tahun 1908 kemudian berubah menjadi organisasi politik yaitu Perhimpunan Indonesia (selanjutnya disebut PI) pada tahun 1922. Organisasi pelajar kedua adalah *Indonesische Studieclub* didirikan pada tahun 1924 di Surabaya. Kemudian *Indonesische Studieclub* berubah menjadi organisasi politik yaitu Persatuan Bangsa Indonesia (selanjutnya disebut PBI) pada tahun 1930. Organisasi terakhir adalah *Algemeene Studieclub* yang didirikan pada tahun 1925 di Bandung oleh Sukarno.

¹¹ Ingleson. *op. cit.*, hlm. 2 dan 3.

¹² Van Niel. *op. cit.*, hlm. 74.

¹³ *Ibid.* hlm 290.

¹⁴ Ingleson. *op. cit.*, hlm. 10.

Studieclub didirikan bertujuan sebagai tempat berdiskusi kaum intelektual mengenai keadaan sosial dan politik di Hindia Belanda dan dunia. Melalui diskusi-diskusi tersebut, anggota *Studieclub* mencoba menghasilkan usaha-usaha untuk membangun semangat dan rasa solidaritas antar sesama untuk berjuang mencapai Indonesia yang merdeka. Salah satu dari ketiga *studieclub* tersebut yang nantinya menjadi PNI adalah *Algemeene Studieclub*. Dalam perkembangannya, PNI menjadi salah satu partai besar dan berperan penting pada masa pergerakan nasional radikal.¹⁵

Pada tanggal 4 Juli 1927, para pimpinan *Algemeene Studieclub* yang terdiri dari Iskaq, Sunario, Budhyarto, dr. Tjipto Mangunkusumo, J. Tilaar, Sujadi, Sartono dan Anwari mengadakan rapat dan memutuskan pembentukan PNI. PNI kemudian berkembang sebagai partai yang besar dengan meneruskan pergerakan Indonesia yang telah hancur setelah pemberontakan PKI. Oleh karena itu, gerakan PNI harus radikal terhadap pemerintah kolonial. Sikap radikal PNI dinyatakan dengan azas *self-help* dan non-koperasi, yaitu semangat untuk berjuang dengan kekuatan diri sendiri dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial.¹⁶

Kekuatan PNI yang semakin besar menimbulkan kegelisahan bagi pemerintah Hindia Belanda. Dalam pidato pembukaan *Volksraad* tanggal 15 Mei 1928, Gubernur Jendral De Graeff mengatakan perlu memberikan peringatan kepada pimpinan PNI agar menahan diri dalam ucapan dan propaganda-propagandanya. Karena PNI tetap tidak menggubris peringatan dari pemerintah, maka pada tanggal 29 Desember 1929, Pimpinan PNI yang terdiri dari Sukarno, Gatot Mangkupradja, Maskoen, dan Supriadinata ditahan oleh polisi di Jogjakarta dengan tuduhan PNI akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah.¹⁷ penahanan tersebut sangat berdampak bagi pergerakan nasional Indonesia terutama bagi organisasi nasional lainnya. Sikap mereka menjadi lemah dan lebih berhati-hati dalam kegiatannya.¹⁸

¹⁵ Frank Dhont. (2005). *Nasionalisme baru intelektual Indonesia tahun 1920-an*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 2.

¹⁶ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 214 dan 215.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 220.

¹⁸ L. M. Sitorus (1975). *Sejarah pergerakan dan kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. hlm. 53.

Setelah kejadian penahanan Pimpinan PNI, Sartono yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua PNI kemudian menggantikan posisi Sukarno sebagai ketua PNI. Setelah melewati proses sidang dan banding yang dilakukan oleh PNI, akhirnya ke-empat pimpinan PNI dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan kolonial pada tanggal 22 Desember 1930. Karena keadaan mendesak setelah vonis dijatuhkan kepada pimpinan PNI, diadakan Kongres Luar Biasa ke II di Jakarta pada tanggal 25 April 1931 yang menghasilkan keputusan bahwa PNI dibubarkan. Kemudian tidak lama setelah pembubaran PNI, tanggal 18 Mei 1931 berdirilah Partai Indonesia (selanjutnya disebut Partindo) sebagai pengganti PNI dibawah pimpinan Sartono.¹⁹

Ternyata pembubaran PNI tidak disetujui oleh sebagian anggota PNI lainnya. Mereka yang tidak menyetujui pembubaran PNI menyebut dirinya sebagai Golongan Merdeka.²⁰ Golongan merdeka kemudian mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (selanjutnya disebut PNI-baru) sebagai basis pergerakan nasional mereka. Sukarno yang ditahan di penjara Sukamiskin sangat kecewa dengan kenyataan PNI yang didirikannya itu bubar dan pecah menjadi Partindo dan PNI-baru.²¹

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas perpecahan yang terjadi di dalam tubuh PNI. Konflik tersebut menyebabkan pecahnya PNI menjadi Partindo dan PNI-baru. Selanjutnya, penulis ingin meneliti sikap PNI-baru dan Partindo mengenai permasalahan dan peristiwa yang terjadi pada tahun 1931-1934 yaitu pencalonan Muhammad Hatta sebagai anggota *Tweede Kamer*, Ordonansi Sekolah Liar dan yang terakhir pemboikotan Kapal Perang *Zeven Provinciën*. Sejauh penulis ketahui ada beberapa penelitian atau karya mengenai PNI-baru yang sudah pernah ditulis. Pertama Skripsi Fakultas Sastra Universitas Indonesia (selanjutnya di singkat FSUI) yang ditulis oleh Isak Purba tahun 1988 dengan judul *Pendidikan Nasional Indonesia Baru tahun 1931-1934*. Kedua adalah karya yang berjudul *Pendidikan Nasional Indonesia* oleh Mohammad Hatta, diterbitkan kembali oleh Monash

¹⁹ Kartodirdjo *et al.*, *Op. cit.*, hlm 221.

²⁰ Penjelasan mengenai golongan merdeka dapat dilihat di: Ingleson. *op. cit.*, Sub bab 6 Golongan-golongan Merdeka.

²¹ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 221.

University Press sebagai *workingpapers* yang ditransliterasi oleh Mavin S. Rose. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian dan karya di atas adalah terletak pada permasalahan yang ingin diteliti. Dalam skripsi FSUI Isak Purba, hanya menjelaskan PNI-baru dari awal pembentukan, kegiatan-kegiatannya kemudian akhir dari PNI-baru. Sedangkan penelitian penulis fokus pada permasalahan dan kegiatan antara Partindo dan PNI-baru. Dalam tulisan Muhammad Hatta yang berjudul Pendidikan Nasional Indonesia hanya menjelaskan visi misi dari pembentukan PNI-baru. Dalam penelitian ini menjelaskan faktor apa yang menyebabkan perpecahan, dan dampak perpecahan tersebut bagi kedua organisasi dan pergerakan nasional. Oleh karena itu, penulis tetap akan menjelaskan sedikit latar belakang dari PNI-baru.

1.2 Rumusan masalah

Setelah PNI dibubarkan, muncul dua organisasi non-kooperasi dalam pergerakan nasional Indonesia yaitu Partindo dan PNI-baru. Kedua partai ini memiliki cara dan pola perjuangan yang berbeda dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Cara dan pola perjuangan yang berbeda tersebut menimbulkan konflik antara kedua organisasi. Walaupun pola perjuangan kedua organisasi tersebut berbeda, mengenai permasalahan-permasalahan pada masa pergerakan tahun 1930-an, mereka memiliki sikap yang sama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pergerakan PNI-baru dan Partindo di Indonesia selama kurun waktu tahun 1931-1934. Untuk menunjang penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana kondisi sosial dan politik di Hindia Belanda sejak diberlakukannya politik etis hingga terbentuknya PNI?
2. Bagaimana munculnya Partindo dan PNI-baru, dan peran kedua organisasi tersebut bagi pergerakan nasional Indonesia?
3. Mengapa terjadi konflik antara PNI-baru dengan Partindo?
4. Bagaimana sikap dan pandangan dari PNI-baru dan Partindo mengenai topik *Tweede Kamer*, dan Ordonansi Sekolah Liar?

1.3 Lingkup Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini berdasarkan tiga segi yaitu tematis, temporal dan spasial. Dari segi tematis penulis membatasi penelitian ini terbatas pada pertentangan antara Partindo dengan PNI-baru dan sikap PNI-baru dan Partindo terhadap permasalahan *Tweede Kamer*, *Wilden Scholen Ordonantie*, dan *Zeven Provinciën*. Alasan penulis memilih ketiga kasus diatas karena kasus-kasus tersebut adalah kasus yang paling berpengaruh bagi pergerakan kaum non-kooperasi pada masa itu. Permasalahan pencalonan Hatta sebagai calon anggota *Tweede Kamer* memunculkan pertentangan antara PNI-baru dan Partindo. Hatta dituding oleh kaum Partindo telah meninggalkan ideologi non-kooperasinya. Permasalahan mengenai *Wilden Scholen Ordonantie* adalah permasalahan nasional karena diberlakukannya peraturan baru untuk membatasi sekolah-sekolah pribumi di Indonesia. Terakhir pemberontakan *Zeven provinciën* yang pada akhirnya berujung kepada ditangkapnya pimpinan PNI-baru dan Partindo.

Dari segi temporal, penulis akan membatasi penelitian dari tahun 1931 yaitu setelah PNI dibubarkan yang menjadi awal berdirinya Partindo dan PNI-baru. Penulis akan mengakhiri tulisan ini pada tahun 1934 setelah penangkapan Sukarno, M. Hatta dan Sjahrir yang menjadi akhir dari Partindo dan PNI-baru.

Dari segi spasial, penelitian ini hanya mencakup wilayah pulau Jawa yang menjadi pusat pergerakan nasional di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai peran dari Partindo dan PNI-baru pada masa pergerakan nasional dan konflik antara kedua organisasi tersebut. Walaupun sudah ada yang menulis mengenai PNI-baru dari skripsi FSUI 1988, penulis ingin memberikan sudut pandang lain mengenai PNI-baru dan konfliknya dengan Partindo.

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari konflik tersebut bagi kedua organisasi. Serta peran dari kedua organisasi tersebut pada masa pergerakan nasional Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk memperkaya tulisan

sejarah pada masa pergerakan nasional. Terakhir, semoga penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sejarah khususnya dan masyarakat di Indonesia pada umumnya.

1.5 Metode penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah sejarah ini, penulis menggunakan metode sejarah sebagai alat penelitian dimulai dari tahap heuristik yaitu mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Penulis memakai sumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai PNI, PNI-baru dan Partindo. Antara lain sumber didapat dari buku, surat kabar maupun jurnal.

Pada tahap heuristik ini, penulis mencari sumber yang berkaitan dengan pergerakan nasional diawali tahun 1927 yang menandakan dibentuknya PNI sampai terjadinya perpecahan di dalam tubuh PNI. Buku yang digunakan sebagai sumber primer adalah *Memoir* yang ditulis oleh Mohammad Hatta. Selain itu sumber primer lainnya adalah *Daulat Ra'jat* yang sudah dibukukan oleh yayasan Hatta dalam dua jilid tahun 2002. Kemudian surat kabar *Persatoean Indonesia* yang dibentuk PNI. Setelah PNI dibubarkan, *Persatoean Indonesia* menjadi surat kabar dari Partindo. Buku lain yang digunakan sebagai sumber adalah *Jalan ke Pengasingan* yang ditulis oleh John Ingleson. Untuk sumber jurnal, penulis mendapatkan jurnal *Prisma* dengan judul "Siapa Perintis Kemerdekaan" tahun 1988 oleh LP3ES. Dalam jurnal ini terdapat artikel yang penulis gunakan sebagai sumber primer dengan judul "Ejekan, Akibat Propaganda Belanda" yang ditulis oleh Marwoto yang pernah menjabat sebagai sekretaris dari PNI-baru masa pimpinan Sjahrir. Kemudian artikel lain yaitu "Pemberontakan Anak Buah Kapal "Zeven Provincien", yang ditulis oleh Suyatno Kartodirdjo.

Kemudian tahap selanjutnya adalah mengkritik sumber yang telah diperoleh. Kritik intern sangat dibutuhkan dalam penelitian. Setelah mendapatkan sumber, penulis segera mengkritik sumber tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha untuk membandingkan sumber yang ada, sehingga penulis mendapatkan fakta yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai contoh, penulis melakukan kritik mengenai tahun pendirian *Algemeene Studieclub* yang didirikan di Bandung sebagai

klub diskusi pelajar-pelajar pribumi di Bandung. Menurut Dhont, *Algemeene Studieclub* dibentuk tahun 1925.²² Menurut Ingleson, *Algemeene Studieclub* dibentuk tahun 1925.²³ Menurut Kartodirdjo *Algemeene Studieclub* didirikan tahun 1925.²⁴ Sedangkan menurut van Niel *Algemeene Studieclub* dibentuk tahun 1926.²⁵

Tahap berikutnya adalah analisis yang akan dilakukan oleh penulis terhadap data-data yang telah dikritisi. Setelah proses analisis, data yang telah dikritisi dapat dijadikan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari contoh di atas, penulis menganalisa bahwa fakta yang didapat dari data di atas adalah *Algemeene Studieclub* didirikan pada tahun 1925 di Bandung berdasarkan data yang dominan dari Kartodirdjo, Ingleson dan Dhont.

Tahap terakhir adalah proses historiografi dimana fakta dan data yang telah diperoleh dituangkan dalam penulisan sehingga penelitian ini menjadi tulisan yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Sumber penelitian

Penelitian ini secara ilmiah menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapat dari studi kepustakaan dengan mencari surat kabar sejaman, artikel sejaman, karya tulis yang ditulis oleh tokoh-tokoh atau pelaku sejaman di perpustakaan fakultas, perpustakaan universitas dan perpustakaan nasional. Buku *Daulat Ra'jat 1931-1934* yang sudah dibukukan oleh yayasan Hatta dalam dua jilid tahun 2002. Surat kabar *Persatoean Indonesia* sebagai alat politik Partindo.

Sumber sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari buku-buku. Salah satunya *Sjahrir : Politik dan Pengasingan di Indonesia* oleh Rudolf Mrazek. Buku ini dapat menjelaskan sudut pandang Sjahrir sebagai salah satu pendiri dari PNI Baru. *Road to Exile* atau *Jalan ke Pengasingan* yang ditulis John Ingleson memberikan latar belakang pergerakan nasional sejak tahun 1925 sampai 1935. Selanjutnya *Bung*

²² Dohnt. *op. cit.*, hlm. 2.

²³ Ingleson. *Op. cit.*, hlm. 21.

²⁴ Kartodirdjo. *op. cit.*, hlm. 214.

²⁵ Niel. *op. cit.*, hlm. 297.

Karno di hadapan pengadilan kolonial yang ditulis oleh H.A. Notosoetardjo dan *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* ditulis oleh A.K. Pringgodigdo juga sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika penulisan

Penelitian ini berjudul "Peran PNI-Baru masa pergerakan nasional : perseteruan PNI-Baru dengan Partindo tahun 1930 – 1934" terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan penelitian yang memuat latar belakang diantaranya alasan pemilihan judul, tinjauan pustaka. Kemudian perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berjudul kondisi sosial dan politik masa pergerakan nasional. Pada bab ini dijelaskan kondisi politik dan sosial di Hindia Belanda sejak diberlakukannya Politik Etis, kemudian masa radikal dengan munculnya PNI, sampai munculnya benih-benih perpecahan dalam tubuh PNI.

Bab ketiga berjudul Peran PNI-Baru dan Partindo dalam Pergerakan Nasional. Bab ini menjelaskan munculnya PNI-Baru dan Partindo. Kegiatan-kegiatan dan Peran kedua organisasi.

bab keempat berjudul pergerakan PNI-baru dan Partindo dalam *tweede kamer, wilden scholen ordonantie* dan *zeven provincien*. Bab ini menjelaskan pertentangan yang terjadi antara kedua organisasi tersebut. Kemudian menjelaskan sikap PNI-baru dan Partindo terhadap permasalahan dan peristiwa *Tweede Kamer* dan *Wilden Scholen Ordonantie*.

Bab kelima adalah bab terakhir yang akan memberikan kesimpulan sekaligus sebagai penutup dari penelitian ini.

BAB 2

KONDISI SOSIAL DAN POLITIK MASA PERGERAKAN NASIONAL

2.1 Politik Etis: Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia

Pidato tahunan Ratu Wilhelmina di depan parlemen Belanda pada tahun 1901 yang berisi pesan kepada pemerintah kolonial untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pendidikan bagi rakyat Hindia Belanda memberikan arti penting bagi Indonesia. Pidato tersebut menjadi awal dari diberlakukannya Politik Etis di Indonesia. Istilah Politik Etis atau *ethische politiek* berasal dari tulisan Mr. P. Brooshooft (selanjutnya di sebut Brooshooft saja) yang berjudul “*De ethische koers in de koloniale politiek*” atau haluan etis dalam politik kolonial¹. Brooshooft adalah seorang jurnalis dan redaktur dari harian *De Locomotief* di Semarang. Di dalam tulisannya Brooshooft sangat menyetujui ide balas budi kepada rakyat Hindia Belanda. Ia juga menekankan bahwa pemerintah kolonial harus menjunjung tinggi rasa keadilan bagi rakyat Hindia Belanda.² Pernyataan Brooshooft dalam Scholten seperti yang ditulis di bawah ini:

“Apa yang harus mendorong kita untuk menunaikan kewajiban ialah sifat manusia yang terbaik yaitu rasa keadilan, perasaan bahwa kita harus memberikan kepada orang Jawa, yang telah menjadi bergantung pada kita bertentangan dengan kehendaknya sendiri, yang terbaik yang kita miliki baginya, yaitu hasrat mulia orang kuat untuk memperlakukan yang lemah dengan adil.”³

Selain itu menurut Brooshooft, politik etis bukan hanya janji-janji pemerintah kolonial⁴ mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda dengan tujuan menaikkan citra baik pemerintah di depan rakyat Hindia Belanda, tetapi janji tersebut harus direalisasikan dengan nyata, adil dan bijaksana.⁵

¹ Scholten. *op. cit.*, hlm. 47.

² Niel. *op. cit.*, hlm. 57.

³ Scholten. *op. cit.*, hlm. 239.

⁴ Janji-janji pemerintah menurut Brooshooft dalam buku Elsbeth locher-scholten adalah “mengupayakan pelaksanaan gagasan ‘hindia bagi hindia’ (secara keuangan tetapi juga secara politik); mengusahakan perbaikan nasib (ekonomi) orang Indonesia; usaha awal membebaskan pemerintah pribumi dari perwalian; paternalisme yang kuat dan jarak yang jauh terhadap orang Indonesia; tekanan pada pertahanan kekuasaan.” *Ibid.* hlm. 55.

⁵ *Ibid.* hlm. 47 dan 201.

Para pelopor Politik Etis⁶ menganggap untuk mencapai tujuan Politik Etis yaitu mensejahterakan rakyat Hindia Belanda dibutuhkan pendidikan sebagai salah satu syarat yang penting. Snouck Hurgronje⁷ memberikan perhatian penting bagi pendidikan di Hindia Belanda. Menurut Snouck, dengan adanya pendidikan diharapkan terciptanya orang-orang Indonesia yang berpendidikan yang kemudian mampu menjalankan pemerintahan sendiri dan tetap setia di bawah kerajaan Belanda.⁸ J.H. Abendanon⁹ sangat mendukung keinginan Snouck dengan mendirikan tiga *hoofdenscholen* atau sekolah para kepala pada tahun 1900 untuk menghasilkan pegawai pemerintahan. Pada perkembangannya *Hoofdenscholen* berganti nama menjadi OSVIA.¹⁰ Ternyata cita-cita Snouck terkait dengan keinginan pemerintah kolonial untuk meluaskan kekuasaannya di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, J. B. Van Heuts (1904 – 1909) berusaha untuk menyatukan seluruh wilayah di Hindia Belanda dan menjalankan pemerintahan dengan program desentralisasi tahun 1903¹¹ dan menciptakan lembaga-lembaga yang berdiri sendiri di setiap daerah.¹² Untuk menjalankan program desentralisasi di butuhkan orang-orang Indonesia sebagai pegawai pemerintahan yang duduk dalam lembaga atau dewan daerah di bawah pengawasan orang-orang Belanda.¹³ Ternyata dewan daerah dijadikan tempat latihan berpolitik bagi kaum intelektual Indonesia. Sehingga

⁶ Pelopor politik etis beberapa diantaranya P. Brooshooft dengan tulisannya “*De ethische koers in de koloniale politiek*” (haluan etis dalam politik kolonial) tahun 1901, C. Th. Van Deventer dengan tulisannya yang berjudul “*Een Eereschuld*” (utang budi) diterbitkan dalam majalah *De Gids* tahun 1909 dan Snouck Hurgronje. *Ibid.* hlm 45 dan 46.

⁷ Snouck Hurgronje bercita-cita menciptakan elit Indonesia yang berpendidikan barat yang nanti akan menjadi pemimpin Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Ia menjabat sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1891. Niel. *op. cit.*, hlm. 48.

⁸ *Ibid.*

⁹ J.H. abendanon menjabat sebagai Direktur Pendidikan di Hindia Belanda tahun 1900. *Ibid.* hlm. 55.

¹⁰ Rickelfs. *op. cit.*, hlm. 330.

¹¹ Undang-undang desentralisasi mencakup tiga hal yaitu delegasi kekuasaan dari pusat pemerintahan ke pemerintahan Hindia Belanda lalu ke departemen, ke pejabat Belanda dan terakhir ke pejabat pribumi; menciptakan lembaga-lembaga otonom; dan pemisahan keuangan negeri dengan keuangan pribadi. Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 48.

¹² Niel. *op. cit.*, hlm. 64.

¹³ Contohnya dibentuk dewan kota yang memiliki wewenang membuat peraturan tentang pajak dan lain-lain. Kartodirdjo. *et al.*, *op. cit.*, hlm. 48 dan 49.

nantinya muncul kesadaran untuk mendapatkan hak dan kekuasaan yang sama dengan orang-orang Belanda di Hindia Belanda.¹⁴

Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang diberikan pemerintah kolonial sangat dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia. Pada awalnya, hanya kalangan tertentu yang mampu secara finansial untuk melanjutkan sekolah di Negeri Belanda. Hanya kelompok Priayi Jawa¹⁵ yang mampu mengirimkan anaknya untuk melanjutkan sekolah di Belanda dengan tujuan agar mendapatkan kedudukan yang pantas dalam pemerintahan.¹⁶ Namun dalam perkembangannya, sejak tahun 1910-an, jumlah pelajar pribumi yang melanjutkan sekolah di Belanda semakin bertambah berkat bantuan dana kesiswaan.¹⁷ Sudah dijelaskan di dalam bab pendahuluan, bahwa pemerintah kolonial menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, dengan mendirikan banyak sekolah Eropa bagi rakyat pribumi. Namun karena fasilitas sekolah yang tidak lengkap dan tidak mampu memberikan status profesional bagi para pelajar. Sehingga pelajar-pelajar Indonesia memilih untuk melanjutkan studinya di Belanda. Pendidikan menjadi faktor penting munculnya pergerakan nasional modern di Indonesia. Faktor lain yang mendukung adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905.¹⁸ Kemenangan Jepang memberikan keyakinan bagi kaum intelektual Indonesia bahwa kekuatan bangsa Asia dapat mengalahkan kekuatan orang Eropa. Kemudian pergerakan di India yang dipimpin Mahatma Gandhi.¹⁹ Perjuangan Gandhi memberikan rasa senasib dan seperjuangan dengan Indonesia. Semangat itu semakin

¹⁴ Niel. *op. cit.*, hlm. 65.

¹⁵ Priayi adalah aristokrat atau pejabat, anggota elit penguasa Jawa. Heather Sutherland. (1983). *Terbentuknya sebuah elite birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 23.

¹⁶ Niel. *op. cit.*, hlm. 71.

¹⁷ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 137.

¹⁸ Pertempuran ini antara Jepang dan Rusia memperebutkan Port Arthur di Manchuria. Pertermputan terakhir di Selat Tsushima akhirnya dimenangkan oleh Jepang tahun 1905. Kemenangan Jepang atas Rusia memberikan kenyataan penting bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa. Sumber dari: (n.d.). *Kemenangan atas rusia tahun 1905*. 7 April 2011.

<http://spektrumku.wordpress.com/2008/02/08/kemenangan-jepang-atas-rusia-tahun-1905-awal-kebangkitan-asia/>

¹⁹ Gerakan Mahatma Gandhi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar gerakan. Beberapa gerakan tersebut, antara lain; Ahimsa (tanpa kekerasan), Satyagraha (memegang teguh kebenaran), Swadesi (memenuhi kebutuhan sendiri) dan Hartal (mengendalikan napsu). Sumber dari: Administrator. (2009). *Mahatma Gandhi-perjuangan dan pemikirannya*. 7 April 2011. <http://forum.um.ac.id/index.php?topic=19141.0>

memperkuat rasa kebangsaan dan keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Faktor dari dalam negeri adalah diberlakukannya undang-undang desentralisasi di Hindia Belanda dan berdirinya *Volksraad*²⁰ (Dewan Rakyat) yang memberikan kesempatan bagi kaum intelektual Indonesia untuk bergabung dalam pemerintahan.²¹

2.1.1 Aktivitas Mahasiswa Indonesia di Belanda

Sejak tahun ajaran 1924-1925 sampai 1939-1940, rata-rata jumlah mahasiswa Indonesia yang memasuki perguruan-perguruan tinggi di Belanda sebanyak 21-22 orang tiap tahunnya. Pada tahun 1925-1926 tercatat sebagai tahun yang terendah dengan jumlah mahasiswa hanya 11 orang, namun pada tahun 1931-1932 merupakan tahun yang tertinggi dengan jumlah 33 orang. Periode waktu diatas, menggambarkan jumlah keseluruhan mahasiswa Indonesia yang mendapat kesempatan untuk belajar di Belanda sebanyak 344 orang.²²

Di Belanda terdapat 5 perguruan tinggi yang menjadi tujuan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studinya. Sebagian besar mahasiswa Indonesia belajar di Universitas Leiden. Universitas Leiden merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan tertua di Eropa dan pusat pendukung politik etis di Hindia Belanda. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Leiden sekitar 199 orang. Selain itu yang menjadi tujuan mahasiswa Indonesia adalah Universitas Utrecht. Universitas Utrecht dikenal sebagai pusat perumus kebijaksanaan politik kolonial yang konservatif. Jumlah mahasiswa Indonesia yang pernah belajar di Utrecht sekitar 34 orang.²³ Terlihat perbandingan yang menonjol antara kedua data di atas. Ternyata jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Leiden lebih besar daripada di Universitas Utrecht. Alasannya, Universitas Leiden mendukung pembaharuan di

²⁰ *Volksraad* atau dewan rakyat dibentuk oleh pemerintah kolonial pada 18 Mei 1918 sebagai perwakilan dari organisasi-organisasi pribumi Hindia Belanda. *Volksraad* hanya mempunyai hak untuk memberikan nasihat atau saran kepada pemerintah kolonial. Namun tidak berhak memberi keputusan. *Volksraad* sangat berguna bagi organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Berbeda dengan anggapan organisasi non-kooperasi. Sutherland. *op. cit.*, hlm. 126.

²¹ Pringgodigdo. *op. cit.*, hlm. ix.

²² Kartodirdjo. *op. cit.*, hlm. 138.

²³ *Ibid.*

Hindia Belanda. Berbeda dengan Universitas Utrecht yang mendukung politik konservatif dan menganggap pelaksanaan politik etis dan program desentralisasi di Hindia Belanda akan berakibat buruk bagi pemerintah kolonial kedepannya.²⁴

Salah satu dari sekian banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Leiden adalah Sartono. Sedikit latar belakang dari Sartono. Sartono putra dari Raden Mas Martodikarjo. Ia memulai pendidikannya bersekolah di *Europeesche Lagere School* (ELS) di Surakarta tahun 1906. Setelah lulus dari ELS, tahun 1913 Sartono melanjutkan sekolah *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO). Kemudian Sartono melanjutkan studinya di *Recht School* di Jakarta tahun 1916 dan mendapatkan gelar sarjana muda. Sartono sebagai salah satu lulusan terbaik dari *Recht Hogeschool* melanjutkan studinya ke Belanda pada tahun 1922. Ia melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Leiden untuk meraih gelar *Meester In De Rechten*. Di Leiden, Sartono bertemu dengan mahasiswa Indonesia lainnya. Rasa solidaritas pun timbul di kalangan mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Belanda. Di Belanda, mereka mendapatkan kehidupan dan perlakuan yang baik dari orang-orang Belanda. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan kehidupan yang mereka alami di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda kesenjangan antara orang pribumi dengan orang Eropa sangat kental. Perlakuan orang Eropa terhadap orang pribumi yang dianggap sebagai kaum kelas rendah. Perasaan seperti itu yang kemudian penggerak bagi mahasiswa Indonesia di Belanda untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Di Belanda, Sartono bergabung dengan PI dan sempat menjabat sebagai sekretaris PI masa pimpinan Sukiman tahun 1925-1926.²⁵

Setelah Sartono menyelesaikan studinya di Leiden dan mendapatkan gelar Mr. Sartono, Sartono kembali ke Indonesia. Sartono beserta teman-teman seperjuangannya di Leiden dan PI yaitu Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr. Budhyarto, dan Mr. Sunario meneruskan perjuangan PI dengan mendirikan kantor pengacara non-kooperasi di Bandung. Di Bandung mereka bertemu dengan tokoh pergerakan

²⁴ Pertentangan antara Universitas Leiden (aliran Leiden) dengan Universitas Utrecht (aliran Utrecht) dapat dilihat selengkapnya di: Scholten. *op. cit.*, hlm. 258-360.

²⁵ Nyak Wali A.T. (1985). *Mr. Sartono: Karya dan pengabdianya*. Jakarta: Depdikbud. hlm. 7, 23 dan 27.

lainnya yaitu Cipto Mangunkusumo, Ir. Sukarno, dan Ir. Anwari. Kemudian mereka membentuk *Algemeene Studieclub* atau Kelompok Studi Bandung pada 22 November 1925 yang dalam perkembangannya *Algemeene Studieclub* berubah menjadi PNI.²⁶

Pelajar-pelajar di Indonesia tidak hanya meneruskan studinya ke Universitas Leiden dan Universitas Utrecht, ada tiga sekolah tinggi lain di Belanda yang menjadi tempat mereka untuk menimba ilmu. Pertama, Sekolah Tinggi Teknik di Delft berjumlah 25 orang. Kedua, Sekolah Tinggi Pertanian di Wageningen berjumlah 23 orang. Dan yang terakhir, Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam berjumlah 13 orang. Salah satu mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ekonomi Rotterdam adalah Muhammad Hatta (selanjutnya disebut Hatta).²⁷

Setelah Hatta menyelesaikan sekolahnya di HBS Batavia, Hatta melanjutkan studinya di *Rotterdam Handelhogeschool* tahun 1921. Hatta merasa ideologi yang berkembang pada mahasiswa Indonesia pada masa itu condong ke arah marxisme²⁸. Pendapat Hatta ini berkaitan dengan kondisi di Hindia Belanda yaitu rendahnya upah pekerja orang pribumi dibandingkan dengan upah pekerja orang Eropa. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan rasial antara orang pribumi dengan orang Eropa. Tahun berikutnya, Hatta bergabung dengan *Indonesische Vereeniging*. Menurut Hatta, *Indonesische Vereeniging* memberikan peranan penting bagi mahasiswa Indonesia di Belanda dalam mengimbangi pengaruh kelompok pro politik kolonial konservatif dan menjaga realitas situasi bahwa tanah air mereka di jajah oleh Belanda.²⁹

Selanjutnya *Indonesische Vereeniging* menjadi organisasi politik PI pada Februari 1925. Setelah itu, Hatta bersama Nazir Pamuncak, Abdulmajid Joyodiningrat dan Ali Sastroamijoyo menerbitkan *Gedenkboek* yang berisi sikap non-kooperasi terhadap pemerintah kolonial dan mengganti nama kesatuan *Hindia Timur Belanda* menjadi Indonesia. Kemudian tulisan Hatta yang berjudul “Indonesia di

²⁶ Ingleson. *op. cit.*, hlm. 21. *Algemeene Studieclub* dan PNI akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 2 sub bagian 2.

²⁷ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 138.

²⁸ Marxisme adalah paham yang dikembangkan oleh Karl Marx. Karl Marx berpendapat untuk mencapai masyarakat yang adil sama rata diperlukan gerakan massa yang ditindas secara ekonomi. Rose. *op. cit.*, hlm. 32.

²⁹ *Ibid.* hlm. 33-35.

Tengah Revolusi Asia” dan “Indonesia di Masyarakat Dunia” menimbulkan keresahan bagi pemerintah kolonial.³⁰

2.2 Pergerakan Nasional Indonesia Masa Radikal Tahun 1920-an

2.2.1 Perhimpunan Indonesia

Dari tahun ke tahun, semakin banyak pelajar Indonesia yang belajar ke negeri Belanda. Mereka kemudian mendirikan *Indische Vereeniging* sebagai tempat berkumpul peajar-pelajar Indonesia di Belanda. Pada awalnya, *Indische Vereeniging* bersifat organisasi sosial. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut, “untuk kontak sosial mereka membentuk Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia) tahun 1908 – sebuah perkumpulan kebudayaan, akan tetapi juga merupakan suatu pentas tempat menyebarkan ide-ide baru.”³¹ Dalam perkembangannya timbul kesadaran dari pimpinan *Indische Vereeniging* untuk menentukan nasib sendiri dan memperjuangkan hak bangsa Indonesia dari pemerintah kolonial.³² Pada tahun 1922, masa jabatan Hermen Kartawisastra, *Indische Vereeniging* berubah namanya menjadi *Indonesische Vereeniging*.³³

Indische Vereeniging yang sebelumnya bersifat organisasi sosial, kemudian berkembang menjadi lebih radikal dan berubah menjadi organisasi politik yang bernama Perhimpunan Indonesia (selanjutnya disebut PI) pada bulan Pebruari 1925 di Belanda. PI memiliki 3 tujuan yaitu pertama, menurut PI mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda harus semakin merasa sebagai orang Indonesia sehingga timbul perasaan senasib dan seperjuangan. Kedua PI harus meyakinkan rakyat Indonesia untuk menghapus anggapan bahwa pemerintah kolonial peduli dengan Indonesia. Segala kemajuan ekonomi dan sosial dan sikap murah hati yang ditunjukkan pemerintah kolonial hanya tindakan politik semata untuk memperkuat

³⁰ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 202.

³¹ *Ibid.* hlm. 74.

³² Kesadaran tersebut dirasakan oleh pelajar pribumi di Belanda yang mendapatkan pengalaman sederajat dengan bangsa Eropa baik di depan hukum maupun dalam masyarakat. Ingleson. *op. cit.*, hlm. 2.

³³ Mohammad Hatta. (1979). *Memoir*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia. hlm. 124.

kedaulatannya di Indonesia. Oleh karena itu, rakyat harus bersatu dengan perjuangan PI. Ketiga adalah PI harus mengembangkan sebuah ideologi yang kuat dan bebas dari pembatasan Islam dan komunisme. Hal tersebut terkait dengan perkembangan SI dan PKI di Hindia Belanda.³⁴

PI kemudian mengemukakan ideologi-ideologinya sebagai dasar dan azas pergerakannya. Ideologi dari PI adalah kesatuan nasional dengan mengesampingkan segala perbedaan berdasarkan suku dan agama, kemudian segera membentuk kesatuan aksi melawan pemerintah kolonial, menuju Indonesia yang merdeka dan terbebas dari penjajahan Belanda. Untuk menumbuhkan semangat solidaritas, PI menanamkan perbedaan antara nasib kaum pribumi yang di injak-injak oleh kaum kulit putih. Oleh karena itu, kaum kulit putih adalah musuh bersama rakyat Indonesia. Kemudian keharusan untuk menyadari bahwa kemerdekaan tidak akan diberikan oleh Pemerintah Belanda. Oleh karena itu kemerdekaan harus dicapai dengan mengandalkan kekuatan sendiri (swadaya). Maka menurut PI tidak ada gunanya bergabung dengan *Volksraad* dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial (non-kooperasi).³⁵

PI mulai melakukan aktivitas politiknya yang paling penting yaitu menyebarkan propagandanya di Indonesia. PI mengandalkan anggota-anggotanya yang sudah menyelesaikan studinya di Belanda dan kembali ke Hindia Belanda. PI menugaskan anggota-anggotanya yang berada di Hindia Belanda untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di Hindia Belanda antara lain Budi Utomo, SI dan PKI. Tugas yang diberikan kepada mereka adalah merebut pengaruh yang ada di antara mereka agar mau menerima gagasan-gagasan PI. Dalam perkembangannya gagasan-gagasan PI digunakan oleh PNI sebagai dasar perjuangan PNI di Hindia Belanda.³⁶

³⁴ Ingleson. *op. cit.*, hlm. 3 dan 4.

³⁵ *Ibid.* hlm. 5 dan 6.

³⁶ *Ibid.* hlm. 14 dan 15.

2.2.2 Partai Komunis Indonesia

Paham komunisme³⁷ berkembang di Indonesia sejak kedatangan Sneevliet³⁸ di Surabaya. Sneevliet tidak lama di Surabaya dan akhirnya pindah ke Semarang karena di sana telah berkembang serikat buruh tertua di Indonesia yaitu *Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP) atau serikat buruh trem dan kereta api.³⁹ Setelah Sneevliet bergabung dengan VSTP, VSTP menjadi lebih radikal. Kemudian Sneevliet mendirikan *Indische Sociaal-Democratische Vereniging* (ISDV) di Semarang pada tahun 1914 dan menyusup ke dalam Sarikat Islam⁴⁰ (selanjutnya disebut SI). Sneevliet bertemu dengan Darsono dan Semaun⁴¹ (pimpinan SI cabang Semarang) dan berkat bantuan mereka, dalam waktu singkat ISDV mempengaruhi sebagian anggota Sarikat Islam menjadi lebih radikal.⁴²

ISDV kemudian berubah menjadi Partai Komunis Hindia dengan Semaun sebagai ketua, Darsono sebagai wakil ketua pada Mei 1920.⁴³ Selanjutnya Partai Komunis Hindia mengadakan kongres istimewa tanggal 24 Desember 1920 dengan keputusan mengubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Keputusan lainnya adalah PKI bergabung dengan Komunis Internasional (selanjutnya disebut komintern).⁴⁴ Sementara itu, keadaan SI menjadi kacau setelah masuknya unsur komunis dalam tubuh SI. Perbedaan tujuan dan taktik perjuangan antara golongan komunis dan golongan Islam dalam tubuh SI menyebabkan SI pecah menjadi dua,

³⁷ Komunisme adalah ideologi perjuangan kelas, kaum buruh atau kaum proletar. Komunisme di Indonesia lebih kepada perjuangan melawan perbedaan ras. Ingleson. *op. cit.*, hlm. 18.

³⁸ Sneevliet dengan nama lengkap H.J.F.M. Sneevliet adalah anggota *Sociaal Democratische Arbeiderspartij* (SDAP) atau Partai Buruh Sosial-Demokrat. Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 203.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sarikat Islam (SI) adalah organisasi yang didirikan oleh H.O.S. Tjokroaminoto tahun 1912. SI dibentuk dari organisasi sebelumnya yaitu Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1909 oleh Tiroadisurjo. SI awalnya dibentuk sebagai tempat bagi para pedagang Islam untuk bersatu. Tidak lebih hanya sebagai organisasi ekonomi. Namun pada perkembangannya, SI menjadi lebih radikal dengan melakukan perlawanan terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pedagang Cina dan Eropa. Ricklefs. *op. cit.*, hlm. 345 dan 346.

⁴¹ Semaun adalah seorang agen komintern dan bekas anggota PI. Ingleson. *op. cit.*, hlm. 28.

⁴² Beberapa alasan yang menyebabkan ISDV dapat berkembang cepat dalam tubuh SI diantaranya tiap-tiap cabang SI dapat bertindak sendiri secara bebas karena lemahnya pengawasan SI pusat ke SI cabang. Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 204.

⁴³ *Ibid.* hlm. 207.

⁴⁴ Komintern didirikan pada tahun 1919 di Moskow, Rusia. Konsekuensi bergabungnya PKI dengan komintern adalah menjalankan politik “front kesatuan” yang berarti PKI harus masuk ke dalam *Volksraad*. *Ibid.* hlm. 208.

yaitu SI putih dan SI merah.⁴⁵ Pada April 1924, PKI mengubah SI merah menjadi Sarekat Rakyat dan pada Desember 1924 SI merah melebur dengan PKI dan menjadikan PKI sebagai organisasi massa terbesar di Hindia Belanda.⁴⁶

Setelah mendapatkan massa yang besar, PKI merencanakan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. rencana pemberontakan ini ditentang oleh beberapa tokoh komunis lainnya.⁴⁷ Akhirnya pada 12 November 1926, PKI melakukan pemberontakan di Batavia, Banten, dan Priangan.⁴⁸ Setelah itu pemberontakan dilanjutkan di Sumatera Barat pada 1 Januari 1927. Pemberontakan yang dilakukan PKI dengan mudah ditumpas pemerintah kolonial. seluruh pemberontakan di Jawa ditumpas dalam waktu 1 minggu. Pemberontakan di Sumatera Barat dapat ditumpas hanya dalam waktu 3 hari.⁴⁹ Sekitar 13.000 orang ditangkap, 4500 orang dijebloskan ke penjara, 1308 orang dikirim ke *Boven Digoel*.⁵⁰

Pemberontakan PKI tahun 1926 mengakhiri kekuasaan komunis dalam pergerakan nasional Indonesia. Pemberontakan tersebut mengakibatkan pemerintah kolonial tidak akan bersikap toleran terhadap pergerakan radikal yang mengganggu stabilitas di Hindia Belanda.⁵¹ Pemberontakan PKI memberikan pelajaran penting bagi pergerakan nasional sesudahnya yaitu, pemberontakan dengan menggunakan kekerasan dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan Belanda yang sudah masif di Hindia Belanda. Pemberontakan yang dilakukan PKI memberikan pelajaran bahwa pergerakan nasional harus dengan organisasi yang disiplin dan terorganisir.⁵² Dan

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 207-209.

⁴⁶ Diperkirakan anggota PKI setelah berfusi dengan Sarekat Rakyat berkisar lebih dari 30.000 orang. Niel. *op. cit.*, hlm. 278.

⁴⁷ Tokoh yang menentang pemberontakan adalah Semaun dan Tan Malaka. Semaun dan Tan Malaka adalah pimpinan dari PKI yang pada saat itu telah diasingkan oleh pemerintah. Menurut mereka, pemberontakan tersebut tidak akan berhasil karena sebenarnya massa belum siap. Ketidaksiapan ini disebabkan peristiwa pada tahun 1925 ketika PKI melakukan pemogokan besar-besaran terhadap pemerintah. Pemogokan itu menyebabkan pemimpin PKI lainnya di tangkap. Ricklefs. *op. cit.*, hlm. 371.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Kartodirdjo. *op. cit.*, hlm. 213.

⁵⁰ *Boven Digoel* atau (Tanah Tinggi Digoel) adalah kamp pengasingan massal yang didirikan pemerintah kolonial pada tanggal 18 November 1926. Takashi Shiraishi. (2001). *Hantu digoel: Politik pengamanan politik zaman kolonial*. Yogyakarta: LKIS. hlm. 3.

⁵¹ Ricklefs. *op. cit.*, hlm. 372.

⁵² Ingleson. *op. cit.*, hlm. 31.

yang paling penting, tersingkirnya PKI menimbulkan kekosongan dalam pergerakan nasional sehingga memberikan kesempatan bagi organisasi sesudah itu yaitu PNI.⁵³

2.2.3 Partai Nasional Indonesia

Algemeene Studieclub dibentuk pada tanggal 29 November 1925 di Bandung. Inisiatif pembentukan *Algemeene Studieclub* berasal dari Katmira Karnadijaya, Sajudin dan Suryoprototo. Pimpinan utama dari *Algemeene Studieclub* adalah Sukarno, Soenario, Anwari dan Iskaq Tjokrohadisoerjo (selanjutnya di sebut Iskaq saja). Iskaq yang mejadi ketua dari *Algemeene Studieclub*. Namun oleh pihak Belanda, Sukarno dianggap sebagai pemimpin *Algemeene Studieclub*. Untuk mendukung kegiatan dari *Algemeene Studieclub*, ia kemudian menerbitkan surat kabar *Indonesia Moeda* pada Oktober 1926⁵⁴ sebagai media diskusi bagi anggota-anggota *studieclub* untuk tetap semangat dan terus berpikir kreatif dalam perjuangan.⁵⁵

“Sukarno menyatakan bahwa tujuan dari dibentuknya *Algemeene Studieclub* adalah meneliti topik-topik teoritis mengenai Indonesia dan topik internasional, guna mencapai suatu partai politik yang bisa menerapkan ide tersebut.”⁵⁶ Pernyataan Sukarno diatas menjelaskan bahwa perlunya berpikir kritis dan segera membentuk sebuah partai atau wadah yang lebih besar dari *studieclub* untuk berjuang. Pernyataan tersebut terkait dengan kondisi Hindia Belanda pada masa itu setelah PKI gagal dalam pemberontakannya terhadap pemerintah kolonial.

Hatta juga mengemukakan pendapat yang sama. Dalam percakapan Hatta dengan Semaun,⁵⁷ Hatta menyatakan saatnya PI mengambil alih pimpinan dari pergerakan nasional yang ada di Indonesia. PI akan mendirikan partai nasional baru

⁵³ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 66.

⁵⁴ Ingleson. *op. cit.*, hlm. 24.

⁵⁵ Dhont. *op. cit.*, hlm. 44 dan 45.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 45.

⁵⁷ Pembicaraan Hatta dengan Semaun pada Desember 1926 menghasilkan suatu konvensi sebagai dasar mendirikan partai nasional baru di Hindia Belanda. Konvensi tersebut terdiri dari 4 pasal yaitu: PI yang akan berkembang menjadi partai rakyat nasional Indonesia berjanji dalam setiap tindakannya mementingkan kepentingan rakyat Indonesia. Meliputi pendidikan rakyat, kesehatan rakyat; PKI harus mengakui kepemimpinan PI dan memberikan kepercayaan sepenuhnya dalam menjalankan pasal 1; semua percetakan yang dimiliki PKI harus diserahkan kepada PI dengan persyaratan yang akan ditentukan nanti. PI berjanji menjalankan politik menuju kemerdekaan Indonesia; konvensi dibuat dalam 6 lembar dengan masing-masing pihak memegang 3 lembar. Hatta. *op. cit.*, hlm. 206 dan 207.

di Indonesia yang tidak terlalu radikal seperti di Belanda namun tetap bersikap non-koperasi dengan pemerintah kolonial.⁵⁸ Sebelumnya, Hatta juga mengusulkan kepada PI untuk membentuk *Indonesische Nationalistische Volkpartij* (Partai Rakyat Nasionalis Indonesia). Namun *Indonesische Nationalistische Volkpartij* memiliki program-program⁵⁹ yang kurang radikal karena bertujuan hanya untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar tanpa menimbulkan kecurigaan pemerintah kolonial.⁶⁰

Keinginan Sukarno untuk mendirikan sebuah partai akhirnya terwujud. Pada bulan April 1927 di Bandung diadakan pertemuan para pimpinan *Algemeene Studieclub* yang terdiri dari Iskaq, Sunario, Budhyarto, dr. Tjipto Mangunkusumo, J.Tilaar, Sujadi, Sartono dan Anwari untuk membicarakan pembentukan partai politik. *Algemeene Studieclub* memang tidak berumur panjang, pada tanggal 4 Juli 1927 mereka mengadakan rapat dan memutuskan pembentukan *Perserikatan Nasional Indonesia* (PNI). Pembentukan partai tidak disetujui oleh dr. Tjipto. Menurut dr. Tjipto sangat riskan karena PKI baru saja ditindas pemerintah kolonial.⁶¹

Azas *self-help* dan non-koperasi dari PNI adalah propagandanya dengan membentuk negara sendiri dalam pemerintahan Hindia Belanda. Keinginan tersebut direalisasikan dengan pembentukan departemen-departemen sendiri di dalam PNI. Contoh PNI mendirikan Departemen Kehakiman yang bertindak sebagai penengah bagi perselisihan antar sesama bangsa Indonesia sebagai pengganti dari pengadilan kolonial. Keinginan untuk membentuk negara sendiri dalam pemerintahan kolonial tampak pada hasil dari kongres pertama PNI tanggal 27-30 Maret 1928 di Surabaya yaitu: ” ... yaitu perlunya PNI menyusun suatu pemerintahan yang paralel dengan pemerintah kolonial Belanda – yaitu konsep negara dalam negara.”⁶² Pada kongres tersebut, keputusan lainnya adalah mengganti “perserikatan” menjadi “partai”. Pergantian nama ini berarti meningkatnya PNI menjadi suatu organisasi yang lebih tersusun, PNI menjadi partai politik yang harus mempunyai program politik, ekonomi

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Lihat: Ingleson. *op. cit.*, hlm. 26 dan 27.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 214 dan 215.

⁶² Ingleson. *op. cit.*, hlm. 83.

dan sosial yang tertentu dan berhati-hati dalam menerima anggota. Hal tersebut menunjukkan bahwa PNI menjadi lebih radikal.⁶³

Dalam kongres pertama, PNI juga menyebutkan rancangan usahanya, yaitu memperkuat rasa kebangsaan dan kesadaran persatuan bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan dan memperkokoh hubungan dengan bangsa-bangsa di Asia. Usaha lainnya adalah menghapuskan segala rintangan yang berkaitan dengan kemerdekaan diri (hak-hak luar biasa Gubernur Jendral untuk mengasingkan dan pembatasan perjalanan) dan rintangan bagi kehidupan politik (berserikat dan berkumpul, penyiaran bercetak, dan mengeluarkan pendapat).⁶⁴ Hal tersebut seperti disebutkan pada kutipan berikut ini:

“Dengan adanya hak-hak luar biasa di tanah air kita ini, maka senantiasa terancam lah kemerdekaan diri kita, dengan adanya hak-hak luar biasa itu, maka bagi Rakyat Indonesia tdaik adalah kepastian dan ketentuan untuk bergerak merdeka, dan tidak adalah ketentuan tanggungan pemerintah akan tidak sewenang-wenang menghalang-halangi kemerdekaan diri kita, menyempitkan lapangan untuk bergerak merdeka.”⁶⁵

PNI menjadi organisasi nasional terkuat di Indonesia pada masa itu dan berkat dukungan dari Sarekat Islam sehingga mampu membentuk suatu perhimpunan untuk semua organisasi nasional yang ada di Indonesia yaitu Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut PPPKI).⁶⁶ PPPKI didirikan pada tanggal 17 Desember 1927. badan ini ialah federasi dari PNI, PSI, BU, Pasundan, Kaum Betawi, Sumatranenbond dan *studieclub-studieclub*. PPPKI memberi harapan baik bagi tujuan PNI, memberi kesempatan kepada PNI untuk mempropagandakan asas-asasnya sendiri kepada organisasi-organisasi nasional lainnya.⁶⁷

⁶³ Sitorus. *op. cit.*, hlm. 50.

⁶⁴ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 69.

⁶⁵ Potongan pidato Mr. Iskaq dalam pembukaan kongres pertama PNI. Lihat: Drs. R. Nalenan. (1982). *Iskaq Tjokrohadisurjo: Alumni desa bersemangat banteng*. Jakarta: Gunung Agung. hlm. 25.

⁶⁶ Ingleson. *op. cit.*, hlm.132.

⁶⁷ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 72.

BAB 3

PECAHNYA PNI: TERBENTUKNYA PARTINDO DAN PNI BARU

3.1 Pengadilan Pimpinan-pimpinan PNI

Pergerakan PNI dari awal pembentukannya menunjukkan sikap yang radikal terhadap pemerintah kolonial. Semangat yang dikobarkan Sukarno melalui PNI dengan meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa bertanah Air Indonesia harus berkeyakinan dan berjuang untuk secepatnya memerdekakan Indonesia dengan tenaga sendiri (*self help*), bersatu, dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah (non kooperasi). Sukarno menambahkan setiap kebijakan dan peraturan dari pemerintah kolonial tidak masuk akal, seluruh peraturan yang dibentuk hanya untuk kepentingan Belanda. Dari sistem pendidikan, Sukarno mengatakan sistem pendidikan yang dibentuk bagi orang Indonesia tujuannya hanya untuk mendapatkan buruh bayaran. Sukarno sangat menginginkan semua suku dan daerah yang ada di Indonesia menjadi satu bangsa yang kuat. Ia menjunjung tinggi demokrasi dengan tidak memihak agama manapun.¹

Semangat Sukarno terlihat jelas pada kongres pertama PNI tanggal 27 – 30 Mei 1928 di Surabaya, Sukarno mengatakan lebih lanjut mengenai tujuan partai. Sukarno mengatakan tujuan perjuangan PNI adalah merebut kemerdekaan politik dengan cara mengakhiri penjajahan Belanda, baru kemudian kita dapat membangun Negara Nasional. Menurut Sukarno, kemerdekaan tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Ia menambahkan, oleh karena itu PNI harus mampu membangun semangat nasional (*nationalen geest*), menggugah kemauan nasional (*nationalen wil*) yang akhirnya akan melahirkan (*nationale daad*).²

Selanjutnya, sesuai putusan kongres pertama PNI, pada tanggal 15 juli 1928 PNI menerbitkan majalah *Persatoean Indonesia*. *Persatoean Indonesia* dipimpin

¹ Pernyataan tersebut adalah *protest vergadering* Sukarno terhadap pembesar-pembesar Belanda. Lihat: H.A. Notoesoetardjo. (1963). *Bung Karno dihadapan pengadilan kolonial*. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia. hlm. xli.

² *Ibid*.

langsung Sukarno, Sunario, dan Sartono. Pada nomor pertamanya, *Persatoean Indonesia* memuat propaganda PNI tentang kebangsaan Indonesia.³

Kekuatan PNI dan Sukarno semakin besar sehingga menimbulkan kegelisahan bagi pemerintah kolonial. Dalam pidato pembukaan *Volksraad* tanggal 15 Mei 1928, Gubernur Jendral De Graeff mengatakan perlu memberikan peringatan kepada pimpinan PNI agar menahan diri dalam ucapan dan propaganda-propagandanya.⁴ De Graeff mengharapkan kesadaran rakyat agar tidak mengikuti gerakan nasionalis yang radikal. Ia juga berpendapat, sikap non-kooperasi yang dilakukan PNI adalah sikap yang bermusuhan terhadap pemerintah.⁵ selain itu, dalam pidatonya, De Graeff juga menginginkan peranan pemerintah Belanda di Indonesia seperti ini, yaitu:

”Hanya dengan melalui damai dan ketertiban, pemerintah dapat menjamin kepemimpinan Belanda, yang akan tetap diperlukan hingga ke masa depan yang tak terjangkau dan menjalankan tugas luhur menyebarkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kepemimpinan sosial, ekonomi dan politik sampai ke suatu tingkat di mana kepemimpinan Belanda dapat ditarik kembali”.⁶

Untuk mencapai keinginan tersebut, Ia juga menambahkan untuk kegiatan apapun yang dapat membahayakan keamanan umum adalah tindakan permusuhan terhadap pemerintah kolonial.⁷

Kekhawatiran terhadap pergerakan PNI dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalamnya yang radikal juga diperlihatkan oleh Van der Plas⁸. Hal tersebut terlihat dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal De Graeff tentang netralisasi dan pencegahan propaganda revolusioner. Dalam laporannya, Van der Plas menyatakan para pemimpin PNI yaitu Sartono, Sunaryo dan Iskaq yang mengalami pendidikan barat ternyata jauh dari rakyat. Berbeda dengan Sukarno yang berlatar belakang dari kalangan aristokrat Jawa. Plas juga memandang terdapat perbedaan antara pidato Sartono, Sunaryo dan Iskaq dengan tokoh-tokoh PKI yang dekat dengan rakyat. Keadaan tersebut menurut Plas adalah titik kelemahan PNI.

³ *Ibid.*

⁴ John ingleson. *op. cit.*, hlm. 82.

⁵ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 218.

⁶ John ingleson. *op. cit.*, hlm. 82.

⁷ Notosoetardjo, *op.cit.*, hlm. xlii.

⁸ Van der Plas adalah wakil dari sayap liberal dalam pemerintahan dan dekat dengan De Graeff. Ingleson, *op cit.*, hlm. 88.

Namun Plas melihat PNI bisa menjadi sangat berbahaya jika PNI membentuk kader-kader karena banyak pemimpin PNI yang terpelajar.

“Dan yang terakhir dan terpenting ialah bahwa mereka mempunyai pengaruh yang demikian besar di kalangan pemuda mahasiswa yang berarti ada bahaya bahwa sejumlah besar kelompok intelektual di masa depan akan beradadi pihak kaum nasionalis yang tanpa kompromi.”⁹

Selain kritik De Graeff dan pernyataan Van der Plas terhadap pergerakan PNI, perlawanan terhadap PNI juga dilakukan oleh kelompok pro politik kolonial konservatif Belanda atau kaum reaksioner Belanda yang kemudian mendirikan *Vaderlandsche Club*¹⁰ (VC) tahun 1929. VC mendesak pemerintah kolonial agar mengambil tindakan tegas terhadap PNI.¹¹ Namun kehadiran VC menurut Sukarno adalah sekelompok pengkhianat yang terdiri dari orang Belanda maupun orang Indonesia yang pro terhadap Belanda. Sukarno memberikan tanggapan seperti berikut:

“kita tidak putus asa menghadapi hal2 yang demikian., semangat banteng harus kita tunjukkan, djanganlah kita tidur dan tutup menutup mata kita sebelum kita sembahjang dan mendo’a semoga tuhan segera menurunkan penjakit pest terhadap binatang2 „tjoroo” itu.”¹²

Ternyata, teguran yang diberikan Gubernur Jenderal De Graeff dalam pidatonya di *Volksraad* terhadap PNI tidak digubris oleh pimpinan PNI. Kenyataan tersebut membuat pemerintah kolonial merasa perlu memberikan peringatan kedua pada 9 Juli 1929.¹³ Peringatan terakhir diberikan kepada PNI pada tanggal 6 Agustus 1929.¹⁴

Kemudian tersebar desas-desus di kalangan rakyat bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada tahun 1930. Karena desakan kaum reaksioner Belanda dan pemerintah Belanda yang sudah semakin khawatir terhadap pergerakan PNI, maka pemerintah kolonial melakukan persiapan-persiapan dan melakukan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Vaderlandsche Club* (VC) didirikan oleh Zeentgraaff, wartawan asal Belanda yang mendirikan *Soerabaiasch Handelsblad*. VC didirikan sebagai protes terhadap *etische beleid* atau etika kebijaksanaan Gubernur Jenderal De Graeff. Zeentgraaff berpendapat bahwa kepemimpinan nasional Belanda adalah alat untuk menghadapi tuntutan-tuntutan gila dari nasionalisme timur. Lihat: Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 222.

¹¹ *Ibid.* hlm 219.

¹² Notosoetardjo. *op. cit.*, hlm. xlv.

¹³ Ingleson. *op. cit.*, hlm. 82.

¹⁴ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 220.

penangkapan-penangkapan dan penggeledahan dimana-mana. Pada tanggal 29 Desember 1929 Ir. Sukarno ditangkap oleh polisi di Yogyakarta dan selanjutnya di bawa ke Bandung. Selain itu, penangkapan dan penggeledahan di dilakukan 50 tempat di Jakarta, di Bandung 41, di Cirebon 24, di Pekalongan 42, di Sukabumi dan Cianjur 31, di Surakarta 11, di Medan 25, di Ujung Pandang 18, di Padang 2, di Semarang 30.¹⁵ Totalnya sekitar 789 tempat penggeledahan yaitu 400 tempat di Jawa, 50 di Sumatera, 28 di Sulawesi beberapanya di Kalimantan. Penangkapan dilakukan pada 37 tempat, yaitu 27 di Jawa, 8 di Sumatera, 1 di Sulawesi dan 1 lagi di Kalimantan. Penangkapan seluruhnya berjumlah 180 pimpinan PNI.¹⁶

Selain Sukarno (ketua PNI), 4 pimpinan PNI lainnya yang ditangkap yaitu Iskaq Tjokrohadisurjo, Gatot Mangkupradja (sekretaris II Pengurus Besar PNI), Maskun Soemadireja (Sekertaris II pengurus PNI cabang Bandung) dan Supriadinata (anggota PNI cabang Bandung). Selain Iskaq, 4 pimpinan PNI tersebut ditangkap pada tanggal 29 Desember 1929 di Jogjakarta setelah menghadiri kongres PPPKI di Solo. Mereka selanjutnya di bawa ke Bandung.¹⁷ Iskaq ditahan di penjara *Struiswijk*, Jakarta pada tanggal 18 Januari 1930. Namun setelah itu ia dibebaskan oleh pemerintah. Walaupun sudah dibebaskan, pemerintah menetapkan hak gubernur jenderal yaitu *Exorbitante Rechten*¹⁸ terhadap Iskaq. Ia dilarang untuk tetap tinggal di Bandung (*verbanning*).¹⁹

Keempat tokoh PNI yaitu, Sukarno, Gatot, Maskoen, dan Supriadinata di sidang di Pengadilan Bandung pada tanggal 18 Agustus 1930 sampai dengan 29 September 1930. Mereka di sidang dengan tuduhan melakukan tindak pidana dengan pasal 153 bis, dan pasal 169 dari Kitab Undang-Undang Hukun Pidana.²⁰ Selain itu

¹⁵ *Ibid.* hlm. 220-221.

¹⁶ Nalenan, *op. cit.*, hlm. 48.

¹⁷ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 220 dan 221.

¹⁸ *Exorbitante Rechten* adalah hak gubernur jenderal untuk mengambil tindakan terhadap pimpinan politik yang dinilai berbahaya dengan cara, yaitu: tidak boleh tinggal di wilayah Indonesia (*externing*); tidak boleh tinggal di daerah tertentu dalam wilayah Indonesia (*verbanning*); menunjuk suatu daerah tertentu untuk dijadikan tempat tinggal (*internering*). Lihat: Nalenan, *op. cit.*, hlm. 46.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 49.

²⁰ Drs. Susanto Tirtoprodjo, S.H. (1970). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia*. Jakarta: P.T. Pembangunan Jaya. hlm. 52.

terdapat tuduhan dalam artikel 110 buku hukum siksa, artikel 109 buku hukum siksa, artikel 161 bis buku hukum siksa dan artikel 171 buku hukum siksa, yaitu:

“putusan mana tidak diambil dimuka ramai atau tidak diumumkan atau dengan djalán satu dan lain, atau dengan tjara bagaimana djuga jangmendjadikan perkumpulan itu dikemudian hari revolusioner jang tidak bersandar kepada statuten atau program jang diumumkan, sebolehnja harus dirahasiakan dan disembunjikan, dan karenanja betul mempunjai maksud hendak menjatuhkan Pemerintah Hindia belanda, dan mengganggu keamanan negeri dan berbuat pemberontakan dan mentjoba membinasakan dan merobah Pemerintah Hindia Belanda dengan djalán tidak sjah (artikel 110 buku hukum siksa membuat pemberontakan dan mentjoba berbuat pemberontakan sendiri (artikel 109 buku hukum siksa, dengan djalán memantjing supaja lain orang2 berbuat kedjahatan itu artikel 163 bis dari buku hukum siksa) dengan mengadakan staking, pemogokan, untuk mengganggu keamanan umum (artikel 161 bis buku hukum siksa) dengan sengadja menjiarkan perkabaran dusta untuk mengganggu ketertiban umum diantara rakjat (artikel 171 buku hukum siksa), djuga di tuduh turut tjampur dan mentjoba berbuat kedjahatan2 sebagai tersebut diatas.”²¹

Untuk pasal 153 bis berbunyi:

“barang siapa dengan perkataan, tulisan atau gambar melahirkan pikirannya yang, biarpun secara menyindir atau samar-samar, memuat anjuran untuk mengganggu keamanan umum atau menentang kekuasaan Pemerintah Nederland atau Pemerintah Hindia Belanda dapat dihukun penjara maximum 6 tahun atau denda 300 rupiah”²²

Pasal 169 berbunyi: “barang siapa mengambil bagian dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan”.²³

Penangkapan tersebut sangat menguntungkan pihak pemerintah kolonial karena berhasil membekukan gerakan nasionalis revolusioner. Pemerintah berhasil menghancurkan semangat rakyat.²⁴ Gatot Mangkupradja berpendapat bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap pimpinan dan anggota PNI adalah tujuan pemerintah kolonial yang berusaha untuk menjadikan PNI menjadi partai terlarang. Hal tersebut dinyatakan seperti berikut:

“... bahwa maksud dan tudjuan pemerintah kolonial itu tidak lain dan tidak bukan, hanya mentjahari djalán belaka untuk dapat menjatakan bahwa P.N.I. adalah Partai terlarang jang mengganggu Keteteraman Umum dan Berbahaja bagi kedudukan Pemerintah Hindia Belanda.”²⁵

²¹ Notosoetardjo, *op.cit.*, hlm. 1 dan 2.

²² Tirtoprodjo, *Op. cit.*, Hal. 52.

²³ *Ibid.*

²⁴ Lihat: Notosoetardjo, *op.cit.*, hlm. xlvii dan l.

²⁵ Lihat kata sambutan oleh Gatot Mangkupradja: *Ibid.* hlm. xxiii.

Penangkapan dan pengeledahan terhadap para pimpinan dan anggota PNI banyak mendapat kecaman dari kaum intelektual dan organisasi-organisasi lainnya. Salah satunya Hatta mengecam penangkapan keempat pimpinan PNI. Hatta berpendapat, dengan adanya penangkapan dan pengeledahan janganlah membuat pergerakan menjadi mati dan berdiam diri. Anggota PNI lainnya harus meneruskan pekerjaan partai demi mereka yang di tahan dan demi Indonesia merdeka.²⁶ *Volksraad* mengutuk aksi penangkapan dan pengeledahan terhadap para pimpinan dan anggota PNI. Protes *Volksraad* dinyatakan dalam sidang *Volksraad* tanggal 5 Februari 1930. Protes tersebut yaitu:

“ ... Jang terdiri dari tuan2 *Thamrin* sebagai voorzitter, *Kusumo Oetojo*, *Dwidjosewojo*, *Datuk Kajo*, *Nja Arif*, *Soangkoepon*, *Pangeran Ali*, *Soetadi* dan *Soeroso*. Tuan Koesoemo Oetojo: Nationale fractie, atas nama siapa saja bitjara sekarang ini, telah mendengar dengan menjesal hati djawaban Pemerintah (pada tgl. 4 ini bulan tentang sikapnja terhadap kepada P.N.I. jang terkenal) bahwa pemerintah tidak suka bertukar fikiran dengan persidangan kami tentang alasan2nja mengapa ia bertitah melakukan pengeledahan umum pada 29 Desember 1929. Djuga fractie kami sangat menjesalkan, bahwa didalam djawabannja pemeritah mengantjam akan melakukan pengeledahan2 lagi, „bilamana dan berapa luasnja”, ia menganggap perlu untuk keperluan keamanan umum. Pendapatannja ini melulu disandarkan oleh pemerintah atas sifat justitieel politioneel dari tindakan2 itu. Djadi samasekali tidak memperdulikan kedjadian2 politiek, jang menurut pendapatan kami tentu terdjadi.”²⁷

Dalam proses sidang, Sukarno melakukan pembelaan terhadap persidangan pada sidang terakhir tanggal 1 dan 2 desember 1930 yang dikenal sebagai *Indonesia Menggugat*. Dalam *Indonesia Menggugat*, sukarso menekankan pergerakan nasional Indonesia bukan buatan kaum intelektual dan komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinnya menuntut kemerdekaan.²⁸ Selanjutnya Sukarno menyatakan yaitu:

“... Pembentukan kekuasaan P.N.I. adalah pembentukan kekuasaan jang mendirikan bulu punduk kaum imperialisme, bahasa kami adalah bahasa radikal jang bernjala-njala dengan semangat nasional jang hurung – kami adalah kaum *non-koperator* dan *revolusioner*.”²⁹

²⁶ Lihat Hatta: *P.N.I. Mendapat Pertjobaan*. Ibid. hlm. 543-545.

²⁷ Ibid. hlm. 506.

²⁸ Kartodirdjo *et al.*, *op. cit.*, hlm. 221.

²⁹ Sukarno. (1951). *Indonesia menggugat: Pidato pembelaan Bung Karno dimuka hakim kolonial*. Jakarta: S.K. Seno. hlm. 180.

Selain itu dalam pidato pembelaannya, Sukarno menganggap proses sidang yang dilakukan terhadapnya adalah proses politik maka tidak boleh dipisahkan dari persoalan-persoalan politik yang menjadi sifat dan azas dari PNI.³⁰

Berdasarkan bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dan proses persidangan, maka keempat pimpinan PNI dijatuhi hukuman oleh *Landraad* Bandung. Ir. Sukarno dengan 4 tahun penjara, Gatot Mangkupradja 2 tahun penjara, Maskoen 1 tahun 8 bulan, Supriadinata 1 tahun 3 bulan penjara. Keputusan itu dikuatkan oleh *Raad van Justitie*, Jakarta pada tanggal 17 April 1931.³¹

Vonis yang dijatuhkan terhadap para pimpinan PNI dikecam banyak pihak yang mengutuk tindakan pemerintah kolonial terhadap PNI. Salah satunya adalah SDAP (Partai buruh Demokrat Sosial Belanda) yang memberikan pernyataan bahwa ditangkapnya para pimpinan PNI berdasarkan kepentingan politik.

“Berpendapatan, bahwa perjoengan rajat Indonesia oleh pergerakan kaoem boeroeh social democrat haroes dipandang sebagai sebagian dari perdjoangannya sendiri terhadap kepada imperialisme belanda; Memprotes poatoesan Landraad Bandoeng dan mengoetjapkan persetoedjoean dan persaudaraan sepenoeh-penoehnja kepada pemimpin-pemimpin P.N.I jang dijatoehkan hoekoeman dan kepada perdjoangannya oentoek memerdekakan rajat Indonesia.”³²

Kemudian protes dari Sjahrir dengan pidatonya dalam rapat P.I. di Den Haag pada tanggal 16 Januari 1931. Sjahrir menyatakan vonis terhadap keempat pimpinan PNI adalah tindakan politis dari pemerintah untuk mempertahankan kepentingannya di Indonesia. Dalam pidatonya, Ia mengajak kaum buruh di Belanda memprotes vonis terhadap Sukarno karena kapitalisme yang dilaksanakan pemerintah kolonial dan berkembang di tanah Hindia Belanda.³³

PI juga melakukan protes terhadap vonis bagi keempat pimpinan PNI. Protes yang dilakukan PI dengan mengirimkan dua buah telegram. Telegram pertama dikirimkan pada tanggal 2 Januari 1931 kepada PPPKI yang berbunyi “Perhimpunan

³⁰ Ringkasan pidato – pembelaan dimoeka Landraad di – Bandoeng pada 1 dan 2 December 1930, *Persatoean Indonesia.loc. cit.*, 9 desember 1930.

³¹ Keempat terdakwa melanjutkan putusan banding ke pengadilan yang lebih tinggi yaitu *Raad van Justitie* namun hasilnya tetap tidak berubah. Lihat: Nasib PNI dan keempat Pemimpinnya oleh Landraad Bandung pada 22 Desember 1930. Notosoetardjo, *op.cit.*, hlm. 552-554.

³² “Vonnis P.N.I.”, *Persatoean Indonesia, loc. cit.*, 10 April 1931.

³³ Vonnis Landraad Bandung. Lihat: Notosoetardjo, *op. cit.*, hlm. 567-571.

Indonesia pertjaja akan kekalnya persaudaraan antara P.P.P.K.I. dan bestuur PNI.”³⁴

Telegram kedua dikirimkan pada 3 Januari 1931 kepada *Tweede Kamer* yaitu:

“Perhimpunan Indonesia mengingatkan kepada pemerintah tentang aturan2nja jang reaksioner terhadap kepada P.N.I. dan minta tanggung djawabnja tentang apa jang akan terdjadi lantaran itu.”³⁵

3.2 Partai Indonesia

Hukuman yang dijatuhkan kepada keempat tokoh PNI membawa dampak buruk bagi organisasi tersebut. Karena berdasarkan pasal 153 bis dan pasal 169 kitab hukum pidana, PNI dinyatakan sebagai perkumpulan yang bertujuan melakukan makar terhadap pemerintah.³⁶ Sebelum vonis dijatuhkan, muncul kekhawatiran dikalangan pengurus besar PNI mengenai nasib PNI kedepannya. Setelah Sukarno dan yang lainnya ditahan oleh pemerintah, Sartono dan Anwari mengambil alih kepemimpinan PNI. Mereka kemudian mengeluarkan surat perintah kepada pengurus-pengurus cabang dan para anggotanya agar menghentikan semua kegiatan politik atas nama partai sampai keputusan berikutnya.³⁷ Lebih lanjut dikatakan:

“berhubung dengan pemeriksaan justitie dan politie maka pengurus besar P.N.I. minta kepada saudara2 sekalian, supaja pekerdjaan Partai kita dalam lapangan politik ditunda buat sementara waktu dan menunggu keputusan kita dalam hal ini. Permintaan kami, supaja sikap tertip itu oleh saudara2 tetap didjalankan seterusnya. Seruan kami, Pengurus besar dari Partai Nasional Indonesia, kepada kawan2ku sefaham dan seazas dan kepada Ra’jat Indonesia seumumnja: „Bertetaplah hati, dan pertjajalah kepada Kebenaran, jang tentu akan menundjukkan Kebersihan dan Kesutjian Pergerakan kita.”³⁸

Setelah vonis dijatuhkan kepada keempat PNI oleh *Landraad* Bandung dan diperkuat dengan keputusan *Raad van Justitie*, pimpinan PNI yang pada saat itu dijabat Sartono, memutuskan untuk mengadakan kongres luar biasa yang kedua tanggal 25 April 1931 di Jakarta. Kongres luar biasa tersebut menghasilkan keputusan yaitu Maklumat Pembubaran PNI.³⁹ Berikut Maklumat Pembubaran PNI yaitu:

³⁴ Telegram dari Perhimpunan Indonesia di Eropah. Lihat: Ibid. hlm. 583.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ingleson, *op. cit.*, hlm. 153 dan 154.

³⁷ Ibid. hlm. 132.

³⁸ Notosoetardjo. *op. cit.*, hlm. 579 dan 580.

³⁹ Kongres luar biasa pertama PNI diadakan pada tanggal 14 Pebruari 1931 di Jogjakarta. Lihat: Ingleson. *op. cit.*, hlm. 158.

“... Oleh karena kepoatoesan ini, maka P.N.I pada hari boelan 25 April 1931 telah mengadakan Congres loear biasa jang kedoea kalinja di kota Djakarta oentoek menentoekan sikapnja. Congress jang ini, jang dikoendjoengi oleh wakil-wakil dari segenap tjabang-tjabang P.N.I berpendapatan:

- 1e. bahwa vonnis landraad Bandoeng jang dikoeatkan oleh Raad van Justitie meloekai perasaan keadilan dari Ra'jat Indonesia segenapnja.
- 2e. bahwa ke-empat saudara itoe dan Partai Nasional Indonesia tidak berdosa.
- 3e. bahwa vonnis landraad Bandoeng jang diperkoeatkan oleh Raad van Justitie tidak hanja mengenai ke-empat pemimpin itoe sadja, tetapi djoega mengenai segenap Partai.
- 4e. bahwa vonnis tadi semata-mata memboenoeh Partai Nasional Indonesia.
- 5e. bahwa karena keadaan memaksa (*overmacht*) lebih sempoerna memboebarkan Partai kita: Dan achirnja mengambil kepoatoesan memboebarkan Partai Nasional Indonesia.”⁴⁰

Inti dari kongres luar biasa PNI ini menghasilkan keputusan yaitu pembubaran PNI karena keadaan yang memaksa (*overmacht*). Kongres ini dihadiri 23 orang yang mewakili 7 cabang PNI terdiri dari: Mr. Sartono, S. Angronsudhirdjo, Ir. Anwari, Suwirjo, Sukemi (Hoofdbestuur) Sungeb (Jakarta), Sukarto (Jakarta), Subroto (Djakarta), Kromo Lawi (Pekalongan), M. Yahja Ns. (Pekalongan), Sjoefjan (Pekalongan), Harun Ali (Pekalongan), Nungtijk (Palembang) Mr. Sudjudi (Mataram), Sutardjo (Bandung), Moh. Thoib (Bandung), Wijono (Malang), Atmadji (Surabaya), Pranata (Surabaya), Dwidjowijoto (Semarang), Atmoeantoso (Semarang), Sudjadi, Mr. Ali Sastroamidjojo.⁴¹

Setelah dibubarkan Partai Nasional Indonesia, Sartono, Manadi, Soekemi, Angron Soedirdjo, Soewirjo berkumpul untuk membicarakan pembentukan partai politik yang baru dengan keputusan sebagai berikut:

- “1o. dengan selekas-lekasnja haroes didirikan Partai politiek baroe. jang memakai toedjoean *Indonsia Merdeka*, dan jang memakai azas-azas *selfhelp*, *persatoean Indonesia*, *tidak-membeda-medakan deradjat dan agama*.
- 2o. kepoatoesan ini akan disiarkan di soerat-soerat kabar.
- 3o. partai tsb. akan didirikan pada tanggal 29 April 1931.
- 4o. soesoenan kata dan kalimat dari Anggaran Dasar dan azas-azas akan ditetapkan pada hari lain.”⁴²

Kemudian pada tanggal 29 April 1931 Partai Indonesia didirikan dengan susunan pengurus pusat yang terdiri dari Sartono sebagai ketua. Manadi sebagai wakil ketua. Nyonoprawoto sebagai sekertaris. Suwiryo sebagai bendahara. Sudarmoatmojo

⁴⁰ “Makloemat Pemboebaran P.N.I”. *Persatuan Indonesia loc. cit.*, 30 April 1931.

⁴¹ Notosoetardjo. *op. cit.*, hlm. 641 dan 642.

⁴² “Riwayat Pendirian „Partai Indonesia”. *Persatuan Indonesia. loc. cit.*, 10 Juni 1931.

sebagai pembantu I. Sukaemi sebagai pembantu II. Yusuf Yahya sebagai pembantu III.⁴³

Untuk menjalankan visi misi partai, segera dibentuk badan-badan pengurus partai yang terdiri dari Badan Pengurus Perguruan pemimpin yang diketuai S. Tirtosupono dan Suwiryo sebagai sekretaris. Badan Pengurus Soal Pengajaran Nasional diketuai Sudarmoatmodjo dan Yusuf Yahya sebagai sekretaris. Untuk badan pengurus soal ekonomi diketuai Sartono dan Winoto sebagai sekretaris. Badan pengurus soal pergerakan sekerja diketuai Sartono dan Ahmad Sumadi sebagai sekretaris. Badan pengurus soal pergerakan sekerja diketuai Sartono dan Ahmad Sumadi sebagai sekretaris. Badan pengurus soal pers diketuai Nyonoprawoto dan sebagai Yusuf Yahya sebagai sekretaris.⁴⁴

Azas dari Partai Indonesia ditetapkan pada tanggal 30 April 1931 yaitu: Tiap-tiap bangsa mempunyai *hak untuk menentukan nasib diri sendiri*; *Selfhelp* adalah keyakinan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia harus bersandar pada kekuatan sendiri; *Persatoean Indonesia* adalah bersatu dan tidak-membeda-bedakan derajat dan agama. Sedangkan tujuan Partindo adalah Indonesia Merdeka . tujuan ini akan dicapai dengan cara memperkuat usaha Bangsa Indonesia agar mendapatkan perluasan hak-hak politik yang seluas-luasnya dan untuk mencapai pemerintahan yang berdasarkan kerakyatan dan kebangsaan. Kemudian memperbaiki keadaan sosial dan perekonomian rakyat Indonesia.⁴⁵

Untuk menjalankan azas dan tujuan partai, Partindo memiliki daftar usaha-usaha yang akan dilaksanakan. Daftar usaha Partindo terbagi menjadi tiga bidang yaitu bidang politik dan kenegaraan, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Daftar usaha yang akan dilaksanakan Partindo dalam bidang politik dan kenegaraan adalah: Membangkitkan semangat bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka dapat diperoleh dengan menyusun gerakan politik yang teratur. Selain itu menguatkan perasaan kebangsaan yang berdasarkan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dapat

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ "Berita „Partai Indonesia”. *persatoean Indonesia*. 10 Juni 1931.

⁴⁵ "Azas dan Anggaran Dasar Perkoempoelan Partai Indonesia", *Persatoean Indonesia. loc. cit.*, 10 Juni 1930.

diperoleh dengan menjalankan keyakinan yang bertujuan satu, bertanah air satu dan berbangsa satu. Selanjutnya memperdalam pengetahuan tentang sejarah kebangsaan dan menanamkan kepada rakyat Indonesia semangat pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah berjuang melawan penjajahan. Kemudian memperbaiki hukum kebangsaan dan mengusahakan agar Bangsa Indonesia menggunakan hukum yang sesuai dengan kemauan rakyat Indonesia. Menghapuskan halangan yang merintangi kemerdekaan diri, rumah tangga, kemerdekaan pendapat dalam pers, kemerdekaan kepercayaan dan beragama, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Bekerja sama dengan partai politik lainnya agar pasal-pasal dalam kitab hukum yang mengancam pergerakan politik dihapuskan. Mempelajari dan membuat rancangan dasar negara yang sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Memperkuat hubungan dengan bangsa-bangsa di Asia dan membantu pergerakan bangsa yang belum merdeka.⁴⁶

Dalam bidang ekonomi, Partindo memiliki beberapa rancangan usaha yaitu memperjuangkan kehidupan rakyat yang merdeka yang bersandar pada kemampuan sendiri. Memajukan perdagangan dan perniagaan bangsa Indonesia. Memajukan kerajinan rakyat dan perusahaan dari bangsa Indonesia. Mengusahakan modal kepada usaha rakyat kecil dan menengah. Mendirikan bank-bank nasional. Memajukan produk dalam negeri dan menumbuhkan cinta kepada produk dalam negeri. Mendirikan koperasi. Melawan riba dan menumbuhkan sifat hemat agar dapat hidup sederhana.⁴⁷

Dalam bidang sosial, Partindo memiliki beberapa rancangan usaha yaitu Memerangi buta huruf, mendirikan sekolah dan perguruan yang berdasarkan kebangsaan. Mengusahakan pendidikan nasional yang berkelanjutan dari sekolah rendah, sekolah menengah, sampai sekolah tinggi. Membuat majalah, surat kabar, dan buku untuk keperluan bangsa. Memajukan transmigrasi untuk pemerataan penduduk di Indonesia. Memperbaiki dan meninggikan derajat perempuan. Mengusahakan

⁴⁶ "Daftar Oesaha". *Persatuan Indonesia*. 10 April 1931.

⁴⁷ *Ibid.*

penuntutan kepada pemerintah kolonial agar dikembalikan hak-hak tanah anak negeri. Memajukan serikat tani dan memperbaiki kesehatan rakyat.⁴⁸

Pada intinya, Partindo adalah PNI dengan nama lain. Para pimpinan Partindo yakin bahwa keputusan untuk membubarkan PNI dan kemudian mendirikan Partindo adalah tindakan untuk mencegah pemerintah menentang Partindo berdasarkan keputusan hukuman terhadap para pemimpin PNI. Partindo sampai bulan Oktober 1931 mempunyai 12 cabang (berasal dari sebagian cabang-cabang PNI lama) beranggota 7000 orang.⁴⁹

Pada 14-16 Mei 1932 di Jakarta dilangsungkan kongres pertama. Sedangkan konferensi yang diadakan bulan Juli 1932 ditetapkan daftar usaha partai kedua. Antara lain: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan penyiaran, kemerdekaan bertempat tinggal dan penghapusan pasal-pasal 161 bis dari undang-undang hukum pidana, penghapusan hak-hak luar biasa dari pemerintah dalam hal pengasingan, perbaikan aturan tahanan dan pemeriksaan dalam perkara-perkara kriminal, mendirikan perkumpulan-perkumpulan tani, pemberantasan buta huruf.⁵⁰ Tujuan dari kongres ini diselenggarakan untuk menyempurnakan anggaran dasar partai dan peraturan-peraturan lainnya. Sebuah komisi dibentuk untuk mempersiapkan sebuah rencana dasar keuangan bagi partai kedalam tiga bagian, yaitu dana untuk propaganda, dana untuk studi, dana untuk membantu para pemimpin yang terkena hukuman karena aksi-aksi yang dilakukannya. Selain itu dibentuk komisi lainnya yaitu komisi propaganda yang dipimpin Manadi dan Mohammad Yamin, untuk menyiapkan rencana bagi usaha-usaha partai dalam pendidikan nasional dipimpin Amir Syarifudin, untuk gerakan *Swadeshi* dipimpin Sartono, dan untuk penerbitan surat kabar harian dipimpin Ali Sastroamidjojo.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ingleson. *op. cit.*, hlm.160.

⁵⁰ Pringgodigdo. *op. cit.*, hlm. 130.

⁵¹ Ingleson. *op.cit.*, hlm. 194.

3.3 Pendidikan Nasional Indonesia

Pembubaran PNI pada kongres luar biasa PNI dan pembentukan partai baru yaitu Partai Indonesia ternyata tidak sepenuhnya disetujui oleh anggota-anggota PNI lainnya. Adapun penentang-penentang lain yang tidak setuju atas pembubaran Partai Nasional Indonesia adalah Soejadi, Moerad, Kantaatmaja, Bondan, Soekarto, Teguh dan lainnya.⁵² Mereka yang tidak setuju dengan Partindo mengadakan hubungan yang tidak resmi satu sama lain di kota-kota yang terdapat bekas cabang PNI yang besar seperti Batavia, Bandung dan Surabaya. Di kota-kota tersebut, mantan anggota PNI yang kecewa mendirikan kelompok studi sebagai tempat berkumpul. Kelompok-kelompok studi yang didirikan antara lain Kelompok Studi Nasional Indonesia di Batavia oleh A.K. Pringgodigdo pada bulan Maret 1931, Kelompok Studi Rakyat Indonesia di Bandung pada bulan April 1931, Perhimpunan Kemadjuan Kebangsaan Indonesia (PKKI) di Batavia. pada bulan Mei 1931 oleh Soedjadi, Cabang dari PKKI di Surabaya pada bulan Juli 1931 oleh Atmadji, dan pembentukan Balai Pendidikan Indonesia. Selain kelompok studi yang telah disebutkan banyak pula kelompok-kelompok lain yang lebih kecil di kota-kota tersebut.⁵³

Kelompok-kelompok tersebut kemudian menamakan diri mereka sebagai “Golongan Merdeka”.⁵⁴ Golongan Merdeka yaitu:

“„Golongan merdeka” (ialah kaoem P.N.I. marhoem yang tidak menggaboengkan diri dalam Partai Indonesia) dibeberapa tempat telah mengeloearkan communique’s, beroepa „makloemat” dan „soerat terbuka”.⁵⁵

Golongan Merdeka menyebut diri mereka sebagai kaum PNI-Marhaen yang tidak menggabungkan diri dalam Partai Indonesia. Perpisahan yang dilakukan golongan merdeka yang juga golongan nasionalis, merupakan kemauan mereka sendiri, sebab mereka mempunyai itikad, “dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat”.⁵⁶

⁵² Hatta. *op. cit.*, hlm. 243.

⁵³ Lihat: John Ingleson. *op.cit*, hlm. 162 dan 163.

⁵⁴ Meskipun setiap kelompok mempunyai nama masing-masing, istilah “Golongan Merdeka” banyak digunakan oleh sebagian besar kelompok tersebut. Hal ini kemudian digunakan oleh pemerintah kolonial bukan hanya untuk digunakan menunjuk satu kelompok saja, namun semua kelompok mantan anggota PNI yang tidak setuju dengan Partindo secara kolektif. Lihat: *Ibid*.

⁵⁵ Meriwayatkan Keinsjafan Ra’jat. *Daulat Ra’jat*. 20 September 1931.

⁵⁶ Kata pendahoeloean boeat „Daulat Ra’jat”. *Daulat Ra’jat*. 20 September 1931.

Pada tanggal 1 November 1931 di Gedung Permufakatan Indonesia, Jakarta diadakan rapat umum Golongan Merdeka untuk membicarakan pembentukan Komite Koordinasi. Golongan Merdeka yang hadir antara lain dari Bandung, Garut, Cimahi, Mataram, Surabaya. Perwakilan Golongan Merdeka yang tidak hadir dari Malang, Palembang, dan Solo. Tokoh-tokoh yang memberikan pidato dalam rapat ini antara lain: Soekarto, Bondan, Soeka, Moerwoto, Rakim, Bawoek, Soetardjo, Ma'moer Salim dari Mataram, Siswoharadjo dari Surabaya, Wira dari Garut, Dipojono dari Cimahi dan yang terakhir Iskandar.⁵⁷ Rapat umum Golongan Merdeka menghasikan keputusan pertama menugaskan kelompok Studi Rakyat Indonesia dari Bandung untuk menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kedua segera membentuk partai pada konferensi di Jogjakarta pada bulan Desember.⁵⁸

Sesuai dengan kesepakatan hasil dari rapat umum Golongan Merdeka, diadakanlah konferensi Golongan Merdeka tanggal 25 – 27 Desember 1931 di Jogjakarta. Dalam konferensi ini terjadi perdebatan mengenai nama partai yang akan didirikan. Hatta melalui telegramnya dari Belanda⁵⁹ memberikan masukan untuk menunda pembentukan partai. Akhirnya diputuskan membentuk suatu organisasi yang disebut Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-baru). Konferensi juga menetapkan akan mengadakan kongres pertama PNI-baru pada bulan juni 1932.⁶⁰

Selain itu, hasil konferensi lainnya yaitu menetapkan rencana program PNI-baru yang terdiri dari beberapa bidang yaitu bidang politik, yuridis, ekonomi dan sosial. Dalam bidang sosial, PNI-baru memiliki rancangan usaha, menyatakan bahwa kemerdekaan nasional berdasarkan kedaulatan rakyat yaitu suatu pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Usaha tersebut melalui pembentukan dewan-dewan perwakilan yang teratur menurut persatuan rakyat. Dewan perwakilan dibentuk dari yang paling bawah terdiri dari tingkat desa, dewan kota dan yang paling tinggi adalah

⁵⁷ Rapat Umum Golongan Merdeka yang diadakan di Jakarta dimuat dalam *Daulat Ra'jat* edisi 6 sampai edisi 8. Lihat: Rapat Oemoem „Golongan Merdeka”. *Daulat Ra'jat*. 10, 20 dan 30 November 1931.

⁵⁸ Ingleson. *op. cit.*, hlm. 172.

⁵⁹ Hatta pada saat itu masih menyelesaikan studinya di Belanda. Hatta kembali ke Indonesia tanggal 23 Agustus 1932 dan kemudian langsung memimpin PNI-baru. Lihat: *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

dewan rakyat, badan perwakilan rakyat Indonesia. Diantara dewan perwakilan kota dan dewan rakyat, dibentuk dewan provinsi, tempat bersidang wakil-wakil rakyat perwakilan provinsi, dan dewan pulau, tempat bersidang wakil-wakil rakyat pulau. Selanjutnya mengadakan referendum untuk mendapatkan keinginan rakyat dalam usaha untuk memenuhi penghidupan rakyat. Kemudian desentralisasi dan otonomi di setiap daerah. Perihal hak bersuara dalam pemilihan anggota dewan, PNI-baru menuntut hak memilih bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 21 tahun keatas. Selanjutnya, mengenai hak orang Indonesia, PNI-baru memperjuangkan kemerdekaan pers, berserikat dan berkumpul, serta kemerdekaan beragama dan memiliki kepercayaan. Berikutnya memisahkan urusan agama dengan urusan pekerjaan. Dan yang terakhir menghapuskan hak-hak luar biasa pemerintah kolonial.⁶¹

Dalam bidang Hukum, PNI-baru memiliki rancangan usaha yaitu, persamaan hukum bagi laki-laki dan perempuan. Melindungi dan menyamakan hak-hak bangsa lain yang tinggal di Indonesia. Memberikan pengadilan yang adil bagi seluruh golongan rakyat, yaitu rakyat miskin berhak mendapat bantuan dari ahli hukum secara cuma-cuma. Menghapuskan segala perbedaan derajat dan perbedaan sosial. Membuat peraturan hukum siksa yang baru, yang bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki sifat yang terhukum. Mengusahakan hak tanah rakyat untuk tinggal di Indonesia. Menghapuskan segala peraturan feodal seperti hak sewa tanah (Landrente), tanah-tanah partikelir (Particuliere Landerijen), dan semua hak-hak luar biasa (Voorkeursrechten) kaum priyayi. Mengusahakan hak tiap orang untuk mendapatkan seluruh hasil usahanya, dengan persyaratan sebagian hasil yang diserahkan kepada pemerintah untuk pembangunan.⁶²

PNI-baru mengemukakan rancangan usahanya dalam bidang ekonomi antara lain: Untuk memajukan perekonomian yang demokrasi melalui koperasi. Perekonomian berdasar koperasi berangsur-angsur disempurnakan dengan memajukan badan-badan koperasi dalam pertanian dan kerajinan rakyat, serta

⁶¹ Rentjana Program Partai daulat Ra'jat, *Daulat Ra'jat. loc. cit.* 30 December 1931.

⁶² *Ibid.*

mendirikan bank-bank koperasi rakyat. Produksi dan bank nasional pemberi kredit harus dibawah pengawasan pemerintah nasional. Perusahaan-perusahaan yang bersifat monopoli dipegang oleh pemerintah nasional. Pemerintah nasional berhak atas sebagian keuntungan yang didapat dari badan-badan koperasi. Sebagian besar dari badan koperasi yang tinggi tingkat produktivitasnya diserahkan kepada pemerintah nasional, agar tercapai pembagian hasil yang adil bagi rakyat Indonesia. Mengusahakan supaya tiap orang dan keluarganya sedikitnya mempunyai pekerjaan agar dapat memenuhi kehidupannya dengan menetapkan batas minimum upah bagi rakyat. Memperbaiki syarat-syarat penghidupan rakyat secara berangsur-angsur untuk mencapai kesejahteraan nasional. Pemerintah nasional harus memberikan tunjangan kepada para pensiunan dan orang-orang tua. Memberikan kebebasan membayar pajak bagi orang yang memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk menghidupi keluarganya. Memperbesar penghasilan Negara dengan metode atau cara yang berdasarkan ilmu untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Memajukan serikat-serikat tani dan serikat-serikat pekerja.⁶³

Dalam bidang sosial, usaha PNI-baru antara lain: Membentuk undang-undang sosial seperti menjaga keselamatan pekerja, menetapkan batas upah minimum, menetapkan waktu bekerja 8 jam per hari (7 jam dalam tambang), melarang anak-anak dibawah umur 15 tahun bekerja. Melarang perempuan yang sedang hamil bekerja dari 7 minggu sebelum masa bersalin sampai 6 minggu setelah masa bersalin tanpa pemotongan gaji. Memberikan tanggungan kepada pekerja yang sakit dan yang tertimpa bencana. Menghapus segala bentuk kerja paksa dan kerja rodi. Menjaga keselamatan anak-anak dan mendirikan tempat tinggal (rumah panti) bagi anak-anak yatim dan orang tua. Membentuk undang-undang penghapusan sistem ekonomi riba. Membuat peraturan wajib sekolah bagi anak-anak dan membebaskan biaya bagi orang-orang miskin dari biaya uang sekolah sampai anak itu berumur 15 tahun. Memerangi buta-huruf dengan mendirikan perguruan rakyat dan sekolah umum. Memajukan peradaban Indonesia menurut dasar peradaban rakyat. Memperbaiki kesehatan rakyat dengan mendirikan fasilitas olahraga, taman, dan memberi

⁶³ *Ibid.*

penyuluhan kepada rakyat mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Membantu usaha kaum istri dalam kegiatan sosial.⁶⁴

Selanjutnya sesuai keputusan dari konferensi di Jogjakarta, PNI-baru melaksanakan kongres pertamanya pada 23 – 26 Juni 1932 di Bandung. Kongres ini diadakan di gedung BPRI. Kongres ini dihadiri utusan-utusan dari setiap cabang PNI-baru, anggota Pengurus Umum PNI-baru dan dihadiri utusan-utusan dari perhimpunan lain yang mengirimkan wakilnya, diantaranya: Partindo cabang Bandung, PSII, LTPSII, Istri Sedar, PPP, Siap, Sanggabuana, Taman Siswa, Persaudaraan Semua Pemuda (Bd-jakarta), Sakti, Persatuan Kaum Chauffeur, Persatuan Tukang Sepatu, Pasundan, Kepanduan Rakyat Indonesia dan lain-lain. Beberapa perwakilan yang tidak hadir memberikan surat kepada kongres diantaranya Kepanduan Rakyat Indonesia Solo, HBPST, Rukun Pasundan, Mataram, Central Best PR, HBSPI, Tumapel, HB Istri Sedar, Wanito Sejati, PPPKI, HB Pasundan, Noord Muria dan lain-lain menyatakan dukungannya terhadap didirikannya PNI-baru.⁶⁵

Kongres PNI-baru ini dipimpin oleh Soekemi. Terlebih dahulu Ia memperkenalkan PNI-baru kepada para peserta kongres dengan menyatakan PNI-baru adalah sebuah pergerakan dari kaum Marhaen yang segala tindakannya memihak kaum Marhaen. Setelah peristiwa penangkapan terhadap para pimpinan PNI, saat pergerakan nasional mendapat cobaan, saat itu aksi politik PNI dihentikan. Setelah para pimpinan PNI mendapat vonis hukuman dari hakim pemerintah, selanjutnya dikeluarkannya Maklumat Pembubaran PNI. Kemudian dengan didirikannya Partindo. Pembubaran ini sangat mengecewakan bagi sebagian anggota PNI. Mereka yang kecewa menamakan dirinya Golongan Merdeka dan saat ini berada dalam panji PNI-baru. Selanjutnya Soekemi menyatakan dalam usianya yang baru 6 bulan, PNI-baru sudah mempunyai cabang-cabang yaitu cabang Bandung, Jakarta, Cirebon, Garut, Mataram, Surakarta, Malang, Surabaya, Magelang, Temanggung, dan Cianjur. Selanjutnya ranting Cimahi, Cileduk dan Ngadirejo. Dan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Kongres P.N.I. Ke. I. *Daulat Ra'jat*. 10 Juli 1932.

beberapa komite daerah yaitu Sukabumi, Tasikmalaya, Pariaman, Sindang Laut, Kuningan, Lampung, Karang Anyar, Purwokerto, Purworejo dan Purwakarta.⁶⁶

Selanjutnya diberikan kesempatan kepada para perwakilan yang hadir dalam kongres diantaranya ada 13 yang turut berpidato. Mereka wakil dari Partindo cabang Bandung, PSII, BKK, Taman Siswa, Sanggabuana, PSP, Isteri Sedar, PPP, LTPSII, Sarekat Soematra, Cahya, Phan Min Kit dan Ir. Soekarno. Abikusno, perwakilan dari LTPSII menyatakan bahwa diantara pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar nasionalisme hanya PNI-baru yang benar-benar membela kaum Marhaen.⁶⁷

Pada kongres pertama PNI-baru, setelah Sukarno keluar dari penjara, ia turut serta dalam kongres ini. Dalam kongres, ia memberikan pidato mengenai usahanya untuk menyatukan PNI-baru dengan Partindo namun ternyata usahanya sia-sia. Pada kongres, Sukarno menyatakan bahwa selama ada darah dan daging, selama itu pula kaum Marhaen akan terus berdiri tegak. Sukarno mengemukakan semboyan kaum Marhaen; "Kaoem Marhaen haroes bersatoelah kamoe". Ia kemudian memberikan pendapat bahwa banyak para pemimpin yang berkata "dengan ra'jat oentoek ra'jat", namun dalam prakteknya "dengan ra'jat oentoek intellectueelen". Mereka itulah menurut Sukarno sebagai pemimpin palsu yang tidak boleh di percaya rakyat! Sukarno menyatakan kepada khalayak ramai dalam kongres bahwa Ia seorang Nasionalis Marxis dan kemudian Ia bersumpah; "Demi Allah, demi Rasoeleloh" bahwa ia selamanya akan bekerdja oentoek membela kaoem Marhaen".⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

BAB 4

SIKAP PNI BARU DAN PARTINDO DALAM TWEEDE KAMER, ORDONANSI SEKOLAH LIAR DAN ZEVEN PROVINCIE

4.1 Perseteruan Partindo dengan PNI-baru

Perseteruan antara Partindo dan Golongan Merdeka semakin memanas hingga terjadi perang terbuka antara Hatta dan Mr. Sartono di surat kabar. Di beritakan di *Daulat Ra'jat* edisi 8 tanggal 30 November 1931. Hatta mengirimkan surat kepada Sartono dari Rotterdam tanggal 10 November 1931. Dalam surat tersebut, isinya antara lain Hatta mengucapkan terima kasih kepada Sartono selaku pimpinan Partindo karena telah mengirimkan edisi *Persatoean Indonesia* no.105. Dalam edisi *Persatoean Indonesia* tersebut terdapat tulisan dari Mr. Abdullah Soekoer yang bermaksud memberi keterangan lebih lanjut mengenai pertentangan antara dirinya dengan PI. Ia menyatakan bahwa PI sekarang dijadikan alat oleh Partindo dan Sartono untuk menyerang dirinya. Hatta menerima serangan tersebut dengan ikhlas. Ia mengucapkan selamat kepada Sartono yang telah berhasil mempersatukan Partindo dengan PI. Namun, Hatta menyindir Sartono “tukang pembubar PNI”, agar nantinya tidak membubarkan persatuan Partindo dan PI.¹

Selanjutnya PNI-baru memperolok para pemimpin Partindo sebagai kelompok orang-orang yang mendukung kapitalisme Hindia Belanda. Pernyataan tersebut diperoleh dari Sartono yang menyatakan Partindo akan bergerak secara diam-diam dalam bidang ekonomi dan sosial dengan azas *self-help*. Dari pernyataan diatas Partindo lebih mementingkan *self-help* dibandingkan sikap non-kooperasi.² Namun pernyataan PNI-baru dibantah oleh Partindo. Partindo mengatakan akan bekerja lebih berhati hati dalam melakukan kegiatan di bidang ekonomi dan sosial. Lebih mengutamakan *self-help* atau menyokong diri sendiri sesuai dengan keinginan dari Sartono dan sudjudi.³

¹ *Persatuan Indonesia*. 10 April 1931.

² *Daulat Ra'jat*. 10 Oktober 1931.

³ Ingleson. *Op cit.*, hlm 193.

PNI Baru dan Partindo juga berbeda dalam menilai kapan waktu yang tepat untuk melakukan aksi massa. Perbedaan bukan masalah tentang pola pergerakan Partindo yang menganjurkan aksi massa sedangkan PNI Baru menggunakan pergerakan kader. Para pemimpin PNI Baru juga yakin pentingnya aksi massa yang sama kerasnya untuk memaksakan kemerdekaan. Perbedaan kedua partai terletak pada membaca situasi terakhir dan menilai kekuatan gerakan kaum nasionalis. Menurut pemimpin PNI Baru, aksi massa adalah tahap terakhir setelah ada massa anggota yang terdidik dan sadar politik dengan kepemimpinan kader partai yang kuat.⁴

Pertentangan muncul antara Hatta dan Sjahrir dengan Sukarno mengenai konsep persatuan dalam gerakan kaum nasionalis. Bagi Hatta dan Sjahrir, seluruh kaum nasionalis harus bersatu dalam tekad mereka untuk memaksakan kemerdekaan dari Belanda. Berbeda dengan Sukarno. Sukarno berpendapat bahwa persatuan organisasi harus segera dilaksanakan untuk mencapai pergerakan nasional yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Menurut Hatta, persatuan golongan dan organisasi adalah suatu usaha yang sia-sia, karena persatuan seluruh golongan sama saja mengorbankan azas masing-masing.⁵ Pertentangan tersebut berkaitan dengan keinginan Sukarno untuk menggabungkan kedua organisasi yang lahir dari PNI. Sukarno merasa kekuatannya dan pengaruhnya jadi berkurang karena pecahnya anggota PNI. Ia menganggap kemerdekaan tidak akan bisa dicapai jika terjadi pertentangan dalam pergerakan nasional. Usaha yang dilakukan Sukarno untuk menggabungkan kedua organisasi tersebut terlihat dalam konferensi pimpinan Partindo yang diadakan di rumah Sudjudi pada awal bulan Februari. Namun ternyata usaha tidak mendapat dukungan dan gagal. Keinginan Sukarno untuk menyatukan Partindo dan PNI-baru pun dibantah Hatta dalam surat kabar *Daulat Ra'jat* tahun 1931.

“*Persatoean* dengan Partai Indonesia tidak bisa. Politik persatoean massa-partij ialah persatoean dalam pendirian tentang Kromo dan Marhaen, tentang massa-actie. Politik persatoean jang hendak mengoempoel-ngoempoel diri atas partai politik Djawa, Soenda, Madoera, Menangkabau, Batak, Ambon d.l.l. tidak dalam garis politik mereka. Massa-actie sepanjang azas-azasnja ialah politik persatoean jang

⁴ *Daulat Ra'jat*. 10 Oktober 1931.

⁵ *Daulat Ra'jat*. 20 April 1932.

paling reel (njata). Persatoean jang didapati jalah menggerakkan (mobilisatie) ra'jat (massa) dengan strijprodgram, persatoean jang kekal dan reel (njata). Segala kesoesahan jang timboel dengan politik persatoean cultureel d.l.l. akan hilang sendiri dengan persatoean ini.”⁶

Sukarno melakukan usaha tersebut untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan antara sesama kaum nasionalis dan menghilangkan perdebatan ideologis dari kehidupan politik kaum nasionalis. Sukarno berpendapat ia tidak akan mendapatkan banyak berperan di dalam perdebatan seperti itu. Hanya dengan usaha itu ia dapat membuat dirinya penting dalam gerakan nasionalis dan memperkuat kedudukannya dalam gerakan itu. Pentingnya nilai-nilai *Jawa* dalam pemikiran Sukarno tidak menutup kenyataan bahwa ia menganjurkan persatuan adalah sebuah perhitungan yang tepat. Sukarno pun akhirnya menggabungkan diri dengan Partindo. ternyata pengambilan keputusan itu Sukarno jelas dipengaruhi oleh berita bahwa Hatta sedang dalam perjalanan kembali ke Indonesia dari negeri Belanda untuk mengambil alih kepemimpinan PNI-baru. Keduanya yakin bahwa jalan yang mereka tempuh adalah yang terbaik untuk menciptakan suatu organisasi yang mampu menekan pemerintah kolonial Belanda.⁷

Pandangan Hatta mengenai pembubaran PNI dijelaskan dalam surat terbukanya yang diterbitkan dalam *Daulat Ra'jat*. Ia menyalahkan pembubaran PNI yang dilakukan pimpinan PNI saat itu. Hatta berpendapat tindakan penangkapan terhadap pimpinan PNI adalah cara yang digunakan pemerintah kolonial untuk melemahkan dan memecah belah PNI.⁸ Pernyataan diatas didukung artikel yang berjudul “*Sekadar tentang azas, taktiek dan strategie perdjoeangan kita*” yang ditulis dalam edisi ketiga surat kabar *Daulat Ra'jat*. Penulis dalam artikel itu berinisial Sy. Penulis menanggapi permasalahan mengenai pembubaran PNI yang akhirnya pecah menjadi PNI-baru dan Partindo. Sy berpendapat bahwa pembubaran PNI yang dilakukan ketua PNI, Sartono, bukan sebuah taktik yang salah, namun tindakan yang

⁶ *Daulat Ra'jat*. 10 Oktober 1931.

⁷ Ingleson. *op cit.*, hlm 192.

⁸ *Daulat Ra'jat*. 30 September 1931.

diambil dari tempat yang sudah salah. Langkah yang salah tersebut sudah terlalu jauh dengan tidak memandang azas, semangat dan strategi PNI.⁹

Sejak Sartono mengikuti desakan dari luar, yaitu penangkapan para pimpinan PNI, adalah tindakan yang bertujuan memberikan ancaman langsung terhadap pergerakan nasional saat itu dan tidak lagi menuruti garis-garis yang ditetapkan azas dan strategi perjuangan PNI. Saat itu juga, menggambarkan bahwa pimpinan PNI tersebut sudah tidak sanggup memobilisasi keinginan rakyat, tidak percaya rakyat, menjalankan azas politik oportunistik (azas bolak-balik). Sy menambahkan, PNI sudah lepas dari rakyat Indonesia. PNI telah dibawa tersesat, terbawa menuju politik oportunis dengan menukar azas dan semangat partai. Pembubaran PNI tidak dilakukan sepanjang semangat kerakyatan PNI, tidak sesuai azas strategi PNI. Ia menganggap perkataan Pemimpin PNI, Sartono, yang menyebut *Overmacht* (keadaan memaksa) tidak lain adalah *Onmacht* (ketidakmampuan) dari PNI sendiri. Kodrat PNI yang seharusnya menjunjung tinggi azas-azasnya yang lama, yaitu rakyat biasa yang terikat dengan partai, menjadi terlepas. Dari Penjelasan di atas, Sy menyatakan bahwa Partindo tidak pantas menjadi pengganti PNI. Partindo bukan PNI yang sepanjang azas dan semangatnya, sepanjang strateginya tidak boleh dihindarkan; partai massa. Partindo boleh memakai maksud dan program-program dari PNI, tetapi semangat dan perjuangannya berbeda dari PNI.¹⁰

“... Partai Indonesia itoe boekan Partai Nasional Indonesia, jang sependjang azas dan semangatnja, sependjang strategienja ta’ boleh dihindarkan (noodzakelijk) : soeatoe massa-partai. Partai Indonesia boleh memakai maksoed dan stridprogram jang lama didalam statuennja tetapi semangatnja dan perdjandjiannja ini ada lain, lain dari semangat dan perdjandjian Partai Nasional Indonesia. Begitoe poela ia akan sampai ditempat jang lain poela dari jang dimaksoedkan oleh Partai Nasional Indonesia.”¹¹

Selanjutnya, Sy berpendapat bahwa perpecahan yang terjadi akhirnya disikapi menjadi dua sudut pandang yang berbeda yaitu sebuah kemunduran pergerakan atau memang keharusan. Selain itu, Ia memberikan kesimpulan bahwa perpecahan dalam tubuh P.N.I bukan karena perselisihan antara Hatta-Sudjadi maupun Hatta dengan Mr. Sartono. Atau karena ditangkapnya empat pimpinan PNI oleh Pemerintah

⁹ “sekadar tentang azas, taktiek dan strategie perdjoeangan kita”. *Daulat Ra’jat*. 10 Oktober 1931.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Kolonial Belanda. Hal-hal tersebut memang pemicu dari perpecahan yang terjadi dalam tubuh PNI. Menurut Sy, sudah lama terjadi perselisihan dalam tubuh PNI itu sendiri. Perselisihan tersebut tidak bisa dihindarkan karena memang sudah terkandung di dalam tubuh PNI perbedaan yang mendasar antara kaum Daulat Rakyat dengan Partindo yang memang memiliki kodrat pergerakan dan tujuan masing-masing. Jadi janganlah mencari-cari masalah karena akan membuat pergerakan nasional terhambat dengan perpecahan tersebut.¹²

Sy juga membahas sedikit mengenai PNI, azas dan tujuannya. Azas pergerakan PNI dahulu terdiri dari massa-aksi dan massa-partai. Azas massa-aksi berarti kemerdekaan hanya dapat dicapai jika segenap rakyat berusaha mencapainya. Azas yang kedua yaitu *non-cooperation* dan *self-help* yang dianggap sangat sesuai dengan massa-aksi, bukan revolusi berdarah. Dua azas tersebut menjelaskan selama ada pergerakan rakyat, maka ada pergerakan nasional yang pada konteks zaman itu berusaha melepaskan diri dari ikatan penjajahan imperlialisme. Perasaan tersebut didapat dari kehidupan yang dijalani rakyat Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Untuk mewujudkan massa-aksi harus ada massa-partai. PNI yang dianggap Sy bisa mewujudkan cita-cita untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Massa partai dituntut seratus persen mewakili kepentingan massa. Massa partai harus mempunyai semangat kerakyatan yaitu semangat persamaan demokrasi, ketulusan dan ketetapan. Dalam politik, partai tidak boleh memiliki kepentingan sendiri. Dalam pergerakan untuk mencapai kemerdekaan hanya mengenal satu tujuan: bersatunya para pemimpin dengan partai, bersatunya partai dengan rakyat.¹³

Sy juga berpendapat mengenai perseteruan antara PNI-baru dan Partindo. Ia menganggap sebenarnya perbedaan dan perselisihan yang sudah tertanam dalam tubuh PNI ternyata mengenai perbedaan taktik dan strategi perjuangan.

“Tjara-tjaranya partij bekerdja oentoek mendjalankan kewadjabannja, itoe jalah ditetapkan dengan penetapan taktiek. Taktiek itoe tergantoeng oleh keadaan waktoe, didalam mana partij haroes bekerdja. Taktiek itoe bisa bertoekar saban minggoe, djika keadaan saban minggoe bertoekar, akan tetapi taktiek itoe haroes sealamanja tinggal didalam garis jang dibatasi oleh strategie, selamanja haroes sesoeai dengan

¹² Ibid.

¹³ *ibid.*

strategie dan semangat kera'jatan. Poesat sekalian taktiek jalah Strategie dan semangat kera'jatan. Tiap-tiap langkah jang akan diambil oleh partij haroes sesoeai dengan Strategie dan semangat keraja'tan. Djika ini tidak diawasi benar-benar, maka satoe langkah jang ta' sesoeai dengan Strategie tadi, membawa partai kelapang jang lain, bererti melepaskan strategienja, dengan ia tidak sangka-sangka barangkali. Sebab itoe taktiek ada *penting benar*. Taktiek bisa mendjadi sama dengan satoe perselisihan azas. Inilah koentjinja pemisahan dari kaoem „golongan merdeka” dengan Partai Indonesia.”¹⁴

Hatta kemudian mengirim Sjahrir kembali ke Indonesia setelah Ia menyadari bahaya perpecahan yang akan membawa Partindo kepada hubungan yang kritis antara kedua partai. Dalam suratnya kepada Maria Duchateau pada tanggal 4 Januari 1932 yang ditulisnya hanya beberapa hari setelah tiba di Indonesia.¹⁵ Sjahrir menyatakan bahwa perpecahan yang terlalu parah dengan Partindo akan merugikan PNI Baru.¹⁶

Pada tanggal 15–17 Mei 1932, Partindo mengadakan kongres pertamanya di Jakarta. Tujuan dari kongres ini diselenggarakan untuk menyempurnakan anggaran dasar partai dan peraturan-peraturan lainnya. Sebuah komisi dibentuk untuk mempersiapkan sebuah rencana dasar keuangan bagi partai kedalam tiga bagian, yaitu dana untuk propaganda, dana untuk studi, dana untuk membantu para pemimpin yang terkena hukuman karena aksi-aksi yang dilakukannya. Selain itu dibentuk komisi lainnya yaitu komisi propaganda (Manadi dan Mohammad Yamin), untuk menyiapkan rencana bagi usaha-usaha partai dalam pendidikan nasional (Amir Syarifudin), untuk gerakan *Swadeshi* (Sartono), dan untuk penerbitan surat kabar harian (Ali Sastroamidjojo). Selain pembahasan-pembahasan diatas, kongres juga membicarakan mengenai masalah hubungan partai dengan PPPKI. Sartono dengan jelas menyatakan bahwa ia sama sekali tidak ingin Partindo bergabung dengan PPPKI karena PPPKI melarang partai anggota untuk saling mengkritik.¹⁷

Kongres juga membahas pentingnya *Swadeshi* sebagai prinsip dasar dalam program partai. Dalam kongres, Sartono berpidato bahwa ia membantah pernyataan PNI-baru adalah penerus sebenarnya PNI. Sartono menjelaskan bahwa Partindo adalah sebuah partai politik yang menghendaki kemerdekaan penuh dan mendasarkan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rudolf Mrazek. (1996). *Sjahrir politik dan pengasingan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor. hlm. 149.

¹⁶ Ingleson, *op. cit.*, hlm 190-191.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 194.

programnya pada empat prinsip: menentukan nasib sendiri, kebangsaan Indonesia, menolong diri sendiri, dan demokrasi. Menurut Sartono, perbedaan terpenting antara gerakan kemerdekaan Indonesia dan aksi kaum sosialis (dimaksudkan untuk menyebut PNI-baru), adalah Partindo terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, lapisan atas dan bawah, kaya dan miskin, dan merupakan partai bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan partai untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu. Partindo menolak perjuangan kelas dan sebagai gantinya mendasarkan dirinya pada perjuangan rasial dalam rangka mencapai kemerdekaan penuh. Partindo adalah partai yang demokratis, non-kooperatif dan radikal, yang dalam kegiatan ekonomi dan sosialnya berusaha menyiapkan negeri ini untuk merdeka. Dalam pidatonya, Sartono juga banyak menyinggung masalah perpecahan dalam gerakan kaum nasionalis yang dipandang hanya akan menguntungkan kaum reaksioner dan imperialis. Pada kongres PNI-baru tanggal 23 – 26 Juni 1932, Sukarno juga hadir di kongres ini. Pada kongres ini, Sukarno menegaskan kembali bahwa selama darah masih mengalir dalam tubuhnya, Ia akan terus mengusahakan persatuan dalam gerakan nasionalis.¹⁸

4.2 Sikap Partindo dan PNI-baru mengenai Ordonansi Sekolah liar

Telegram Ki Hadjar Dewantara terhadap Gubernur Jenderal De Jonge pada tanggal 1 Oktober 1932 yang menjadi titik permulaan aksi protes pergerakan nasional terhadap *Toezieth Particulier Onderwijs*.¹⁹ Pembahasan pertama kali adalah sikap dari Partindo mengenai permasalahan Ordonansi Sekolah Liar. Tanggapan atau pandangan Partindo dinyatakan dalam *Persatoean Indonesia* terhadap pelaksanaan Ordonansi Sekolah Liar dan aksi penentangannya muncul pertama kali pada edisi ganda tanggal 20-30 Oktober 1932. Tema besar edisi *Persatoean Indonesia* ini membahas isu mengenai Ordonansi Sekolah Liar. Tulisan pertama merupakan tajuk utama yang berjudul “Pergerakan Indonesia dan Sekolah-Sekolah Boeas”, ditulis oleh redaksi yang berinisial P.²⁰ Partindo menilai bahwa Ordonansi Sekolah Liar

¹⁸ Ibid. hlm. 195.

¹⁹ *Toezieth Particulier Onderwijs* atau di sebut sebagai Ordonansi Sekolah Liar.

²⁰ “Pergerakan Indonesia dan Sekolah-Sekolah Boeas”, *Persatoean Indonesia*, 20-30 Oktober 1932. Redaksi yang berinisial P. ini adalah Njonoprawoto, hoofdredacteur Persatoean Indonesia, seperti yang

yang ditetapkan oleh pemerintah yang sedang dalam kondisi kalut akibat tekanan dari berbagai pihak yang disebut oleh Partindo sebagai pihak “sana” dan “sini”. Tekanan tersebut muncul akibat kebijakan penghematan pemerintah, baik di bidang pendidikan maupun pengurangan gaji pegawai negeri, dan sikap campur tangan pemerintah terhadap urusan internal pabrik-pabrik gula serta sistem penjualannya. Partindo menilai bahwa pada akhirnya, rakyat pribumi yang akan menanggung kerugian berupa pelarangan sekolah-sekolah partikelir yang didirikan oleh rakyat pribumi secara mandiri.²¹

Dalam artikel tersebut menyebutkan beberapa keburukan yang dinyatakan pemerintah kolonial terhadap sekolah-sekolah partikelir tak bersubsidi. Keburukan-keburukan tersebut antara lain tempat pengajaran yang tidak sehat, pengajar yang tidak berkualitas, biaya pendidikan yang tidak sepadan dengan pelajaran yang diberikan, nama sekolah yang tidak sesuai dengan kualitas pengajarannya, dan penggunaan nama sekolah pemerintah kolonial tetapi kualitas pengajarannya tidak sama dengan sekolah pemerintah kolonial. Pendapat pemerintah kolonial itu disanggah oleh Partindo dalam artikel tersebut yaitu bahwa sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah lingkungan tempat tinggal rakyat Indonesia di desa-desa yang tingkat kesehatannya justru lebih rendah dibandingkan dengan tempat-tempat sekolah partikelir tak bersubsidi yang akan diberantas itu.²²

Partindo juga menilai bahwa anggapan pemerintah kolonial mengenai sekolah-sekolah partikelir tak bersubsidi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum negeri jajahan adalah tidak benar. Anggapan pemerintah kolonial tersebut dinilai oleh Partindo hanya sebagai alasan untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah kolonial.²³ Dalam artikel *Persatoean Indonesia* tersebut juga menjelaskan apabila ordonansi tersebut benar-benar sepenuhnya diberlakukan akan membahayakan kehidupan rakyat Indonesia. Pelaksanaan ordonansi ini akan mematikan daya upaya rakyat Indonesia dalam lapangan sosial

tertulis dalam bagian atas lembar pertama surat kabar.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

dan ordonansi tersebut memberikan kewenangan yang tak terbatas bagi kepala daerah yang bertugas mempertimbangkan pemberian izin pendirian sekolah dan pengajaran. Dalam kalimat terakhir artikel tersebut mengenai Ordonansi Sekolah Liar, Partindo menyatakan dukungannya terhadap penolakan ordonansi itu.

“Partai Indonesia djoega soedah menjetoedjoei sikap Ki Hadjar Dewantara itoe. Karena boekanlah ordonnantie ini ditoedjoeikan kepada sebagian ketjil daru rakjat Indonesia, melainkan kepada segala bagian. Dan djika ordonnantie ini berdjalan, maka akibatnja tidak lain dan tidak boekan jalah: Masjarakat Indonesia jang soedah roesak lahir dan bathinnja, akan bertambah roesak dan achirnja batinnja masjarakat kita akan moesna sama sekali. Oleh sebab itoe kami berseroe: Insjafkanlah dan pertahankanlah akan hak jang soetji, soepaja djanganlah diinjajak-indjakkan.”²⁴

kemudian mengenai pidato “*Pemandangan Tentang Pidatonja*” dari Sartono selaku pimpinan Partindo mengenai ordonansi ini.²⁵ Artikel tersebut menyebutkan bahwa sebenarnya dalam peraturan pemerintah untuk rakyat pribumi terdapat kewajiban pemerintah kolonial untuk memberikan pengajaran kepada penduduk asli. Namun pada kenyataannya, pemerintah kolonial tidak dapat memenuhi kebutuhan itu. Pengeluaran pemerintah kolonial untuk pendidikan penduduk pribumi jauh lebih rendah daripada negara yang lain. Oleh karena itu, banyak rakyat pribumi yang buta huruf. Anggaran pengeluaran pemerintah memperlihatkan jurang yang sangat lebar antara pengeluaran untuk pendidikan bumiputra dan pengeluaran kepentingan pemerintah kolonial yang lainnya. Partindo kemudian mengemukakan pendapat yang cukup mendetail mengenai ordonansi pendidikan baru dan memperlihatkan perbandingan dengan ordonansi pendidikan partikelir sebelumnya. Keterangan tersebut terdapat dalam pidato Sartono yang berjudul “*Ordonnantie Sekolah-Sekolah Boeas*”.²⁶ Partindo kembali menekankan bahwa ordonansi ini akan mematikan kemerdekaan rakyat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi cita-cita Indonesia.²⁷

G.R. Pantouw, adalah redaktur pengganti pimpinan redaksi *Persatoean Indonesia* sebelumnya, Njonoprawoto. Pantouw menulis artikel yang berjudul

²⁴ *Ibid.*

²⁵ “Pemandangan Tentang Pidatonja”, *Persatoean Indonesia*, 20-30 Oktober 1932.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *ibid.*

“Politik Kolonial dan Beban Ra’jat Indonesia”.²⁸ Dalam artikel tersebut, ia menganalisis kondisi perekonomian dengan menuntut pemerintah kolonial untuk menerapkan kebijakan penghematan di beberapa bidang, seperti anggaran pendidikan dan gaji pegawai negeri. Kebijakan penghematan ini kemudian diikuti oleh kebijakan untuk menaikkan pajak, seperti tembakau dan garam. Hal itu menurutnya akan menambah beban hidup rakyat pribumi. Pernyataan lainnya Pantouw menyatakan jika pemerintah kolonial berani mengancam kebathinan-timoer maka rakyat akan melawannya. lebih lanjut dijelaskan, yaitu:

“Akan tetapi kalau ada jang mengantjam dengan terang-terangan kebathinan-timoer, maka dengan segeralah berdengoeng soeara bersama jang mengatakan: Ingatlah! Berbaliklah! Memang, tak lain dari pada sikap seperti inilah jang menjinari masjarakat timoer. Rakjat Indonesia sebagai sebagian daripada masjarakat timoer seharoesnjalah menginsjafkan roch dan njawa ketimoeran ini dan membela kebathinan timoer itoe disamping kewadjibannja oentoek menoentoet Indonesia Merdeka.”²⁹

Kemudian Partindo melalui Pantouw menulis tajuk rencana berjudul “*Lakon Pendahoeloean*” yang berisi tanggapan terhadap keputusan Konferensi PPPKI³⁰ di Yogyakarta, yang akan memutuskan untuk mendukung secara penuh aksi penentangan Ordonansi Sekolah Liar. Pantouw melihat bahwa dengan kesepakatan itu, pergerakan nasional dan rakyat pribumi seutuhnya sudah terang-terangan melihat adanya ancaman yang berarti terhadap pendidikan rakyat.³¹

Masalah Ordonansi Sekolah Liar kembali dikemukakan Partindo dalam *Persatoean Indonesia* edisi akhir tahun yang berjudul “*Kalau tahoen berganti!*”.³² Artikel tersebut berisi kilas balik perjuangan nasional selama tahun 1932, khususnya

²⁸ G.R. Pantouw, “Politik Kolonial dan Beban Rakjat Indonesia”, *Persatoean Indonesia*, 10 November 1932.

²⁹ *ibid.*

³⁰ Berita mengenai konferensi ini sebelumnya telah di terbitkan dalam *Persatoean Indonesia* dalam tulisan Muhammad Yamin, “Menoedjoe Kongres Pengadjaran dan Pendidikan Indonesia”, *Persatoean Indonesia*, 20-30 Oktober 1932. Artikel tersebut berisi anjuran Muhammad Yamin untuk segera mengadakan konferensi pengajaran dan pendidikan Indonesia. Selain itu, Muhammad Yamin juga berpendapat bahwa sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan kepada rakyat pribumi. Anjuran Muhammad Yamin untuk mengadakan kongres dilatarbelakangi oleh keinginannya akan adanya persatuan aliran dan tujuan yang menaungi pendidikan rakyat. Persatuan itu sangat penting pada saat pendidikan rakyat sedang terancam oleh peraturan pemerintah kolonial.

³¹ “Lakoen Pendahoeloen”, *Persatoean Indonesia*, 20 November 1932.

³² “Kalau Tahoen Berganti!”, *Persatoean Indonesia*, 20 November 1932.

perjuangan yang dilakukan oleh Partindo. Sepanjang kilas balik tersebut, aksi perlawanan terhadap Ordonansi Sekolah Liar dianggap memperluas pengaruh terhadap pergerakan radikal seperti yang diusung oleh Partindo, yaitu:

“Jang perloe diselidiki lebih djaoeh jalah timboelnja ordonnansi sekolah liar, jang berhoeboengan dengan pesat madjoenja pergerakan radikal, jaitoe teroetama Partindo. Dalam waktu jang pendek ini Partindo soedah dapat mengibarkan bendera merah-poetih-banteng-Indonesia hampir diseloeroeh tanah Indonesia; dan sebagai reaksi dari pihak sana jang telah mendapat sanksi dari pemerintah Hindia-Belanda, maka ditimboelkan satoe ordonnansi jang akan merantainkan pergoeroean kebangsaan seoemoemnja dan semangat banteng-Indonesia choesoesnja.”³³

Partindo dalam artikel ini juga menyinggung posisi kaum kooperator yang mayoritas berada dalam *Volksraad*. Kaum kooperator menyatakan akan meninggalkan *Volksraad* apabila ordonansi tersebut tidak dibatalkan. Dalam menyikapi pernyataan dari organisasi yang berada di *Volksraad*, Partindo meragukan niat kaum kooperator karena dinilai belum teruji dalam kondisi yang sebenarnya apabila ordonansi tersebut tidak dibatalkan. Pernyataan tersebut menyiratkan adanya keinginan Partindo untuk memperkuat garis nonkooperator dengan adanya momen perlawanan ini. Partindo mengharapkan sikap teguh kaum kooperator dalam menghadapi akibat dari perlawanan ini, yaitu bersedia meninggalkan *Volksraad*. Tahun 1933 dinilai menjadi sebuah pembuktian apakah keputusan dalam konferensi PPPKI di Mataram akan dijalankan oleh segenap anggotanya.³⁴

Sementara itu, Partindo kembali membahas mengenai keadaan perekonomian Indonesia yang sulit dalam edisi pertama *Persatoean Indonesia* bulan Januari 1933 berjudul “*Awan Gelap*” yang ditulis oleh redaksi bernama samaran *Ana-i-guru*.³⁵ Seperti yang sudah disebutkan pada artikel sebelumnya, kondisi seperti ini membuat pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan yang menambah beban rakyat. Namun demikian, di sisi lain pemerintah kolonial tetap mengeluarkan biaya yang banyak untuk kepentingan pertahanan di negeri jajahan. Hal ini menurut Partindo dilakukan tanpa memikirkan kepentingan rakyat jajahan, terutama dari golongan rakyat pribumi. Partindo beranggapan bahwa isu Ordonansi Sekolah Liar hanya dijadikan penarik perhatian rakyat Indonesia ke satu penjuru saja, sedangkan di penjuru lainnya

³³ *ibid.*

³⁴ *ibid.*

³⁵ “*Awan Gelap*”, *Persatoean Indonesia*, 10 Januari 1933.

pemerintah kolonial secara diam-diam menaikan berbagai macam pajak yang akan membebani rakyat. Di saat seperti itu, Partindo mengingatkan kepada rakyat untuk tidak hanya memperhatikan masalah ordonansi tersebut saja, tetapi semua masalah umum yang sedang terjadi di Indonesia.³⁶

Aksi penentangan Ordonansi Sekolah Liar yang diperjuangkan oleh kaum kooperator di Volksraad mengundang tanggapan dari Partindo. Partindo dalam tulisan *Ana-i-guru* menanggapi rancangan ordonansi yang diajukan oleh R.A.A. Wiranatakoesoema untuk menggantikan Ordonansi Sekolah Liar.³⁷ Partindo menilai bahwa isi rancangan tersebut tidak jauh berbeda dengan isi ordonansi yang sedang diprotes tersebut. Hal tersebut menurut Partindo masih dianggap berbahaya bagi sekolah-sekolah swasta milik rakyat Indonesia.³⁸ Selanjutnya, Partindo melalui *Ana-i-guru* menyatakan harapannya agar ordonansi tersebut diubah lebih mendalam lagi karena di akhir tulisan ia menuliskan, "... Kami mengeloearkan pengharapan, moedah-moedahan ordonnansi ini dibitjarakan dengan fikiran tenang dan dengan alon-alon sadja."³⁹

Kemudian, pembahasan berikutnya adalah sikap dari PNI-baru mengenai Ordonansi Sekolah Liar pertama kali dimuat dalam *Daulat Ra'jat* edisi Oktober 1932. Artikel itu berjudul "*Soal Onderwijs*".⁴⁰ Dalam artikel ini, PNI-baru memberikan gambaran dari kondisi pendidikan di Jepang, kondisi pendidikan rakyat jajahan di Filipina, sampai dengan pembahasan kondisi pendidikan rakyat jajahan di Hindia Belanda yang semakin terpuruk dengan adanya ordonansi pendidikan yang baru.⁴¹

Kondisi pendidikan rakyat jajahan di Hindia Belanda digambarkan jauh berbeda dengan kondisi pendidikan rakyat jajahan di Filipina. Pada awal abad ke-20 digambarkan bahwa penduduk pribumi di Hindia Belanda lebih dari 93 % masih dalam kondisi buta huruf dan tulis. Artikel tersebut menyatakan bahwa rakyat

³⁶ *ibid.*

³⁷ *Persatoean Indonesia*, 20 Februari 1933.

³⁸ *ibid.*

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ "*Soal Onderwijs*", *Daulat Ra'jat*, 10 Oktober 1932.

⁴¹ *Daulat Ra'jat* dalam artikel tersebut menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan suatu bangsa. Lihat: *Ibid.*

pribumi yang berjumlah 50 juta jiwa hanya diberikan 16.158 sekolah, sehingga yang mendapat kesempatan hanya sekitar 1.222.459 orang saja. sebenarnya pemerintah kolonial tidak sepenuhnya mengeluarkan biaya karena sebagian dari pendidikan rakyat pribumi dibiayai dan dipelihara oleh desa setempat. PNI-baru juga memberikan gambaran dari total jumlah pemuda pribumi yang berusia antara 5 sampai 15 tahun, hanya 15,2 % yang mendapatkan kesempatan bersekolah. kebutuhan pendidikan rakyat pribumi tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah kolonial. Oleh karena itu organisasi-organisasi pribumi berusaha menampung mereka yang ingin bersekolah melalui rumah-rumah sekolah yang dikembangkan seperti Taman Siswa dan lainnya. Kondisi pendidikan rakyat pribumi yang parah itu kemudian bertambah sulit akibat diberlakukannya peraturan baru yaitu Ordonansi Sekolah Liar. Munculnya ordonansi tersebut menurut PNI-baru merupakan sikap yang wajar dari ketakutan pemerintah kolonial terhadap pergerakan-pergerakan nasional yang revolusioner muncul sebelumnya. menurut PNI-baru, sikap reaksioner dari pemerintah kolonial mengenai munculnya ordonansi akan menguntungkan pergerakan nasional sebab pemikiran rakyat pribumi akan semakin terbuka terhadap pergerakan nasional terutama yang mengarah kepada gerakan nonkooperasi.⁴²

Mohammad Hatta menulis sebuah artikel yang berjudul “*Non-Cooperatie Boekan Non-Actie*”.⁴³ dalam artikel ini, Hatta memberikan pembahasan mengenai sikap pergerakan non-kooperasi terhadap Ordonansi Sekolah Liar. Hatta menerangkan pergerakan non-kooperasi bukan berarti tidak bereaksi apabila pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah kebijakan yang merugikan rakyat pribumi. Hatta sendiri menilai bahwa ordonansi ini bersifat elastis. Maksudnya diberlakukannya ordonansi berarti memberi kesempatan yang luas bagi pemerintah kolonial untuk menindas sekolah-sekolah pribumi. Kemudian mengenai sikap gerakan nonkooperasi terhadap munculnya ordonansi baru ini, Hatta menekankan non-kooperasi dari awal adalah aksi dan bukan non aksi. Aksi kita menentang segala

⁴² *ibid.*

⁴³ Mohammad Hatta, “Non-Cooperatie Boekan Non-Actie”, *Daulat Ra'jat*, 10 November 1932.

halangan yang membatasi langkah kita.⁴⁴

Selanjutnya Hatta menjelaskan secara mendetail mengenai pergerakan non-kooperasi yang pada dasarnya menarik garis pemisah antara pribumi dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebagai bentuk nyata dari pemisahan tersebut, Hatta menjelaskan bahwa gerakan non-kooperasi menolak Volksraad yang dianggap sebagai alat pemerintah kolonial agar status negeri jajahan tetap bertahan selamanya. Namun demikian Hatta mengungkapkan bahwa sikap penolakan tersebut bukan berarti gerakan nonkooperasi tidak bereaksi terhadap tindakan pemerintah yang menyerang kepentingan rakyat pribumi. Pada akhir tulisannya, Hatta kembali menyatakan bahwa aksi penentangan terhadap Ordonansi Sekolah Liar merupakan bagian dari gerakan nonkooperasi.⁴⁵

Kemudian PNI-baru dalam *Daulat Ra'jat* terdapat artikel yang berjudul “Menentang Ordonnantie Sekolah Liar” yang ditulis oleh nama samaran *Real Politiker*.⁴⁶ Artikel tersebut pada dasarnya menanggapi keputusan PPPKI yang mendukung aksi massa dalam proses menentang Ordonansi Sekolah Liar. *Real Politiker* menggambarkan aksi-aksi menentang Ordonansi Sekolah Liar sudah menembus organisasi-organisasi pribumi dari berbagai golongan termasuk golongan yang sebelumnya tidak terjun ke dalam dunia politik. Golongan-golongan tersebut seperti Muhammadiyah, Taman Siswa dan kelompok kooperasi seperti PPPKI dan organisasi lainnya. Dalam artikel tersebut, *Real Politiker* mengajak kaum nonkooperasi harus ikut serta dalam usaha menentang Ordonansi Sekolah Liar untuk membangkitkan perhatian politik di kalangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kaum nonkooperasi seperti PNI-baru harus memanfaatkan momen ini dengan mengajarkan rakyat pribumi untuk bergerak dan berjuang secara politik.⁴⁷

Tanggapan PNI-baru mengenai Ordonansi Sekolah Liar juga disampaikan oleh Siswarahardja yang menulis sebuah artikel berjudul “11 Desember 1932”.⁴⁸

⁴⁴ *ibid.*

⁴⁵ *ibid.*

⁴⁶ “Menentang Sekolah Liar”, *Daulat Ra'jat*, 30 November 1932.

⁴⁷ *ibid.*

⁴⁸ “11 Desember 1932”, *Daulat Ra'jat*, 20 Desember 1932.

Artikel tersebut berisi tanggapan redaksi atas pelaksanaan massa-actie menentang Ordonansi Sekolah Liar yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1932, khususnya di sebuah rapat umum yang diadakan oleh “kaoem kiri” di Surabaya.⁴⁹ Rapat umum yang digelar di Surabaya pada akhirnya dibubarkan, namun artikel tersebut menyatakan kepuasannya karena pengaruh “kaoem kiri” dalam rapat umum tersebut mengena ke dalam sanubari rakyat.⁵⁰

Pada akhir artikel ini, Siswarahardja menegaskan kembali bahayanya ordonansi tersebut apabila dilaksanakan sepenuhnya. Dan memberikan sedikit nilai ancaman terhadap rakyat pribumi yang setuju terhadap ordonansi tersebut. Seperti yang dituliskan, yaitu:

“Onderwijs-ordonnantie itoe hanja dapat memberi djalao oentoek pesatnja, koloniaal onderwijs, mendjalarnja pendidikan jang dapat merobohkan “goenoeng kebangsaan”. Dari itoe patoet sekali bila orang-orang di sini jang setoedjoe dengan adanja Onderwijs-ordonnantie itoe, dikeloearkan dari oemat kita, tiada disetoedjoei mengakoe Indonesiers; sebab memberi maloe!”⁵¹

Pertentangan PNI-baru terhadap Ordonansi Sekolah Liar lainnya dikemukakan oleh penulis dengan nama samaran *Goeroe Marhaen* menulis sebuah artikel yang berjudul “*Ordonansi Sekolah Liar*”.⁵² Artikel tersebut pada dasarnya kembali mengulas secara umum pengertian Ordonansi Sekolah Liar dan bahayanya serta perkembangan aksi penentangan rakyat bumiputra yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakannya. Sama halnya seperti tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan ini juga menyatakan bahwa Ordonansi Sekolah Liar sepenuhnya sudah ditolak sebagian besar masyarakat pribumi, baik berasal dari golongan yang berpolitik maupun yang tidak berpolitik, kaum kooperator dan nonkooperator, sampai kepada lapisan bawah masyarakat pribumi. Guru Marhaen menuliskan bahwa momen perlawanan yang menyebar kepada masyarakat luas pribumi merupakan gerakan rakyat menuju tahapan berikutnya yakni menentang penjajahan dan menuju kemerdekaan bangsa pribumi.⁵³

⁴⁹ *Daulat Ra'jat* menyebut pergerakan nonkooperasi adalah “kaoem kiri”, sedangkan untuk pergerakan berhaluan kooperasi dan pergerakan tidak radikal lainnya adalah “kaoem kanan”.

⁵⁰ *ibid.*

⁵¹ *ibid.*

⁵² “Ordonansi Sekolah Liar”, *Daulat Ra'jat*, 10 Januari 1933.

⁵³ *ibid.*

Pembahasan mengenai hubungan antara PNI-baru dengan Ordonansi Sekolah Liar dibahas dalam artikel berjudul “*Pendirian Revoloesioner*” yang ditulis oleh penulis berinisial D.S.⁵⁴ Di dalam artikel tersebut disebutkan Ordonansi Sekolah Liar memberikan jalan bagi PNI-baru untuk menyadarkan rakyat pribumi akan kondisi yang terjajah. Berikut penjelasannya, yaitu:

“Soal ordonnantie liar menentang sekolah partikoelir (lebih benar: kebangsaan!!!) jang dihadiahkan pada ra’jat Indonesia, roepanja dan terboekti berfaedah benar bagi pergerakan kera’jatan dan memperkoeatkan benteng nasional kita dalam aksinja menentang lawan. Kenjataan ini dan tindakan-tindakan reaksi terhadap pada perhimpoean P.N.I., jang mendjadi motor dan obor ra’jat dalam perdjalan kearah kesentausaan dan keselamatan, keadaan ini semoea tidak mengedjoetkan dan mengherankan kita, oleh karena dari systeem kolonial semoea tindakan, jang ditoedjoekan pada memperkoeat dan mengekal perkolonialan dapat diharap, melainkan hanja menegoehkan semangat perdjoeangan dan mempertadjam sikap, haloean dan roepa perdjoeangan kemerdekaan kita.”⁵⁵

Inoe Perbata Sari menulis sebuah artikel yang berjudul “*Pendidikan atau Onderwijs Nasional; Arti dan Goenanja*”.⁵⁶ Artikel itu membicarakan kepentingan pendidikan yang berbeda antara negara yang bangsanya merdeka dan di negara yang bangsanya terjajah. Di negara yang bangsanya merdeka, Inoe Perbata Sari mengatakan bahwa pendidikan secara umum diutamakan untuk memberikan keahlian kepada warganya agar bisa mencari pekerjaan setelah ia lulus nanti. Hal ini ia katakan terkait untuk mencapai kemajuan negara tersebut, dimana kemajuan negara ditentukan dengan kemajuan serta kemakmuran rakyatnya. Sedangkan untuk rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap negaranya diselipkan sedikit demi sedikit dalam setiap pelajaran namun tidak terlalu ditonjolkan. Ia juga mengatakan bahwa anak-anak pelajar di negeri yang merdeka masih mempunyai banyak waktu untuk memikirkan bangsanya sewaktu ia telah dewasa.⁵⁷

Berbeda dengan pendidikan di negeri jajahan, Inoe Perbata Sari menyatakan bahwa di negeri jajahan seperti Hindia Belanda, pendidikan yang diberikan secara resmi oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan penjajahan. Rakyat pribumi diajarkan hanya untuk menjadi buruh dengan upah yang murah dimana dalam setiap

⁵⁴“Pendirian Revolusioner”, *Daulat Ra’jat*, 30 Januari 1933.

⁵⁵ *ibid.*

⁵⁶ Inoe Perbata Sari, “Pendidikan atau Onderwijs Nasional; Arti dan Goenanja”, *Daulat Ra’jat*, 10 Februari 1933.

⁵⁷ *Ibid.*

pengajarannya rakyat pribumi semakin dijauhkan dari rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsanya. Inoe Perbata Sari mengatakan bahwa hal ini sejalan dengan kepentingan terselubung penjajah yang menginginkan rakyat yang dijajahnya tetap dalam kondisi kebodohan. Ia juga memberikan perbandingan anggaran dan kesempatan pendidikan yang diberikan pemerintah kolonial terhadap anak-anak bumiputra sangat timpang dengan anak-anak Belanda atau Eropa lainnya di Hindia Belanda.⁵⁸

Kondisi yang demikian membuat rakyat pribumi membuat lembaga pendidikannya sendiri dimana dalam sekolah tersebut tidak hanya diajarkan ilmu dan wawasan umum tetapi juga rasa kebatinan yang membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsanya, seperti yang dituliskan dalam kutipan di bawah ini:

“Pendidikan bagi anak-anak kita selainnja oentoek menambah pengetahoean dan persiapan oentoek perdjoeangan di dalam pergaoelan hidoep oentoek mentjari nafkah adalah teroetama sekali haroes mendapat pendidikan kebathinannja, jaitoe ia haroes mempoenjai semangat tjinta kepada bangsa dan tanah airnja; satoe pembela bangsa haroes poela mempoenjai semangat jang mendjaoehi dari pada semangat perboeroehan atau perboedakan. Kebathinan anak-anak kita dari ketjil haroes didjaga, soepaja kalau besar bisa mendjadi satoe manoesia jang bergoena bagi pergaoelan bangsanja, bisa mendjadi pembela bangsa didalam kemadjoean ra’jatnja.”⁵⁹

Inoe Perbata Sari kemudian menyebut bahwa upaya ini mendapat hambatan dari ordonansi sekolah partikelir yang baru itu. Pada akhir naskah pidatonya, Ia kembali menyerukan untuk menolak ordonansi tersebut.

“Tolaklah bahaja jang akan mengantjam pendidikan dan pergoeroean anak-anak kita ini jang mana bisa berbahaja bagi kemadjoean dari bangsa kita karena kalau sampai sekolah-sekolah kita banjak jang tertoeoep, tjilakalah anak-anak kita itoe karena tidak dapat kesempatan oentoek mendidik anak-anak kita sebab sekolah-sekolah pemerintah sendiri tidak tjoeoep dan tidak bisa memoeaskan keboetoehan Ra’jat kita jang banjak itoe.”⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

4.3 Pertentangan Antara Partindo dan PNI-baru Mengenai Hatta dan *Tweede Kamer*

pada tanggal 8 Desember 1932, timbul konflik antara Partindo dan PNI-baru mengenai telegram yang diberikan kepada Hatta dari OSP Belanda⁶¹. Isi dari telegram tersebut adalah permintaan dari pihak OSP kepada Hatta agar menerima pencalonan dirinya menjadi anggota parlemen dalam *Tweede Kamer*. Keadaan tersebut dijadikan kesempatan bagi kelompok Partindo untuk menyerang pihak PNI-baru. Dalam *Persatoean Indonesia*, Partindo menyatakan yaitu:

“Berita pers telah petjah, bahwa pengandjoer Pendidikan Nasional Indonesia Drs. Moh. Hatta soedah diminta mendjadi anggauta didalam tweede kamer, badan perwakilan bangsa imperialis Belanda. Dengan berita ini soedah terboekti bahwa antara Moh. Hatta dan golongan sosialis merdeka atau onafhankelijken jang meminta Moh. Hatta djadi wakil didalam badan imperialis sedjati, ada soeatoe perhoeboengan jang terang. Dalam berita tadi ada djoega dikatakan bahwa Moh. Hatta telah menerima permintaan ini. Disini ada kelihatan bahwa kampioen non-cooperatie soedah soeka masoek didalam badan perwakilan bangsa imperialis Belanda ...”⁶²

Keadaan tersebut diperparah dengan berita yang dimuat *Aneta*⁶³ pada tanggal 9 Desember 1932 yang memberitakan bahwa Hatta telah menjawab dan menerima tawaran dari OPS untuk menjadi anggota dalam *Tweede Kamer*.⁶⁴ Tawaran tersebut mengakibatkan Hatta dan PNI-baru mendapat serangan keras dari Partindo yaitu dari Sukarno dan Amir Sjarifuddin karena dianggap telah meninggalkan prinsip non-kooperasi dan front persatuan “sini” menentang front “sana”.⁶⁵

Dalam mengomentari tawaran dari OPS mengenai pencalonan dirinya menjadi anggota *Tweede Kamer*, Hatta menyatakan setelah Ia menerima tawaran dari OPS perihal pencalonan dirinya, Ia menyatakan “... sebagai anggauta dari P.N.I. tentoe sadja ia tidak dapat memoetoeskan sendiri dalam hal ini, sebab itoe haroes menunggu kepoetoesan dari P.O. lebih dahoeloe ...”.⁶⁶ Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1932, Hatta berangkat ke Bandung untuk membicarakan masalah ini

⁶¹ *Onafhankelijke Socialische Partij* (Partai Sosialis Merdeka di Belanda). Ingleson, *op. cit.*, hlm. 220.

⁶² “Topengnja Drs. Moh. Hatta terboekta! Pemimpin P.N.I. maoe djadi lid tweede kamer! Awas Ra’jat Indonesia!”, *Persatoean Indonesia*, 10 Desember 1932.

⁶³ *Aneta* adalah Kantor Berita Hindia Belanda. Ingleson, *op. cit.*, hlm. 220.

⁶⁴ Majelis penyiaran PNI, “Politik”. *Daulat Ra’jat*. 20 Desember 1932.

⁶⁵ Ingleson, *op. cit.*, hlm. 220.

⁶⁶ “Politik”. *Daulat Ra’jat*. 20 Desember 1932.

kepada pengurus umum PNI-baru dan menghasilkan keputusan bahwa Hatta harus menolak tawaran yang tersebut.⁶⁷

Keputusan mengenai penolakan Hatta terhadap tawaran OSP diberitakan dalam *Daulat Ra'jat* tanggal 20 Desember 1932. Dalam edisi tersebut terdapat potongan balasan telegram Hatta kepada De Kadt, yaitu:

“menoeroet principe tidak ada halangan kalau saja seandainya doedoek besidang dalam Tweede Kamer. Poen P.O. P.N.I., jang mempertimbangkan permintaan engkau, mempoenjai kejakinan, bahwa doedoek bersidang didalam satoe Parlement jang sempoerna tidak berlawanan dengan politik non cooperation. Akan tetapi dalam practijk, djika seandainya saja terpilih, saja toch tidak bisa menerima, karena saja oentoek perdjjuangan diIndonsia. Djadinnja candidatuur saja tidak ada berarti, hanja berharga sebagai demonstratie.”⁶⁸

Untuk menjawab pernyataan Partindo dalam *Persatoean Indonesia* mengenai tawaran pencalonan dirinya menjadi anggota *Tweede Kamer*, Hatta menyatakan:

“djadi djoega lantaran ma'loemat ini haroes dianggap sebagai tindakan opisil dari pehak sana. Bagi kita kaoem P.N.I. (itoe pendidikan) boekan rahasia lagi, bahwa di pehak itoe orang telah kangen benar oentoek dapat menoendjoekkan kedongkolannja terhadap P.N.I. (itoe pendidikan). ... Dan djangan loepa bahwa djika maoe mengadakan serangan terhadap Partai lain, haroes diperhitoengkan benar-benar sekalian kelangsoengannja dari tindakan demikian, djangan nanti hasil jang tidak dimaksoedkan seperti meroesak diri sendiri dan meroesak pergerakan Ra'jat seoemoemnja (ini toch tidak dimaksoedkan?) jang pada waktoe ini boetoe kepada pimpinan oentoek mempertahankan nasibnja jang tiap hari bertambah djelek! ... memang aneh djalan politik di koloni Partai Indonesia (Partindo).”⁶⁹

Selanjutnya, konflik dari masalah pencalonan Hatta sebagai anggota *Tweede Kamer* berlanjut kepada adu argumen mengenai arti dari non-kooperasi yang dikemukakan oleh Sukarno dan Hatta. Menurut Sukarno, seorang non-kooperator melanggar azasnya apabila masuk dalam *Tweede Kamer*. Kemudian Sukarno menambahkan bahwa kaum Partindo menjalankan politik non-kooperasi yang berprinsip menolak kursi yang ditawarkan di *Volksraad*, *Staten-generaal*, dan di *Volkenbond*. Non-kooperasi Partindo tidak tertuju kepada dewan-dewan yang ada di Indonesia saja, tetapi seluruh dewan-dewan penjajah.⁷⁰

Hatta menyatakan terdapat perbedaan paham antara Partindo dengan PNI-baru. Hatta membantah pernyataan tersebut dengan pendapat menjadi anggota

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Hatta. “Keterangan dari SDR. Moh. Hatta”. *Daulat Ra'jat*. 20 Desember 1932.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Sukarno. “Non-cooperation”. *Oetoesan Indonesia*. 21 Desember 1932.

Tweede Kamer tidak bertentangan dengan dasar non-kooperasi. Menurut Hatta, *Tweede Kamer* adalah parlemen yang berbeda dengan dewan jajahan yang ada di Hindia Belanda. Dalam *Tweede Kamer*, kedudukan pemerintah dan oposisi sama kuatnya. Ia juga menyatakan azas non-kooperasi bukan berarti tanpa aksi, sama halnya dengan parlemen-aksi.⁷¹

Pembahasan selanjutnya, meningkatnya kegiatan dari Partindo dan PNI-baru setelah munculnya permasalahan Ordonansi Sekolah Liar dan pencalonan Hatta sebagai anggota *Tweede Kamer* pada tahun 1932 mengakibatkan pengawasan pemerintah dan campur tangan polisi semakin ketat.⁷² Kebijakan pemerintah kolonial dibawah kekuasaan Gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936) menjadi sangat reaksioner. De Jonge tidak mengakui eksistensi pergerakan nasional, sehingga tindakannya selalu mencurigai organisasi-organisasi pergerakan nasional. Rapat-rapat dan pertemuan selalu diawasi ketat oleh polisi setempat.⁷³ Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi pada saat itu sedang mengalami kesulitan akibat depresi ekonomi dunia. Depresi ekonomi terjadi sejak tahun 1929 dan mencapai puncaknya tahun 1933. Krisis ekonomi sangat berpengaruh di Indonesia. Pada masa itu, Indonesia dikenal sebagai penghasil bahan mentah. Depresi ekonomi mengakibatkan pembatasan produksi, PHK dan penurunan upah.⁷⁴

Kondisi politik di Indonesia tahun 1930-an sangat dipengaruhi dengan kebijakan politik reaksioner Gubernur Jenderal De Jonge. Pada saat itu banyak peristiwa pembubaran terhadap rapat-rapat kaum intelektual yang terjadi di beberapa kota yaitu Surabaya, Purworedjo, Probolinggo, Cilacap dan Kebumen.⁷⁵ Keadaan semakin bertambah parah dengan adanya peristiwa penangkapan para pimpinan PNI-baru cabang Surabaya pada tanggal 6 Januari 1933. Mereka yang ditangkap diantaranya Djawoto pimpinan *Cursuscommissie* PNI-baru cabang Surabaya. Tanggal 12 Januari 1933, Ismoe ketua PNI-baru Cabang Surabaya dan Hadimoeljo ditangkap

⁷¹ Hatta. "non-cooperation". *Daluat Ra'jat*. 30 Desember 1932.

⁷² Ingleson. *op. cit.*, hlm. 230.

⁷³ Suyatno Kartodirdjo. "Pemberontakan Anak Buah Kapal "Zeven Provincien", tahun 1933". *Prisma*. 1988. LP3ES.

⁷⁴ Mirjam Matters. (2003). *Dari perintah halus ke tindakan keras*. Jakarta: Hasta Mitra. hlm. 316.

⁷⁵ *Prisma.loc. cit.*

di solo. Mereka ditangkap karena mengedarkan surat selebaran rapat umum PNI-baru yang akan diadakan pada tanggal 8 Januari 1933. Surat selebaran itu ternyata berisi ajakan kepada rakyat, yaitu: “Ra’jat Indonesia haroes berrevoloetie semangat: dari perboedakan ke kemerdekaan!”.⁷⁶ Mereka dituduh melanggar pasal 153 bis karena menyebarkan isu revolusioner dengan menyebarkan pamflet yang menyerukan revolusi kepada pemerintah.⁷⁷

Ternyata insiden penangkapan pimpinan PNI-baru cabang Surabaya terhubung dengan peristiwa pemberontakan awak kapal perang *Zeven Provinciën* pada tanggal 4 – 10 Februari 1933. Pemberontakan ini diawali dari aksi pemogokan yang dilancarkan pelaut Belanda di Surabaya pada 30 Januari 1933 yang diikuti para pelaut Indonesia tanggal 3 Februari 1933. Pada masa itu, Serikat Pekerja Pegawai Bawahan Angkatan Laut di Surabaya menyelenggarakan rapat-rapat dan protes terhadap penurunan gaji sebesar 17 persen. Peristiwa ini dilakukan dengan memboikot kapal perang *Zeven Provinciën* oleh awak kapalnya berkebangsaan Indonesia yaitu Paradja, Rumambi, dan Kawilarang dalam rangka protes terhadap penurunan gaji dan penahanan terhadap para pelaut Indonesia pasca aksi Serikat Pekerja Pegawai Bawahan Angkatan Laut di Surabaya. Walaupun rencana ini diketahui oleh para awak kapal Belanda, mereka ikut mendukung aksi pemberontakan tersebut. Mereka bergerak pada tanggal 4 Februari 1933 dari Pelabuhan Olele menuju Pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 10 Januari 1933. Aksi yang mereka lakukan sebenarnya aksi tanpa kekerasan. Namun pemerintah sudah sangat khawatir dengan aksi ini dan kemudian mengirimkan beberapa kapal selamnya untuk mengepung *Zeven Provinciën* sebelum memasuki Batavia. Setelah itu pemerintah mengirimkan pesawat *Dormier* untuk memberi peringatan agar awak kapal perang *Zeven Provinciën* menyerahkan diri. Namun peringatan tersebut tidak digubris dan akhirnya pada tanggal 10 Februari 1933 pesawat *Dormier* menjatuhkan bom ke kapal perang

⁷⁶ “Pertjobaan atas P.N.I.!”. *Daulat Ra’jat*. 20 Januari 1933.

⁷⁷ Ingleson. *op. cit.*, hlm. 231.

Zeven Provinciën yang mengakibatkan terbunuhnya 16 orang awak kapal Indonesia dan puluhan lainnya luka berat.⁷⁸

Pemberontakan *Zeven Provinciën* menjadi alasan bagi pemerintah kolonial untuk menindas gerakan PNI-baru dan Partindo. Dalam laporan resmi tidak ditemukan persenjataan mengenai campur tangan kaum non-kooperasi dalam pemberontakan tersebut. Namun pers Belanda menyebarkan isu bahwa awak kapal Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan *Zeven Provinciën* adalah tindakan makar terhadap pemerintah kolonial. Akibat dari pemberontakan ini, mengakibatkan pergerakan PNI-baru dan Partindo semakin sulit. Polisi rahasia atau PID (*politieke Inlichtingen Dienst*)⁷⁹ mengawasi setiap gerakan dari PNI-baru dan Partindo.⁸⁰ Keadaan semakin diperparah dengan dikeluarkannya peraturan baru pemerintah mengenai larangan bagi pegawai negeri pemerintah kolonial untuk menjadi anggota PNI-baru dan Partindo. Peraturan tersebut diberlakukan pemerintah kolonial pada tanggal 27 Juni 1933. Kondisi tersebut tidak membuat pergerakan Partindo dan PNI-baru menjadi lemah. Pada bulan Juli 1933 Partindo tetap mengadakan kongres keduanya.⁸¹

Pada awal Agustus 1933, terjadi peristiwa yang membuat pergerakan non-kooperatif menjadi semakin lemah. Pada hari itu, Sukarno ditangkap pemerintah kolonial dengan tuduhan melanggar pasal 153 bis dan ter dari kitab hukum siksa Hindia Belanda. Ia dituduh menyebarkan karangan-karangan yang menghasut dalam *Fikiran Rakyat*⁸² dan bukunya *Mencapai Indonesia Merdeka*.⁸³ Sukarno kemudian di buang ke Ende, Flores. Setelah itu pada bulan Agustus 1933 pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan kepada pejabat-pejabat daerah untuk melarang seluruh

⁷⁸ Suyatno Kartodirdjo. "Pemberontakan Anak Buah Kapal "Zeven Provinciën", tahun 1933". *Prisma*. 1988. LP3ES.

⁷⁹ PID adalah polisi yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan organisasi pergerakan nasional dan berkuasa untuk menghadiri setiap rapat yang bersifat politik, dan diberikan kewenangan untuk menghentikan pidato dalam rapat-rapat yang mengancam pemerintah, membubarkan rapat dan menahan peserta yang dicurigai. Slametmujana. (1966). *Nasionalisme sebagai modal perjuangan bangsa Indonesia*. Jakarta. hlm. 47.

⁸⁰ Ibid. hlm. 49.

⁸¹ Bernard Dahm. (1987). *Sukarno dan Perjuangan kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES. hlm. 201.

⁸² Surat kabar yang didirikan Sukarno di Bandung.

⁸³ "Sukarno Ditangkap". *Daulat Ra'jat*. 10 Agustus 1933.

kegiatan partai. Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 1934 secara mendadak pemerintah menangkap beberapa anggota PNI-baru yaitu Hatta, Sjahrir, Maskoen, Burhanuddin, Murwoto, dan Bondan. Menjelang keputusan mengenai nasib mereka, Hatta ditahan di Penjara Glodok, Sjahrir dan lima orang lainnya di Penjara Cipinang. Keputusan pemerintah menghasilkan mereka dituduh menyebarkan isu yang berbahaya bagi keamanan umum menurut pasal 37 *Indische Staatsregeling*. Mereka kemudian dibuang ke *Boven Digoel*.⁸⁴



⁸⁴ Slametmoejana, *op.cit.*, hlm. 50.

BAB 5

KESIMPULAN

Dampak dari dibubarkannya PNI adalah terbentuknya dua organisasi yaitu Partindo dan PNI-baru. Kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan-perbedaan seperti perbedaan mengenai pola pergerakan Partindo yang menganjurkan aksi massa sedangkan PNI Baru menggunakan pergerakan kader. Perbedaannya terletak pada membaca situasi terakhir dan menilai kekuatan gerakan kaum nasionalis. Menurut pemimpin PNI Baru, aksi massa adalah tahap terakhir setelah ada massa anggota yang terdidik dan sadar politik dengan kepemimpinan kader partai yang kuat. Sedangkan menurut Partindo, pergerakan aksi massa adalah hal yang wajib dilakukan oleh organisasi non-kooperasi. Kemudian PNI Baru dan Partindo juga berbeda dalam menilai kapan waktu yang tepat untuk melakukan aksi massa. PNI-baru tidak menolak aksi massa seperti yang dilakukan Partindo, namun menurut PNI-baru, aksi massa adalah tahap terakhir setelah ada massa anggota yang terdidik dan sadar politik dengan kepemimpinan kader partai yang kuat. Perbedaan lainnya adalah Partindo menekankan persatuan organisasi adalah suatu keharusan untuk mencapai pergerakan nasional yang kuat. Berbeda dengan PNI-baru. PNI-baru bukan menekankan persatuan organisasi, melainkan persatuan tekad dan semangat dari seluruh organisasi pribumi baik organisasi kooperasi maupun organisasi non-kooperasi untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu, perbedaan lainnya adalah latar belakang dari tokoh-tokoh pendiri organisasi yang akhirnya membentuk ciri yang berbeda dari kedua organisasi tersebut.

Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian membuat Partindo dan PNI-baru saling bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan tersebut tampak dalam perang terbuka di surat kabar antara Sartono dan Hatta. Walaupun Sukarno melakukan usaha menghilangkan perbedaan-perbedaan antara sesama kaum nasionalis dan menghilangkan perdebatan ideologis dari kehidupan politik kaum nasionalis, namun

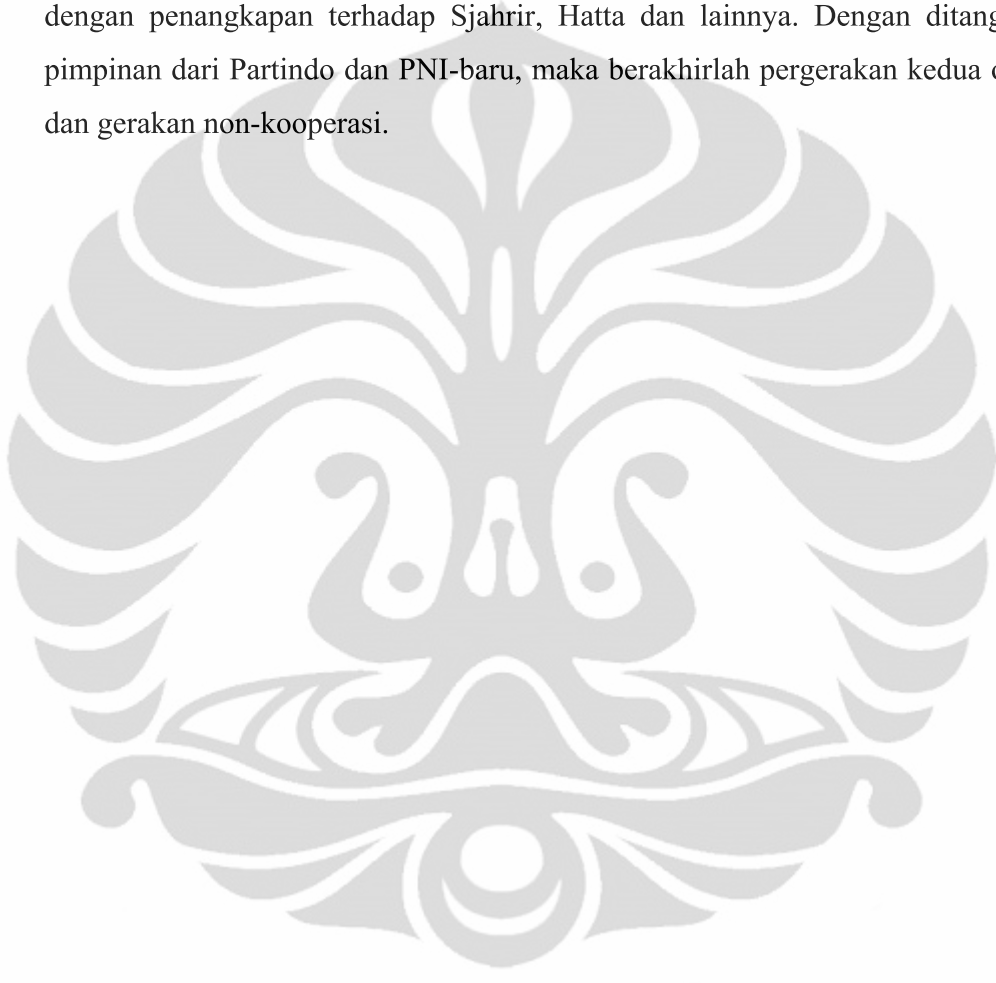
ternyata usahanya sia-sia. Perpecahan antara PNI-baru dan Partindo mengakibatkan pergerakan kedua organisasi lebih kepada pertentangan antara keduanya.

Dalam permasalahan pencalonan Hatta sebagai anggota *Tweede Kamer*, Partindo menyerang habis-habisan PNI-baru dengan menyatakan bahwa Hatta sudah keluar dari ideologi non-kooperasi dengan menerima pencalonan dirinya sebagai anggota dewan penjajah. Padahal Hatta sama sekali belum memberikan pernyataan apapun perihal pencalonannya. Hatta sangat menyesalkan tindakan Partindo yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan dirinya dan PNI-baru. Ia dan PNI-baru menolak dengan tegas pencalonan dirinya menjadi anggota *Tweede Kamer*.

Walaupun perpecahan dan pertentangan terjadi antara PNI-baru dan Partindo, untuk mencapai tujuan nasional mereka secara tidak langsung saling mendukung. Hal tersebut terlihat pada permasalahan Ordonansi Sekolah Liar tahun 1932. Partindo mengajak rakyat dan golongan non-kooperasi untuk bersama-sama menentang pelaksanaan Ordonansi Sekolah Liar di Indonesia. Begitu juga sebaliknya. PNI-baru melalui alat politiknya yaitu *Daulat Ra'jat* menentang pelaksanaan Ordonansi Sekolah Liar di Indonesia.

Pergerakan Partindo dan PNI-baru semakin radikal setelah munculnya permasalahan Ordonansi Sekolah Liar. Pemerintah kolonial pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal De Jonge yang terkenal reaksioner terhadap pergerakan organisasi politik pribumi. Rapat-rapat dan perkumpulan yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut diawasi ketat oleh pemerintah. Keadaan sosial dan ekonomi di Hindia Belanda semakin parah akibat depresi ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 1933. Hal tersebut ditandai dengan peristiwa penangkapan terhadap pimpinan PNI-baru cabang Surabaya. Terlebih lagi, terjadinya peristiwa *Zeven Provinciën* yaitu peristiwa pemboikotan awal kapal *Zeven Provinciën* yang menolak PHK dan pemotongan upah yang dilakukan pemerintah kolonial. Pemberontakan ini berdampak kepada tindakan pemerintah yang semakin reaksioner. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang melarang seluruh pegawai untuk bergabung dengan Partindo dan PNI-baru.

Tindakan pemerintah terhadap pergerakan non-kooperasi mencapai puncaknya dengan menangkap Sukarno atas tuduhan melanggar pasal 153 bis. Setelah itu pada bulan Agustus 1933 pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan kepada pejabat-pejabat daerah untuk melarang seluruh kegiatan partai. Dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Sjahrir, Hatta dan lainnya. Dengan ditangkap para pimpinan dari Partindo dan PNI-baru, maka berakhirilah pergerakan kedua organisasi dan gerakan non-kooperasi.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Surat Kabar

Persatoean Indonesia edisi bulan April 1931---bulan Maret 1933.

Daulat Ra'jat edisi bulan September 1931---bulan September 1934.

Surat kabar ini sudah dibukukan dalam dua jilid dengan judul “Daulat Ra'jat tahun 1931-1932 dan Daulat Ra'jat tahun 1933-1934.”

Sumber Buku

A.T., Nyak Wali. 1985. Mr. Sartono: Karya dan pengabdianya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dahm, Bernard. 1987. Sukarno dan perjuangan kemerdekaan. Jakarta: LP3ES.

Dhont, Frank. 2005. Nasionalisme baru intelektual Indonesia tahun 1920-an. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

Hatta, Mohammad. 1979. Memoir. Jakarta: Tinta Mas Indonesia.

Ingleson, John. 1983. Jalan ke pengasingan. Jakarta: LP3ES.

Matters, Mirjam. 2003. Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras. Jakarta: Hasta Mitra.

Mrazek, Rudolf. 1996. Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor.

Nalenan, R. 1982. Iskaq Tjokrohadisurjo: Alumni Desa Bersemangat Banteng. Jakarta: Gunung Agung.

Notosusanto, Nugroho, Sartono Kartodirdjo, dan Marwati Djoened Poesponegoro. 1975. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Notosoetardjo, H.A. 1963. Bung Karno Dihadapan Pengadilan Kolonial. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia.
- Pringgodigdo, A.K. 1991. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rose, Mavin. 1991. Indonesia merdeka: Biografi politik Mohammad Hatta. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Scholten, Elsbeth Locher. 1996. Etika Yang Berkeping-Keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877-1942. Jakarta: Djambatan.
- Sitorus, L.M. 1975. Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.
- Slametmujana. 1966. Nasionalisme sebagai modal perjuang bangsa Indonesia. Jakarta.
- Sukarno. 1951. Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno Dimuka Hakim Kolonial. Jakarta: S.K. Seno.
- Sutherland, Heather. 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi. Jakarta: Sinar Harapan.
- Van Niel, Robert. 1984. Munculnya Elite Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya.

Sumber Artikel

- Kartodirdjo, Suyatno. "Pemberontakan Anak Buah Kapal "Zeven Provincien", tahun 1933". Dalam Prisma 1988. LP3ES.
- "Ringkasan pidato – pembelaan dimoeka Landraad di – Bandoeng pada 1 dan 2 December 1930." Persatoean Indonesia, 9 desember 1930.

Sumber Internet

- (n.d.). Kemenangan atas rusia tahun 1905. 7 April 2011.
<http://spektrumku.wordpress.com/2008/02/08/kemenangan-jepang-atas-rusia-tahun-1905-awal-kebangkitan-asia/>
- Administrator. (2009). Mahatma Gandhi-perjuangan dan pemikirannya. 7 April 2011.
<http://forum.um.ac.id/index.php?topic=19141.0>

Lampiran 1¹

<p>...bah, distro...</p> <p>...siboea ba...</p> <p>...parah itoe?</p> <p>...ni anakoe...</p> <p>...jang ketji...</p> <p>...</p> <p>ngan. Akan...</p> <p>kaan. Akoe...</p> <p>rsama-sama...</p> <p>...</p> <p>ngan. Nanti...</p> <p>gankoe kiri...</p> <p>1 tangankoe...</p> <p>...</p> <p>Siapa jang...</p> <p>n tidak bo...</p> <p>tanganmo...</p> <p>boleh jadi...</p> <p>dan achir...</p> <p>tempat jang...</p> <p>...</p> <p>Jika kamo...</p> <p>soel seken...</p> <p>iggal, dapa...</p> <p>amoe...</p> <p>rik anakie...</p> <p>bertjoetjoe...</p> <p>...</p> <p>i menjadi...</p> <p>bertanja...</p> <p>ergi kene...</p> <p>pernah di...</p> <p>ia apa?</p> <p>...</p> <p>orang be...</p> <p>...</p> <p>anja orang...</p> <p>oe.</p> <p>ah melihat...</p> <p>...</p> <p>r. jang ke...</p> <p>iga maso...</p> <p>batang-ba...</p> <p>oe achir...</p> <p>lainja...</p> <p>an?"</p> <p>memegang...</p> <p>um soengai...</p> <p>...</p> <p>Dj.</p> <p>I.</p> <p>...</p> <p>ing terga...</p> <p>I. bersa...</p> <p>engadaka...</p> <p>nenjata...</p> <p>esan Raad...</p> <p>es P. N. I.</p> <p>ikan pada...</p> <p>di di tiap...</p> <p>ang salah...</p>	<p>Indonesia.</p> <p>Di Jacatra rapat itoe akan dikepalai oleh wakil P. P. K. I., toean Thamrin.</p> <p>Perhimpoean-perhimpoean jang tidak masoek dalam badan P. P. K. I., akan tetapi hendak toeroet dengan rapat terboeka itoe, diharap aken berhoebong dengan adres-adres, jang terseboet diatas ini.</p> <p>Ketoea Madjelis Pertimbangan dari P. P. K. I.</p> <p>Soetomo.</p> <p>Soerabaja, 23 April 1931.</p> <p>MAKLOEMAT. PEMBOEBARAN P. N. I.</p> <p>Kepada sekalian Ra'jat Indonesia!</p> <p>Sebagai saudara-saudara telah mengetahoei, maka tindakan pemerintah jang dilakoean pada hari boelan 29 December 1929 terhadap pada Partai Nasional Indonesia, disoedahi dengan penoentoetan dari ke-empat pemimpin kita Ir. Soekarno, Sdr. Gatot Mangkoepradja, Sdr. Maskoen dan Sdr. Soepriadinata, atas dakwaan melanggar artikel 153 bis dan 169 dari Boekoe.</p> <p>Dalam kepoetoesan landraad Boeang pada hari boelan 22 December 1931 maka ke-empat pemimpin kita itoe, mangkoe soedahi melanggar fatsal-fatsal Boekoe, Soekoe Hoekoem Siksa, dan atas diri mereka dijabeuhkan hoekoeman masing-masing 4 tahoen, 2 tahoen, 1 tahoen 8 boelan dan 1 tahoen 3 boelan.</p> <p>Berhoebong dengan kepoetoesan itoe maka ke-empat saudara kita tadi telah naik appel ke hakim jang lebih tinggi (Raad van Justitie).</p> <p>Pada hari boelan 17 April 1931 keloearlak kepoetoesan Raad van Justitie, jang mengoeatkan vonnis landraad Bandoeng itoe.</p> <p>Oleh kerna kepoetoesan ini, maka P. N. I. pada hari boelan 25 April 1931 telah mengadakan Congres loear biasa jang kedoea kalinya di Kota Djakarta oentoek menentoekan sikapnja.</p> <p>Congres jang ini, jang dikoendjoengi oleh wakil-wakil dari segenap tjabang-tjabang P. N. I., berpendapatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1e. bahwa vonnis landraad Bandoeng jang dikoeatkan oleh Raad van Justitie me-loekai perasaan keadilan dari Ra'jat Indonesia segenapnja. 2e. bahwa ke-empat saudara itoe dan Partai Nasional Indonesia tidak berdosa. 3e. bahwa vonnis landraad Bandoeng jang diperkoeatkan oleh Raad van Justitie tidak hanja mengenai ke-empat pemimpin itoe sadja, tetapi djoega mengenai segenap Partai. 4e. bahwa vonnis tadi semata-mata memboenoeh Partai Nasional Indonesia. 5e. bahwa karena keadaan memaksa (overmacht) lebih sempoerna memboebarkan Partai kita: <p>dan achirnja mengambil kepoetoesan memboebarkan Partai Nasional Indonesia.</p>	<p>Djakarta, 25 April 1931.</p> <p>Mr. Sartono</p> <p>S. Angronsoehirdjo (Hoofd-estuur)</p> <p>Ir. Anwari</p> <p>Soewirjo</p> <p>Soekemi</p> <p>Manadi</p> <p>Soengeb (Djakarta)</p> <p>Soekarto (Djakarta)</p> <p>Soebroto (Djakarta)</p> <p>Kr. Lawi (Pekalongan)</p> <p>M. Yahja Ns. (Pekalongan)</p> <p>Sofyan (Pekalongan)</p> <p>Haroen Ali (Pekalongan)</p> <p>Noengtiik (Palembang)</p> <p>Mr. Soejoedi (Mataram)</p> <p>Soetardjo (Bandoeng)</p> <p>Moh. Thoib (Bandoeng)</p> <p>Wijono (Malang)</p> <p>Soedarmo (Malang)</p> <p>Atmadji (Soerabaja)</p> <p>Pranata (Soerabaja)</p> <p>Dwidjowijoto (Semarang)</p> <p>Atmosantoso (Semarang)</p> <p>Soedjadi</p> <p>Mr. Ali Sastroamidjojo</p> <p>...</p> <p>Kekajaan tjabang Semarang diserahkan kepada Taman Siswa (penjerahan dikoeasakan pada M. Atmadji).</p> <p>Kekajaan tjabang Semarang diserahkan kepada Toean Tjipto penjerahan dikoeasakan pada T. Dwidjotenojo).</p> <p>Kekajaan tjabang Malang diserahkan pada Taman Siswa dan Pergoeroean Rajat (penjerahan dikoeasakan pada T. Wijono).</p> <p>Kekajaan tjabang Mataram diserahkan pada Taman Siswa dan Pergoeroean Rajat (penjerahan dikoeasakan pada T. Mr. Soejoedi).</p> <p>Kekajaan tjabang Bandoeng diserahkan kepada Cooperatie Karoekoenan (penjerahan dikoeasakan pada T. Manadi).</p> <p>Kekajaan tjabang Palembang diserahkan pada Badan Permoefakatan Pergerakan Palembang (penjerahan dikoeasakan pada T. Samidin).</p> <p>Kekajaan tjabang Pekalongan: barang-barang dioeroes oleh Comité terdiri dari sdr-sdr. Lawi, Jahja, J. Joesoef oentoek diserahkan pada pendirian-pendirian Nasional jang dianggap perloe;</p> <p>oeang pada fonds Taman Siswo boeat beli alat sekolah (penjerahan dikoeasakan pada T. Lawi).</p> <p>Kekajaan tjabang Djakarta: sakolah-sakolah B.O.M.A. diserahkan kepada Comité terdiri dari toean-toean Soewirjo, Njonjo, Soekarto, Soebroto dan Soengeb.</p> <p>Koersi-koersi jang ada di Gang Kenari boeat P. R.</p> <p>Polikliniek kepada Comité jang terdiri dari toean-toean Dr. Asikin, Mr. Sartono dan Angronsoehirdjo.</p>
---	--	---

¹ "Makloemat pembubaran P.N.I.", *Persatoean Indonesia*, loc. cit., 10 April 1931.

Lampiran 3³

138

PERSATOEAN INDONESIA

DAFTAR OESAHA.

Perkoempoelan PARTAI INDONESIA bekerja melaksakan azas dan toedjoenja:

- I. 1. Membangkitkan keinsafan bahwa Indonesia Merdeka menjadi hak bangsa Indonesia dan yang tentoe akan terjapat, kalau bangsa kita telah disioecon dalam golongan politik yang terasoer, dan bersama-sama mendjalankan politik kebangsaan sebagai kekeatan bangsa yang tidak merdeka.
2. Memperkoatkan perasaan kebangsaan yang beradaskan persatoean.
3. Memperkoatkan perasaan persatoean Indonesia dan mendjalankan politik Indonesia yang bertinah air satoe dan berbangsa satoe dan ber-toedjoen satoe.
4. Memperdalam pengetsoehan tentang sedjarah kebangsaan dan menasani perasaan men-dipendjoeng pahlawan-pahlawan dan pengandjoeng Indonesia.
5. Memperbaiki hoekeem kebangsaan (hoe-koem-ade) dengan seloes-loesnja dan meng-oesoekan soepja negeri memakai soeoen da-sar yang selaras dengan kemoedian bangsa Indonesia.
6. Menghapoeskan halangan-halangan yang merintang kemoedian diri, kemoedian roemah tangga dan halaman, kemoedian perasaan dan soeora dengan memakai madjallah (drukper), kemoedian kepertjajaan dan agama, kemoedian beradag dan berkoempoel, dan mengha-poeskan halangan-halangan yang ditoejoeken kepada rasoer-soerit dengan pas.
7. Bekerja bersama-sama soepja fasal-fasal dalam Kitab Hoekeem yang mengantjan per-gandjoer-pengandjoer yang mengharap pergera-kan politik dan sekerdja dipoeskan, bekerja bersama-sama dengan perkoempoelan politik lain soepja mendapat pengantjan dan penoeintetan yang selanjnja.
8. Mengpeladjar dan membocat rantjangan Da-sar Negeri (groudwet) yang selaras dengan ke-maoean bangsa Indonesia.
9. Mengekalkan pertalian antara bangsa-bangsa Asia dan memperbaiki nasib dari pergerakan bangsa yang tidak etas seperdoe merdeka.
- II. 1. Memadjoeken peri-kehidoean yang bersan-dar kepada tenaga sendiri dan yang merdeka.
2. Memadjoeken perdagang dan perniagaan dan tenaga Indonesia.
3. Memadjoeken heradjaran dan peroesahan dari bangsa Indonesia.
4. Mengoesahakan soepja peroesahan tanah anak-negeri mendapat modal, dan mendirikan bank-oenk nasional.
5. Memadjoeken soepja barang-barang bocat-ban bangsa Indonesia dipakat tebeleh-belehnja.
6. Mendirikan perserikatan-perserikatan kope-rasi.
7. Melawan riba dan menanan perasaan himat yang sedari dan soepja hideep sederhana.
- III. 1. Menengr boea-hoeort (taalafbetoes).
2. Mendirikan sekolah dan pergoeroean yang berdasarkan kebangsaan.
3. Mengoesahakan pengadjaran nasional, soe-pja berseroen dan bersamboeng sedjak dari sekolah rendah, sekolah tengah sampai ke seko-lah tinggi.
4. Mengeloearkan madjallah, boeke, kitab siaram dll. oentoek keperloean bangsa.
5. Memperbaiki deradja kaom perempoan.
6. Memadjoekan perpindahan dari poela satoe ke poela yang lain (inter-Indonésische em-grasie).
7. Memadjoeken soepja hak-hak tanah anak-negeri dipoeatkan atau dipoeangkan koem-

bali, dan memadjoeken soepja hak-lingkoeng (beschikkingrecht) dalam perkara ini diakoer seloes-loesnja.

8. Memadjoeken serikat tani dan vakkbond.
9. Memperhatikan soal kesehatan ra'jat.
10. Memerangi perkawinan anak, dan memerangi madat, minoenan keras dan pelajoeran.

—oO—

Lekaslah beli boeke?
"SEDJARAH PERGERAKAN
"INDONESIA 1929 — 1930"
 di bagi dalam 4 djilid di terbitkan oleh
"FONDS NASIONAL"
 —oO—

Djilid I. Memoet pidato² dari pehak Frac-tie Nasional, Fractie I. S. D. P. dan pe-hak Pemerintah tentang tindakan Pe-merintah terhadap kepada Partai Na-sional Indonesia harga f 0.75
 Djilid II. Memoet peperiksaan dari Ke-em-pat Pemimpin P. N. I. Ir. Soekarno, Gatot Mangkoepredja, Maskoen dan Soeprijadina, di moeka Landraad Bandoeng harga f 0.75
 Djilid III. Memoet pidato pembelaan di moeka Landraad dari Ir. Soekarno, harga f 1.—
 Djilid IV. Memoet pidato² pembelaan dari Mr. Sastronejoedjo, Idr Prawiradipoe-tra dan Mr. Sartono di moeka Land-raad Bandoeng harga f 0.75
 Boeke² terseboet bisa dibeli di:

1. Djakarta: a. Adm. "Persatoean Indo-nesia" Gang Kenari 15. Batavia-Centrum.
 b. Boekhandel "Jacatra" Kramat 124. Batavia-Centrum.
 c. Toko "Malabar" Molenvet Oost; 25. Batavia-Centrum.
 d. Adm. "Bintang Timoer" Krekot. Batavia-Centrum.
2. Soerabaja: a. "P.B.I." Adm. "Soe-ara" Oemoem" Boeboe-tan 4.
3. Solo: a. Adm. Sk. Darmakondo.
4. Pekalongan: Sdr. Kr. Lawi p/a Kope-rasi kebangsaan.
5. Tegal: Mr. Sastronejoedjo.
6. Bandoeng: a. Red. "Sipatahoenan" Pa-ngeran. Soemedangweg 115.
 b. Sdr. Manadi, Sekolah Taman Siswa, Tjirepoes.
7. Medan: Adm. "Pewartu Deli".
8. Jogjakarta: Adm. "Djanger" Stationsweg.

Kepada adres² itoe boleh dioega orang da-pat beli dengan djalan post, asal harga di-tambah f 0.10 — ongkos franco drukwerk, oentoek tiap² djilid.
 Kaom Nationalisten, lekaslah beli boe-ke² terseboet, yang dihiasi dengan banjak gambar² dari pahlawan² kita.

Sec. "Fonds Nasional"
 Sawah-Besar 32
 Batavia—Centrum.

—oO—

INDIA.

Gadoeh di-Burma.

Kawat dari Rangoon pada 25 Mei beri-

takan, bahwa dari beberapa bagian Burma masih teroes sadja datang berita kaom per-gerakan rajat dengan pasoean-pasoean polisi.

Permoesoehan dalam kalangan rajat di-antara beberapa bangsa di-Burma tambah hebat. Bockan orang India sadja yang dimoe-soehi oleh orang Burma, bangsa Karene poen, jaitoe bangsa Siam dan Tionghoa, di-serang poela. Dalam district Toungo, satoe desa kaom Karene dibakarnya. Tiga orang desa kena boenoch. Satoe jandi dan satoe pasar dalam district lain dibakar oleh mereka. Disitoe beberapa orang India kena boenoch.

Rajat berperang.

Pada 26 Mei dari Secarabad dikawatkan, bahwa pada petang hari ini brigade infan-terie yang ke-12 dan regiment Pandjabi yang ke-36 pergi ke-Burma. Balatantara bebera-pa bagian lagi mengoenggoe perintah akan melangkah poela. Pembesar-pembesar ni-liter tak soeka memberi kabar tentang kea-daan sekarang ini.

Regiment Dorga ke-17 soedah ditempat-kan di-Burma. Satoe regiment infanterie bangsa India melangkah kesitoe dalam se-mingoe ini. Ada lagi 2 regiment melangkah poela kemoedian, Regiment Manchester yang kedoea soedah diperingati, bahwa sewak-toe-waktoe boleh perloe poela mereka ke-Burma.

Lain dari pada itoe gerak balatantara itoe bergantoe dengan keadaan dan kepada kelengkapan oentoek mengangkoe.

Socara mengantjan dari Pemimpin Congres.

Pada 29 Mei dari Bombay dalam inter-view yang sangat diperhatikan orang, pe-mimpin Congres di-Bengali, Subha Bose, te-lah menyatakan kehendak yang bersoeng-goeh-soenggoeh soepja kain-kain Inggris diboycot dengan lebih hebat poela. Setelah pembitjaraan dengan Ghandi, dia meneran-kan, bahwa dalam permoesjawaratan keli-ng-media hendak ditoeontoe soepja ke-hendak India dileoeskan setjeloep-tjoe-koepnja. Djika tak dapat, moesti perlawan-an dilakoekan poela sebagai bermoela.

Bose meniatikan sangat berseotoedjoenja dengan Sjovet Rusland dan agak mememeh-kan Volkenbond.

Pertenggaran di-Burma.
 Kemarahan terhadap pada kaom India.

Pada 1 juni dari Calcutta dikabarkan, bahwa orang-orang yang lari dari Burma beritakan kedjadian-kedjadian yang kedjam tentang pengikoet-pengikoet kaom India di-Burma.

Amat ratoes orang yang melarikan diri, yang kebanyakan kaom boeroeh da-tang kemari dengan Aronda. Mereka me-njatakan bahwa kesoeakan di Burma lebih hebat dari pada pengiranja orang-orang di India-Hadapan.

Kemoekain kaom Burma didesa-desa makin hari makin hebat.

Kaom Burma dalam desa-desa sekarang hampir semoea bersendjata dengan sendja-ta perang.

Menoeret orang-orang lari itoe, sehari-hari beratoes-ratoes kaom India menarik kapal oentoek meninggalkan Rangoon, se-dang kebanyakan kaom dagang lelaki dan perempoan poelang kenegerinja.

³ "Daftar Oesaha Partai Indonesia"